SALINAN

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah, diperlukan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 38

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Pasal 9 Ayat 2 bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah. Sehingga untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada BAB III Pasal 9 bahwa:

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

3. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2025, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

e. Intruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

h. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025;

i. Intruksi Bupati Garut Nomor 900.1.3.3/1092/BPKAD Tentang Langkah Langkah Efisiensi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

j. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

1.2. Maksud dan Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang menjadi dasar bagi penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD).

Sedangkan, Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2025

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4);
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 9);

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beelanja Daerah (P-APBD), yang nanti menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja dan RKA serta DPA Perangkat Daerah. Hubungan antara dokumen tersebut tergambar dalam bagan berikut.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Perubahan RKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain

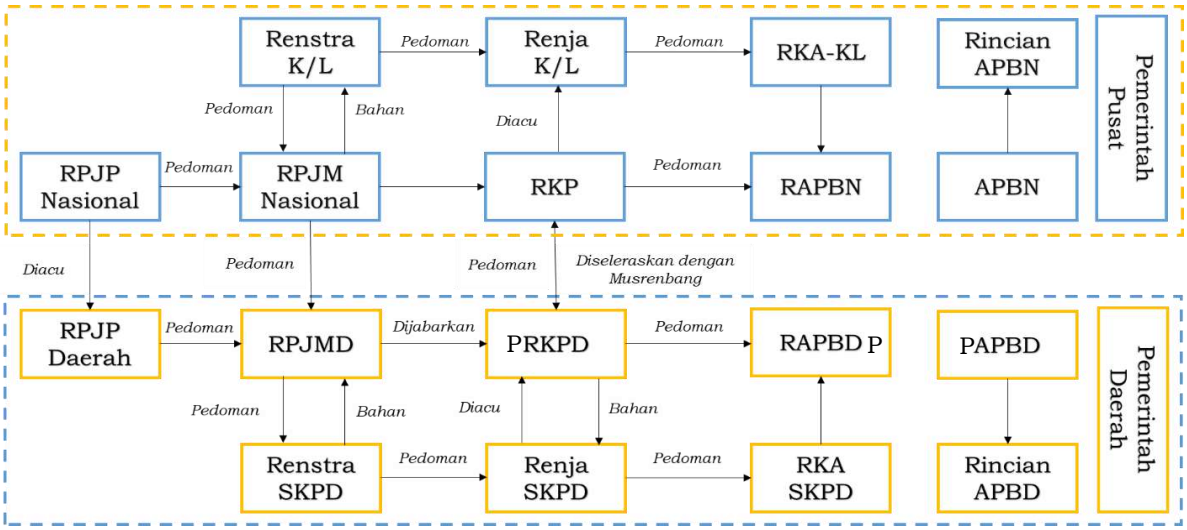

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud Perubahan RKPD Tahun 2025, tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025, dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, perubahan kerangka ekonomi daerah, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Memuat evaluasi hasil pelaksanaan program Perubahan RPD Tahun 2025-2026, dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat program dan kegiatan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025 yang mengalami pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Bab VI Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan RPD dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi RPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pagu dan realisasi RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan I Tahun 2025, serta rata-rata capaian RPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan rata-rata capaian RKPD pada Triwulan I Tahun 2025.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana jangka menengah dan rencana tahunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut. Dari 8 indikator makro, hanya indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tersedia capaian nya per triwulan.

Tabel 2.1 Realisasi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2024 dan Triwulan I 2025

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target 2024 berdasarkan Perubahan RPJMD	Ket.	Realisasi Triwulan I 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,91	69,7 - 70,68	Tidak Tercapai	-

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target 2024 berdasarkan Perubahan RPJMD	Ket.	Realisasi Triwulan I 2025
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,87 - 5,57	Tidak Tercapai	10,83
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,68	6,92 - 7,03	Tidak Tercapai	-
4	Pendapatan Per Kapita (ADHB) (Juta Rp)	29,01	25,43 - 25,61	Tercapai	-
5	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	6,96	6,41 - 6,61	Tidak Tercapai	-
6	Indeks Gini (poin)	0,324	0,35 - 0,36	Tercapai	-
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	n/a	n/a	-	-
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	62,37	63,21	Tidak Tercapai	-

Sumber: Target Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, realisasi data BPS Kab. Garut

Berdasarkan laporan BPS, pendorong adanya kenaikan PDRB pada Triwulan I 2025 yaitu:

- Meningkatnya produksi padi dan palawija karena masa panes raya di Bulan Februari dan Maret 2025
- Adanya libur hari raya Idul Fitri
- Meningkatnya perdagangan
- Meningkatnya produksi hortikultura

Adapun faktor penghambat nya yaitu:

- Menurunnya Tingkat hunian kamar di Triwulan I Tahun 2025
- Penurunan kinerja industry

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Garut Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	n/a
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,87
5	Prevalensi *Stunting*	%	14,2
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	51,17
8	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan	%	3,87
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,44
10	Rasio PDRB Perdagangan	%	18,42
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,3
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	25,27
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,96
14	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,99
15	Tingkat Kemiskinan	%	9,68
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53
17	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	%	10,83
18	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	n/a
19	Persentase Desa Mandiri	%	36,1
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,37
21	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	n/a
22	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75
23	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	84,49

Sumber : BPS, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, diolah Bappeda 2025

2.1.2. Realisasi Anggaran Program RPD

Realisasi anggaran RPD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran RPD Kabupaten Garut sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPD Kabupaten Garut Tahun 2025 Sampai Triwulan I Tahun 2025

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPD TAHUN 2025	% REALISASI RPD TAHUN 2025	REALISASI APBD TW I TAHUN 2025
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	7.458.139.982.004	5,48	408.812.687.738
1.01 Pendidikan	4.042.944.954.032	7,21	291.487.977.080
1.02 Kesehatan	2.118.211.446.041	4,44	94.151.099.838
1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	855.639.000.000	1,14	9.753.802.555
1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	265.305.000.000	0,94	2.489.190.115
1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	97.454.853.698	8,07	7.862.363.254
1.06 Sosial	78.584.728.233	3,90	3.068.254.896
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.126.076.205.714	5,01	56.422.976.259
2.07 Tenaga Kerja	41.398.105.303	4,86	2.012.371.950
2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	31.596.479.000	6,51	2.058.052.652

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPD TAHUN 2025	% REALISASI RPD TAHUN 2025	REALISASI APBD TW I TAHUN 2025
2.09 Pangan	34.632.098.070	5,04	1.746.491.481
2.10 Pertanahan	1.850.000.000	7,67	141.802.800
2.11 Lingkungan Hidup	216.647.766.904	4,43	9.601.285.154
2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51.136.887.656	5,10	2.607.753.094
2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	89.593.675.686	3,22	2.886.895.009
2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	62.050.725.000	11,33	7.032.624.550
2.15 Perhubungan	146.103.117.080	9,28	13.551.405.423
2.16 Komunikasi Dan Informatika	49.808.505.242	4,91	2.447.974.036
2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	27.682.123.120	7,20	1.993.077.073
2.18 Penanaman Modal	66.931.200.000	2,18	1.458.921.917
2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	205.490.781.918	2,40	4.923.045.474
2.20 Statistik	2.350.000.000	1,13	26.474.200
2.21 Persandian	3.100.000.000	0,19	5.810.000
2.22 Kebudayaan	66.105.000.000	2,76	1.823.632.588
2.23 Perpustakaan	27.124.860.411	7,05	1.911.788.578
2.24 Kearsipan	2.474.880.324	7,82	193.570.280
3 Urusan Pemerintahan Pilihan	813.054.783.000	2,28	18.524.296.916
3.25 Kelautan Dan Perikanan	149.294.500.000	2,33	3.475.160.177
3.26 Pariwisata	44.430.000.000	0,60	267.998.785
3.27 Pertanian	330.893.029.000	2,59	8.568.511.685

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF RPD TAHUN 2025	% REALISASI RPD TAHUN 2025	REALISASI APBD TW I TAHUN 2025
3.29 Energi Dan Sumber Daya Mineral	320.000.000	1,47	4.700.000
3.30 Perdagangan	226.458.000.000	0,09	193.593.926
3.31 Perindustrian	61.259.254.000	9,81	6.010.672.343
3.32 Transmigrasi	400.000.000	0,92	3.660.000
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	506.927.893.300	6,59	33.398.770.832
4.01 Sekretariat Daerah	233.239.704.543	7,75	18.065.694.987
4.02 Sekretariat DPRD	273.688.188.757	5,60	15.333.075.845
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.789.371.478.551	13,03	233.134.568.690
5.01 Perencanaan	39.440.892.960	6,59	2.600.131.045
5.02 Keuangan	1.662.998.520.537	13,69	227.640.280.404
5.03 Kepegawaian	59.820.854.239	4,69	2.807.933.423
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	23.226.598.815	0,09	20.321.818
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	3.884.612.000	1,70	65.902.000
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	102.533.609.570	5,10	5.225.115.647
6.01 Inspektorat Daerah	102.533.609.570	5,10	5.225.115.647
7 Unsur Kewilayahan	398.019.499.230	7,44	29.611.104.015
7.01 Kecamatan	398.019.499.230	7,44	29.611.104.015
8 Unsur Pemerintahan Umum	44.913.511.513	5,76	2.585.048.530
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	44.913.511.513	5,76	2.585.048.530
Jumlah	12.239.036.962.882	6,44	787.714.568.627

Sumber: Perubahan RPD Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD 2025

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif akhir periode RPD Tahun 2025 terhadap realisasi APBD TA. 2025, dari total pagu indikatif akhir periode RPD Tahun 2025 sebesar Rp. 12.239.036.962.882,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya sampai triwulan I dapat direalisasikan sebesar Rp. 787.714.568.627,00 atau sebesar 6,44%.

2.1.3. Tingkat Capaian Kinerja Program RPD

Capaian RPD merupakan hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RPD dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, diperoleh rata-rata tingkat capaian RPD sampai triwulan I Tahun 2025 adalah 15,03% untuk target kinerja dan 8,17% untuk target anggaran.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RPD Kabupaten Garut Tahun 2025 Sampai Triwulan I Tahun 2025

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8,84%	4,45%
1.01 Pendidikan	5,13%	2,26%
1.02 Kesehatan	3,85%	1,93%
1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3,45%	1,35%
1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4,71%	2,40%
1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	15,68%	8,14%
1.06 Sosial	6,50%	3,28%
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	7,94%	4,37%
2.07 Tenaga Kerja	6,94%	3,57%
2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6,16%	3,02%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
2.09 Pangan	6,46%	3,07%
2.10 Pertanahan	21,36%	10,68%
2.11 Lingkungan Hidup	3,26%	1,73%
2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,45%	3,48%
2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5,19%	2,64%
2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17,95%	9,29%
2.15 Perhubungan	16,16%	8,58%
2.16 Komunikasi Dan Informatika	7,64%	5,38%
2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4,37%	3,80%
2.18 Penanaman Modal	3,72%	1,29%
2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	3,66%	3,08%
2.20 Statistik	4,41%	1,13%
2.21 Persandian	0,39%	0,19%
2.22 Kebudayaan	8,11%	1,63%
2.23 Perpustakaan	8,16%	5,21%
2.24 Kearsipan	12,54%	10,95%
3 Urusan Pemerintahan Pilihan	3,26%	1,53%
3.25 Kelautan Dan Perikanan	3,83%	1,67%
3.26 Pariwisata	3,41%	0,67%
3.27 Pertanian	2,36%	1,13%
3.29 Energi Dan Sumber Daya Mineral	3,16%	1,47%
3.30 Perdagangan	0,78%	0,37%
3.31 Perindustrian	8,35%	4,89%
3.32 Transmigrasi	1,83%	0,92%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RPD s/d Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	12,78%	5,67%
4.01 Sekretariat Daerah	13,28%	6,06%
4.02 Sekretariat DPRD	12,29%	5,29%
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9,38%	4,00%
5.01 Perencanaan	11,17%	4,69%
5.02 Keuangan	13,71%	6,74%
5.03 Kepegawaian	13,54%	4,02%
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	0,76%	0,09%
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	3,38%	1,70%
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7,66%	3,39%
6.01 Inspektorat Daerah	7,66%	3,39%
7 Unsur Kewilayahan	22,76%	12,71%
7.01 Kecamatan	22,76%	12,71%
8 Unsur Pemerintahan Umum	7,84%	3,73%
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	7,84%	3,73%
Jumlah	15,03%	8,17%

Sumber: RPD Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD 2025

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

2.2.1. Realisasi Anggaran Program RKPD

Realisasi anggaran program RKPD merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam RKPD. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam RPD. Realisasi anggaran RKPD Tahun 2025 sampai triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 Sampai Triwulan I Tahun 2025

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	4.226.539.949.203	10,36%	408.812.687.738
1.01 Pendidikan	1.900.757.977.567	15,34%	291.487.977.080
1.02 Kesehatan	1.057.981.731.311	8,90%	94.151.099.838
1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.046.556.361.832	0,93%	9.753.802.555
1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	132.746.015.975	1,88%	2.489.190.115
1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47.958.409.067	16,10%	7.862.363.254
1.06 Sosial	40.539.453.451	7,57%	3.068.254.896
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	593.716.542.975	10,33%	56.422.976.259
2.07 Tenaga Kerja	20.469.665.916	9,83%	2.012.371.950
2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.155.979.000	13,58%	2.058.052.652
2.09 Pangan	16.292.957.448	10,72%	1.746.491.481
2.10 Pertanahan	925.000.000	15,33%	141.802.800
2.11 Lingkungan Hidup	126.455.094.780	7,59%	9.601.285.154
2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26.966.857.002	9,67%	2.607.753.094
2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45.391.837.843	6,36%	2.886.895.009

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	33.229.254.260	21,16%	7.032.624.550
2.15 Perhubungan	73.700.719.528	18,39%	13.551.405.423
2.16 Komunikasi Dan Informatika	26.650.993.997	9,19%	2.447.974.036
2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	21.000.000.000	9,49%	1.993.077.073
2.18 Penanaman Modal	17.524.935.502	8,32%	1.458.921.917
2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	137.196.958.871	3,59%	4.923.045.474
2.20 Statistik	600.000.000	4,41%	26.474.200
2.21 Persandian	1.500.000.000	0,39%	5.810.000
2.22 Kebudayaan	14.019.104.283	13,01%	1.823.632.588
2.23 Perpustakaan	15.053.908.200	12,70%	1.911.788.578
2.24 Kearsipan	1.583.276.345	12,23%	193.570.280
3 Urusan Pemerintahan Pilihan	330.108.505.584	5,35%	18.524.296.916
3.25 Kelautan Dan Perikanan	39.747.000.000	8,74%	3.475.160.177
3.26 Pariwisata	7.728.526.584	3,47%	267.998.785
3.27 Pertanian	134.557.852.000	4,14%	8.568.511.685
3.29 Energi Dan Sumber Daya Mineral	160.000.000	2,94%	4.700.000
3.30 Perdagangan	113.103.000.000	0,17%	193.593.926
3.31 Perindustrian	34.612.127.000	17,37%	6.010.672.343
3.32 Transmigrasi	200.000.000	1,83%	3.660.000
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	232.000.649.240	14,43%	33.398.770.832
4.01 Sekretariat Daerah	113.142.357.823	15,97%	18.065.694.987
4.02 Sekretariat DPRD	118.858.291.417	12,90%	15.333.075.845
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	853.590.849.683	11,99%	233.134.568.690

Nama Urusan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	% Realisasi thd RKPD	Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.01 Perencanaan	18.068.396.291	14,39%	2.600.131.045
5.02 Keuangan	813.614.136.708	18,59%	227.640.280.404
5.03 Kepegawaian	17.293.146.761	16,24%	2.807.933.423
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	2.665.231.923	0,76%	20.321.818
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	1.949.938.000	3,38%	65.902.000
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	45.471.143.317	11,49%	5.225.115.647
6.01 Inspektorat Daerah	45.471.143.317	11,49%	5.225.115.647
7 Unsur Kewilayahan	208.484.322.246	16,53%	29.611.104.015
7.01 Kecamatan	208.484.322.246	16,53%	29.611.104.015
8 Unsur Pemerintahan Umum	21.387.386.435	12,09%	2.585.048.530
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.387.386.435	12,09%	2.585.048.530
Jumlah	6.511.299.348.683	13,14%	787.714.568.627

Sumber : Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD 2025.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata rata, realisasi anggaran RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 13,14%. Realisasi RKPD sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RKPD

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RKPD Tahun 2025, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Garut sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah 15,08% untuk target kinerja, dan 13,14% untuk target anggaran.

Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 Sampai Triwulan I Tahun 2025

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	9,04%	10,36%
1.01 Pendidikan	5,13%	15,34%
1.02 Kesehatan	4,00%	8,90%
1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2,73%	0,93%
1.04 Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4,71%	1,88%
1.05 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16,40%	16,10%
1.06 Sosial	6,51%	7,57%
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8,12%	10,33%
2.07 Tenaga Kerja	7,34%	9,83%
2.08 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6,23%	13,58%
2.09 Pangan	6,51%	10,72%
2.10 Pertanahan	21,36%	15,33%
2.11 Lingkungan Hidup	3,29%	7,59%
2.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6,79%	9,67%
2.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5,19%	6,36%
2.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17,99%	21,16%
2.15 Perhubungan	16,16%	18,39%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
2.16 Komunikasi Dan Informatika	7,97%	9,19%
2.17 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	5,97%	9,49%
2.18 Penanaman Modal	3,72%	8,32%
2.19 Kepemudaan Dan Olahraga	3,67%	3,59%
2.20 Statistik	4,41%	4,41%
2.21 Persandian	0,39%	0,39%
2.22 Kebudayaan	8,11%	13,01%
2.23 Perpustakaan	8,55%	12,70%
2.24 Kearsipan	12,54%	12,23%
3 Urusan Pemerintahan Pilihan	3,27%	5,35%
3.25 Kelautan Dan Perikanan	3,83%	8,74%
3.26 Pariwisata	3,41%	3,47%
3.27 Pertanian	2,51%	4,14%
3.29 Energi Dan Sumber Daya Mineral	2,94%	2,94%
3.30 Perdagangan	0,79%	0,17%
3.31 Perindustrian	8,35%	17,37%
3.32 Transmigrasi	1,83%	1,83%
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	12,78%	14,43%
4.01 Sekretariat Daerah	13,28%	15,97%
4.02 Sekretariat DPRD	12,29%	12,90%
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9,22%	11,99%
5.01 Perencanaan	10,20%	14,39%
5.02 Keuangan	13,71%	18,59%
5.03 Kepegawaian	13,54%	16,24%

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	0,76%	0,76%
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	3,38%	3,38%
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7,66%	11,49%
6.01 Inspektorat Daerah	7,66%	11,49%
7 Unsur Kewilayahan	22,76%	16,53%
7.01 Kecamatan	22,76%	16,53%
8 Unsur Pemerintahan Umum	7,84%	12,09%
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	7,84%	12,09%
Jumlah	15,08%	13,14%

Sumber: RKPD Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2025

Berdasarkan uraian, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam dokumen RKPD, namun karena adanya perubahan kebijakan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada saat tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut mengalami perubahan anggaran dan/atau tidak mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut menyebabkan perbedaan antara realisasi dokumen rencana dengan realisasi dokumen anggaran.

RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPD Tahun 2025-2026, dengan 7 (tujuh) Prioritas pembangunan, yaitu:

1) Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
2) Reformasi kualitas sistem pendidikan, dan transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda;
3) Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi;
4) Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, penguatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong peningkatan inovasi dan pendapatan daerah;

5) Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial;
7) Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif;

Secara rinci capaian program dari pelaksanaan dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut, dapat dijelaskan melalui pencapaian program yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rata-Rata Capaian Program sampai Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025		Program	Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja			25.213.000.000	1.431.519.560	5,88%	5,88%	
		1	HUBUNGAN INDUSTRIAL	875.000.000	65.758.000	7,52%	7,52%	
		2	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.008.000.000	62.821.900	1,05%	1,05%	
		3	PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000	3.660.000	1,83%	1,83%	
		4	PENANGANAN BENCANA	4.025.000.000	1.128.294.000	28,03%	28,03%	√√
		5	PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.080.000.000	69.768.010	1,71%	1,71%	
		6	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350.000.000	0	0,00%	0,00%	
		7	REHABILITASI SOSIAL	9.675.000.000	101.217.650	1,05%	1,05%	
2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda			1.207.007.936.520	15.730.562.726	5,81%	5,81%	
		1	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.250.000.000	34.800.000	2,78%	2,78%	
		2	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	8.770.300.000	2.053.484.000	23,41%	23,41%	√
		3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	568.185.000	4.500.000	0,79%	0,79%	
		4	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	14.660.325.000	2.570.688.900	17,54%	17,54%	√

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		5	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.666.502.200	211.137.800	7,92%	7,92%	
		6	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.670.000.000	109.270.400	6,54%	6,54%	
		7	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	398.374.145.571	2.312.512.436	0,58%	0,58%	
		8	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.038.000.000	2.319.300.000	7,72%	7,72%	
		9	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	963.000.000	0	0,00%	0,00%	
		10	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	613.700.675.640	20.580.000	0,00%	0,00%	
		11	PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	2.870.000	1,91%	1,91%	
		12	PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	775.000.000	0	0,00%	0,00%	
		13	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	98.445.611.612	2.729.002.190	2,77%	2,77%	
		14	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.161.519.321	618.840.000	5,54%	5,54%	
		15	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.911.942.476	0	0,00%	0,00%	
		16	PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.100.000.000	0	0,00%	0,00%	
		17	PENGENDALIAN PENDUDUK	8.100.000.000	2.381.068.000	29,40%	29,40%	√√
		18	PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	750.000.000	0	0,00%	0,00%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		19	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.678.157.000	169.180.000	2,53%	2,53%	
		20	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	320.000.000	14.700.000	4,59%	4,59%	
		21	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.130.000.000	58.500.000	2,75%	2,75%	
		22	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	649.479.000	96.473.000	14,85%	14,85%	√
		23	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.175.093.700	23.656.000	2,01%	2,01%	
3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi			76.568.975.321	13.280.894.543	6,65%	6,65%	
		1	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12.408.776.000	827.467.012	6,67%	6,67%	
		2	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.010.392.200	12.900.000	0,43%	0,43%	
		3	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	971.547.400	8.273.081	0,85%	0,85%	
		4	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.636.893.921	9.040.921.300	24,68%	24,68%	√
		5	PENATAAN DESA	900.000.000	0	0,00%	0,00%	
		6	PENETAPAN TANAH ULAYAT	150.000.000	0	0,00%	0,00%	
		7	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100.000.000	0	0,00%	0,00%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		8	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	980.724.900	38.974.300	3,97%	3,97%	
		9	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.500.000.000	2.000.000	0,13%	0,13%	
		10	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.745.556.700	1.903.545.600	21,77%	21,77%	√
		11	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.820.000.000	1.440.513.250	21,12%	21,12%	√
		12	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.345.084.200	6.300.000	0,14%	0,14%	
4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan			278.854.362.752	3.622.744.034	3,68%	3,68%	
		1	PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	227.000.000	5.654.000	2,49%	2,49%	
		2	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	630.273.980	96.000.000	15,23%	15,23%	√
		3	PEMASARAN PARIWISATA	750.000.000	53.997.644	7,20%	7,20%	
		4	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.250.000.000	0	0,00%	0,00%	
		5	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.685.636.709	72.264.100	0,94%	0,94%	
		6	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	518.712.550	15.256.800	2,94%	2,94%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		7	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	385.000.000	33.626.400	8,73%	8,73%	
		8	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	300.000.000	24.459.600	8,15%	8,15%	
		9	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	625.803.844	32.165.000	5,14%	5,14%	
		10	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	900.000.000	0	0,00%	0,00%	
		11	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.400.000.000	45.970.991	0,44%	0,44%	
		12	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.700.000.000	38.580.836	0,50%	0,50%	
		13	PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	190.321.000	0	0,00%	0,00%	
		14	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	0	0,00%	0,00%	
		15	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.544.111.350	23.210.000	1,50%	1,50%	
		16	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	210.888.800	0	0,00%	0,00%	
		17	PENGEMBANGAN EKSPOR	5.000.000.000	20.107.926	0,40%	0,40%	
		18	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	771.600.000	0	0,00%	0,00%	
		19	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.491.204.000	42.130.000	2,83%	2,83%	
		20	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.877.071.000	62.575.815	3,33%	3,33%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		21	PENGEMBANGAN UMKM	1.450.000.000	81.729.300	5,64%	5,64%	
		22	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	115.000.000	0	0,00%	0,00%	
		23	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.750.000.000	130.472.472	3,48%	3,48%	
		24	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	827.235.900	14.607.000	1,77%	1,77%	
		25	PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	993.000.000	13.086.000	1,32%	1,32%	
		26	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.000.000.000	2.350.000	0,12%	0,12%	
		27	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	310.000.000	9.300.000	3,00%	3,00%	
		28	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.890.566.784	151.425.326	3,10%	3,10%	
		29	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.143.455.835	167.679.600	2,73%	2,73%	
		30	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	104.050.000.000	138.400.000	0,13%	0,13%	
		31	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	57.782.500.000	17.420.000	0,09%	0,09%	
		32	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.762.076.000	277.082.098	0,80%	0,80%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		33	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	175.000.000	99.905.400	57,09%	57,09%	√√
		34	PENYULUHAN PERTANIAN	6.875.000.000	111.349.000	0,87%	0,87%	
		35	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.350.000.000	1.772.877.826	13,28%	13,28%	√
		36	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	320.000.000	1.040.000	0,33%	0,33%	
		37	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	490.000.000	860.000	0,13%	0,13%	
		38	PROMOSI PENANAMAN MODAL	672.905.000	4.303.500	0,64%	0,64%	
		39	REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	600.000.000	41.897.400	6,98%	6,98%	
		40	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.240.000.000	10.410.000	0,46%	0,46%	
		41	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	500.000.000	10.550.000	2,11%	2,11%	
5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.276.918.946.972	16.359.362.270	2,67%	2,67%	
		1	KAWASAN PERMUKIMAN	8.300.000.000	3.700.000	0,04%	0,04%	
		2	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	21.200.000.000	466.854.100	2,20%	2,20%	
		3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.115.000.000	18.000.000	1,61%	1,61%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		4	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	3.204.177	3,20%	3,20%	
		5	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.746.976.430	300.000	0,00%	0,00%	
		6	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.672.541.000	10.860.000	0,10%	0,10%	
		7	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	48.642.649.500	11.709.000	0,02%	0,02%	
		8	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	40.148.900.000	135.375.000	0,34%	0,34%	
		9	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	83.507.556.000	27.791.000	0,03%	0,03%	
		10	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	160.000.000	4.700.000	2,94%	2,94%	
		11	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	8.996.500.000	117.632.621	1,31%	1,31%	
		12	PENGELOLAAN PELAYARAN	200.000.000	5.300.000	2,65%	2,65%	
		13	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	77.200.000.000	3.956.538.395	5,13%	5,13%	
		14	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	189.353.680.000	562.692.600	0,30%	0,30%	
		15	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.199.719.600	156.374.000	7,11%	7,11%	
		16	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.985.000.000	3.500.000	0,06%	0,06%	
		17	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	150.000.000	0	0,00%	0,00%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		18	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	9.339.800.000	191.539.708	2,05%	2,05%	
		19	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	6.360.000	3,18%	3,18%	
		20	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	225.000.000	560.000	0,25%	0,25%	
		21	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100.700.000.000	92.734.500	0,09%	0,09%	
		22	PENYELENGGARAAN JALAN	624.486.874.442	2.029.378.080	0,32%	0,32%	
		23	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.849.200.000	8.516.539.892	35,71%	35,71%	√√
		24	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.399.550.000	18.590.000	0,42%	0,42%	
		25	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.540.000.000	3.169.197	0,21%	0,21%	
		26	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	7.500.000.000	15.960.000	0,21%	0,21%	
6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial			16.472.849.500	661.292.726	2,19%	2,19%	
		1	PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.788.000.000	282.770.000	7,46%	7,46%	
		2	PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	155.000.000	0	0,00%	0,00%	
		3	PENANGGULANGAN BENCANA	8.211.849.500	338.932.726	4,13%	4,13%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		4	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.568.000.000	1.600.000	0,07%	0,07%	
		5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.750.000.000	37.990.000	1,38%	1,38%	
7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif			945.124.715.624	237.962.012.027	22,19%	22,29%	
		1	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	50.550.976.144	4.133.356.615	8,18%	8,18%	
		2	KEPEGAWAIAN DAERAH	4.949.760.500	357.526.829	7,22%	7,22%	
		3	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.512.901.640	273.793.357	7,79%	7,79%	
		4	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.168.705.869	1.559.937.572	30,92%	30,92%	√√
		5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.082.000.000	23.222.000	2,15%	2,15%	
		6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.591.003.654	1.987.670.910	22,35%	22,35%	√
		7	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.750.525.130	806.431.650	36,25%	37,16%	√√
		8	PENCATATAN SIPIL	633.575.344	31.131.590	4,91%	4,91%	
		9	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	8.264.911.266	1.151.294.762	13,93%	13,93%	√
		10	PENDAFTARAN PENDUDUK	5.997.154.060	344.635.172	5,75%	5,75%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		11	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.949.938.000	65.902.000	3,38%	3,38%	
		12	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.612.784.500	162.229.551	3,52%	3,52%	
		13	PENGELOLAAN ARSIP	883.276.345	86.785.280	9,83%	9,83%	
		14	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.185.000.000	406.838.400	7,85%	7,85%	
		15	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	312.000.000	24.145.000	7,74%	7,74%	
		16	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.739.750.532	64.323.683	1,72%	1,72%	
		17	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.568.915.600	452.394.300	9,90%	9,90%	
		18	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	752.986.000.000	221.253.209.408	29,38%	29,38%	√√
		19	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.736.860.900	1.016.010.071	8,66%	8,66%	
		20	PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	384.650.000	32.284.400	8,39%	8,39%	
		21	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.665.231.923	20.321.818	0,76%	0,76%	
		22	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.649.919.117	1.676.995.781	15,50%	15,50%	√
		23	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.331.936.750	783.807.778	5,47%	5,47%	
		24	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.500.000.000	5.810.000	0,39%	0,39%	
		25	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	600.000.000	26.474.200	4,41%	4,41%	

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Program		Pagu RKPD 2025	Realisasi Anggaran Sampai TW I 2025	% Kinerja	% Realisasi Keuangan	Status Pemenuhan target
		26	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.325.696.420	824.047.000	15,31%	15,31%	√
		27	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.023.284.255	115.879.746	2,88%	2,88%	
		28	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.467.502.000	110.320.154	4,47%	4,47%	
		29	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	700.000.000	106.785.000	15,26%	15,26%	√
		30	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.000.455.675	58.448.000	1,95%	1,95%	
	Penunjang			2.685.138.561.994	498.666.180.741	16,38%	16,38%	
		1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.685.138.561.994	498.666.180.741	16,38%	16,38%	√
			Total	6.511.299.348.683	787.714.568.627	16,18%	16,22%	

Sumber: Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD 2025.

Keterangan:
√ : Realisasi capaian kinerja dan realisasi keuangan > 10%
√√ : Realisasi capaian kinerja dan realisasi keuangan > 25%

Pencapaian kinerja program perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara rata rata dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 787.714.568.627,00 atau mencapai 16,22% terhadap rencana program dalam RKPD Tahun 2025, dengan rata rata capaian kinerja sebesar 16,18%. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2025, terdapat 14 program yang memiliki capaian realisasi anggaran dan kinerja lebih dari 10% dan terdapat 7 program dengan capaian lebih dari 25%.

Adapun untuk setiap prioritas pembangunan tahun 2025, 6 prioritas dari 7 prioritas memiliki capaian realisasi anggaran dan kinerja dibawah 25% dengan rincian untuk setiap prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja (5,88% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
2) Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda (5,81% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
3) Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi (6,65% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
4) Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan (3,68% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
5) Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (2,67% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
6) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan social (2,19% terhadap realisasi pagu program dan realisasi kinerja);
7) Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif (22,29% terhadap realisasi pagu program dan 22,19% realisasi kinerja).

2.2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2025 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2024

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
1. SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100	98,96	Dinas Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	100	95,50	Dinas Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100	97,13	Dinas Pendidikan
2. SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100	90,49	Dinas Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	100	89,31	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100	93,43	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100	95,5	Dinas Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	100	99,95	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100	100	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100	97,00	Dinas Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		100	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	100	100	Dinas Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100	101,58	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodefici ency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	100	101,8	Dinas Kesehatan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
3. SPM PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100	90,74	Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perem puan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	100	68,53	Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang
				6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			
4.SPM PERUMAHAN RAKYAT							

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
5. SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100	98,44	Dinas Pemadam Kebakaran
6. SPM SOSIAL							

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100	100	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100	100	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100	100	Dinas Sosial

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM	Capaian SPM 2024	SKPD
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100	100	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	100	98,44	Dinas Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

2.2.4. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dari sebanyak 428 program dalam RKPD tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.511.299.348.683,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dalam RKPD Tahun 2025 sebanyak 353 program atau 82,48% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.826.160.786.689,00 atau 58,76 % dari total RKPD Tahun 2025. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dari sebanyak 421 program dengan anggaran sebesar Rp. 5.032.571.562.690,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah kabupaten Garut sebanyak 346 program atau 82,19% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.398.463.168.534,00 atau 47,66% dari total APBD Tahun Anggaran 2025 dan sudah direalisasikan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 289.048.387.886,00 atau 12,05%. Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	7	25.213.000.000	7	7.131.000.000	1.431.519.560
2	Reformasi kualitas sistem pendidikan, transformasi sistem kesehatan, keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	23	1.207.007.936.520	23	983.291.717.249	15.730.562.726

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
3	Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	12	76.568.975.321	11	73.134.962.774	13.280.894.543
4	Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	45	278.854.362.752	41	106.855.050.722	3.622.744.034
5	Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	26	1.276.918.946.972	26	241.632.144.192	16.359.362.270
6	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	6	16.472.849.500	5	19.744.090.845	661.292.726
7	Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	234	945.124.715.624	233	966.674.202.752	237.962.012.027
	Penunjang	75	2.685.138.561.994	75	2.634.108.394.156	498.666.180.741
	JUMLAH	428	6.511.299.348.683	421	5.032.571.562.690	787.714.568.627

Sumber: RKPD Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2025 Triwulan I (diolah)

Dari sebanyak 428 program dalam RKPD tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.511.299.348.683,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2025 sebanyak 353 program atau 82,48% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.826.160.786.689,00 atau 58,76 % dari total RKPD Tahun 2025. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dari sebanyak 421 program dengan anggaran sebesar Rp. 5.032.571.562.690,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah kabupaten Garut sebanyak 346 program atau 82,19% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.398.463.168.534,00 atau 47,66% dari total APBD Tahun Anggaran 2025 dan sudah direalisasikan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 289.048.387.886,00 atau 12,05%. Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	44	287.520.822.872	39	107.169.553.904	3.574.875.644
2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	233	925.832.132.607	231	750.491.311.867	26.833.723.791
3	Penguatan sistem kesehatan daerah	7	438.326.206.271	7	365.993.844.999	9.515.089.336

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
4	Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	17	54.669.179.366	17	38.391.615.896	4.801.998.869
5	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	28	1.290.612.722.972	28	254.288.920.192	17.170.829.282
6	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	24	829.199.722.601	24	882.127.921.676	227.151.870.964
	Penunjang	75	2.685.138.561.994	75	2.634.108.394.156	498.666.180.741
	JUMLAH	428	6.511.299.348.683	421	5.032.571.562.690	787.714.568.627

Sumber : Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD 2025.

Dari sebanyak 428 program dalam RKPD tahun 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.511.299.348.683,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan Nasional dalam RKPD Tahun 2025 sebanyak 353 program atau 82,48% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.826.160.786.689,00 atau 58,76 % dari total RKPD Tahun 2025. Sementara itu, penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dari sebanyak 421 program dengan anggaran sebesar Rp. 5.032.571.562.690,00 yang mendukung langsung terhadap prioritas pembangunan daerah kabupaten Garut sebanyak 346 program atau 82,19% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.398.463.168.534,00 atau 47,66% dari total APBD Tahun Anggaran 2025 dan sudah direalisasikan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 289.048.387.886,00 atau 12,05%. Ringkasan dukungan program dan anggaran rencana pembangunan daerah kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Dukungan Program dan Anggaran Rencana Pembangunan Kabupaten Garut terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	980.724.900	1	664.074.750	38.974.300
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	13	27.354.625.234	13	24.513.093.090	2.386.590.061
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	37	1.306.881.283.681	35	228.709.291.191	14.028.214.534
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	35	1.247.104.803.667	35	1.002.863.116.791	18.533.643.390
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	11	29.462.365.764	10	8.950.822.780	435.154.797
6.	Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	15	135.236.352.000	12	94.242.041.542	1.835.104.682

NO	PRIORITAS NASIONAL	RKPD TAHUN 2025		APBD TAHUN 2025		
		Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	224	922.969.437.522	223	962.230.552.077	236.802.603.674
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	17	156.171.193.921	17	76.290.176.313	14.988.102.448
	Penunjang	75	2.685.138.561.994	75	2.634.108.394.156	498.666.180.741
	JUMLAH	428	6.511.299.348.683	421	5.032.571.562.690	787.714.568.627

Sumber: RKPD Tahun 2025 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2025 Triwulan I (diolah)

2.2.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, dipengaruhi oleh perkembangan keadaan dan kebijakan nasional maupun Provinsi yang terbit semenjak RKPD Tahun 2025 ditetapkan, diantaranya:

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Intruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Instruksi Bupati Garut Nomor 900.1.3.3/1092/BPKAD Tentang Langkah Langkah Efisiensi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Perubahan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti dan menjadi perhatian, terutama kebijakan dalam hal belanja transfer pemerintah perlu ditindak lanjuti secara cermat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat bergantung pada penyelesaian penyesuaian regulasi yang disebabkan oleh perubahan regulasi di tingkat pusat. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah perubahan penjabaran APBD yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang terbit setelah penetapan RKPD maupun penetapan APBD. Hal itu menjadi salah satu muatan materi untuk perubahan RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya, berkenaan dengan tantangan ruang fiskal yang terbatas, maka dalam hal pengalokasian anggaran belanja perlu terus didorong pada peningkatan kualitas belanja program-program prioritas, sehingga alokasi belanja bisa mendorong pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan serta berdampak terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makro Ekonomi lainnya.

Tantangan berikutnya adalah diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi faktor penting untuk mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan infrastruktur konektivitas akan dapat menghubungkan antar titik pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan *trikcle down effect* (kegiatan ekonomi yang besar akan memberikan efek kepada kegiatan ekonomi yang lebih kecil dan juga daerah penyangga di sekitarnya). Melalui langkah percepatan pembangunan infrastruktur, maka diharapkan hasil pembangunan akan lebih dapat dirasakan, merata, memperkecil ketimpangan pendapatan, dan turut membantu pemutusan mata rantai kemiskinan.

Selanjutnya, berkenaan dengan tantangan ruang fiskal yang terbatas, maka dalam hal pengalokasian anggaran belanja perlu terus didorong pada peningkatan kualitas belanja program-program prioritas.

Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, dengan kendala umum yang dihadapi sebagai berikut:

1. Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja;
2. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah yang terlambat dilaporkan ke Bappeda sehingga memperlambat pelaporan kepada Provinsi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025, sampai dengan triwulan I, antara lain:

- Program RKPD yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD, dengan rincian 7 program sebagai berikut:
    1. Program penetapan tanah ulayat
    2. Program pengendalian izin usaha industri
    3. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
    4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)
    5. Program perizinan usaha pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)
    6. Program penyuluhan pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)
    7. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Cigedug)
- Proses pengadaan barang dan jasa baru mencapai 52% per Juni 2025;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan I Tahun Anggaran 2025 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi

RKPD Tahun 2025, sampai dengan triwulan I, antara lain:

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kenerja yang terukur;
- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;

Berdasarkan Perubahan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, total bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Garut yaitu sebesar Rp 38.233.907.703 dengan biaya pendukung alokasi dari BTT Rp 297.175.000 dengan rincian sebagai berikut:

1) Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp 30.715.433.280 (Dinas Kesehatan)
2) Penanganan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kantung Kemiskinan sebesar Rp 7.307.274.423 (Dinas Perumahan dan Permukiman)
3) Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil sebesar Rp 211.200.000 (Dinas Pendidikan)

Adapun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Garut belum melakukan input atau belum mengajukan bantuan keuangan kepada Provinsi Jawa Barat.

2.2.6. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan RKPD Berikutnya

Dari evaluasi hasil RKPD tersebut, tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/ kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;

- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Tahun 2025, kebijakan pembangunan ekonomi dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024, Awal Tahun 2025 dan Prediksi Tahun 2026

Secara keseluruhan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan berada pada kisaran 4,7% -- 5,5% (yoy) dan meningkat pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan tetap tinggi dan berada pada kisaran 4,6% -- 5,4% (yoy). Dengan penyelenggaraan berbagai langkah strategis yang dituangkan dalam berbagai *strategic event* dengan kolaborasi dan sinergitas antar komponen *pentahelix* secara konsiten maka optimisme perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 diprakirakan akan berada pada kisaran 4,7% -- 5,5% (yoy). Inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2024 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1%, mendekati nilai tengah. Inflasi tahun 2024 diprakirakan masih didorong oleh kenaikan harga pangan. inflasi pada tahun 2025 diprakirakan tetap pada target sasaran 2,5±1%, meski diprakirakan relatif lebih tinggi dari tahun 2024. Dinamika ketidakpastian global dan tensi geopolitik masih akan mewarnai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 karena berpotensi memengaruhi perilaku investor asing. Oleh karena itu, sinergitas komponen *pentahelix* diperlukan

guna menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sampai tahun 2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan sebesar Rp 6,59 Triliun atau 9,13% dari Rp 72,23 Triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 78,825 Triliun pada tahun 2024. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.1
PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.037,47	22.720,77	24.894,24	26.230,19	28.374,25
B	Pertambangan dan Penggalian	687,49	740,60	805,86	727,73	745,24
C	Industri Pengolahan	4.740,87	5.165,75	5.711,72	6.469,18	7.444,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,24	38,96	40,85	43,18	44,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,98	37,53	39,07	40,56	45,98
F	Konstruksi	3.445,76	3.867,07	4.178,87	4.685,37	5.036,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.740,47	11.279,18	12.290,10	13.394,55	14.521,69
H	Transportasi dan Pergudangan	2.191,80	2.241,00	2.626,73	3.139,99	3.650,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.194,97	2.267,66	2.761,80	3.196,55	3.387,20
J	Informasi dan Komunikasi	1.447,37	1.546,59	1.635,13	1.767,67	1.935,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.782,44	1.923,49	2.038,43	2.180,57	2.346,35
L	Real Estat	979,08	1.079,17	1.162,12	1.257,71	1.363,03
M,N	Jasa Perusahaan	279,39	304,83	350,13	391,47	425,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.892,30	1.885,97	1.875,58	1.949,17	2.071,76

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Jasa Pendidikan	3.278,32	3.407,99	3.538,46	3.800,24	4.086,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409,76	449,56	489,50	542,58	587,43
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.866,46	1.880,29	2.152,03	2.412,49	2.758,54

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD.
*Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010 naik Rp 2,18 Triliun atau 4,95% dari sebesar Rp 44,08 Triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 46,27 Triliun pada tahun 2024. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 3.2
PDRB ADHK Seri 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.483,74	12.934,34	13.507,50	13.722,99	13.879,41
B	Pertambangan dan Penggalian	811,71	822,17	821,39	820,29	810,96
C	Industri Pengolahan	3.367,92	3.567,01	3.791,38	4.096,43	4.483,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,21	25,57	26,50	27,60	28,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,10	23,17	23,82	24,50	26,69
F	Konstruksi	2.470,95	2.639,53	2.691,81	2.921,11	3.090,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.908,33	8.151,74	8.520,78	8.930,76	9.422,42
H	Transportasi dan Pergudangan	1.464,03	1.466,84	1.641,32	1.832,93	2.049,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.525,26	1.529,14	1.789,40	1.974,93	2.042,75
J	Informasi dan Komunikasi	1.482,96	1.590,94	1.687,52	1.823,06	1.997,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.116,36	1.164,75	1.166,99	1.215,06	1.274,22
L	Real Estat	784,84	863,16	901,98	958,48	1.036,64
M, N	Jasa Perusahaan	207,35	225,07	247,53	265,53	274,75

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.165,49	1.155,43	1.151,80	1.179,80	1.255,53
P	Jasa Pendidikan	2.047,08	2.069,35	2.126,60	2.233,53	2.382,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	307,18	330,49	354,46	379,79	399,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.410,94	1.422,50	1.562,18	1.680,43	1.817,09
Produk Domestik Regional Bruto		38.598,43	39.981,19	42.012,96	44.087,22	46.270,92

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD.
*Keterangan: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara*

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Garut didominasi oleh 5 (lima) kategori diantaranya: (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Konstruksi; serta (v) Jasa Pendidikan, sampai dengan tahun 2024, kategori pertanian masih menjadi kategori unggulan (*prime mover*) dalam menggerakkan perekonomian daerah, kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 29,012 Triliun, dengan *share* 36,00% terhadap perekonomian, meskipun dari segi *share* mengalami penurunan. Sedangkan sumbangan nilai tambah pertanian terhadap PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 13,879 Triliun.

Tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Namun demikian, akselerasi kinerja kategori pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan kategori lain (*linkages*) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi kategori pertanian. Potensi lain dalam kategori pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama

dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Di samping pertanian, kategori yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2024 adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 14.521,69 Triliun dengan *share* 18,42%, atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1,127 Triliun. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari kenaikan volume barang/ jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut.

Peranan kategori industri pengolahan yang merupakan kategori andalan di Jawa Barat, kontribusinya untuk PDRB Kabupaten Garut menduduki posisi ketiga dengan *share* mencapai 9,44%, dan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp 7,44 Triliun, relatif meningkat jika dibandingkan posisi tahun 2023 sebesar Rp 6,46 Triliun. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian.

Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2024 PDRB per kapita mengalami pertumbuhan 6,19% dari Rp 26,91 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 29,914 juta pada tahun 2024. PDRB per Kapita ADHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Pendapatan per kapita pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,8% dimana daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 3,67% yang tercermin dari kenaikan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan pengaruh inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan.

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Berlaku	adh Konstan
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,28	15,349	2.604.787	3,90	2,33
2022	25,14	15,991	2.627.220	8,52	3,68
2023	26,91	16,427	2.683.665	6,19	3,58
2024	29,01	17,03	2.716.950	7,80	3,67

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD.

Ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Garut pada 2024 meningkat menjadi sebesar 4,95%, lebih tinggi 0,01% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,94%.

Dilihat dari pertumbuhan masing-masing kategori, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu (i) Transportasi dan Pergudangan (11,79%), (ii) Informasi dan Komunikasi (9,56%); (iii) Industri Pengolahan (9,45%) dan (iv) Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (8,97%) serta Real Estat (8,15%).

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023 [x]	2024 [xx]
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,55	3,61	4,43	1,60	1,14
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,69	1,29	-0,09	-0,13	-1,14
C	Industri Pengolahan	-0,46	5,91	6,29	8,05	9,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,21	10,18	3,62	4,14	3,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,42	9,82	2,82	2,83	8,97
F	Konstruksi	-5,58	6,82	1,98	8,52	5,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,72	3,08	4,53	4,81	5,51
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,19	0,19	11,89	11,67	11,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,05	0,25	17,02	10,37	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	23,15	7,28	6,07	8,03	9,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	4,33	0,19	4,12	4,87
L	Real Estat	-0,15	9,98	4,50	6,26	8,15
M,N	Jasa Perusahaan	-13,45	8,54	9,98	7,27	3,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,74	-0,86	-0,31	2,43	6,42
P	Jasa Pendidikan	4,95	1,09	2,77	5,03	6,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,09	7,59	7,25	7,15	5,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,76	0,82	9,82	7,57	8,13
Produk Domestik Regional Bruto			4,95	3,58	5,08	4,94

Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD.

Sedangkan jika ditinjau dari segi Inflasi, Inflasi Kabupaten Garut merujuk pada capaian Kota Tasikmalaya, pada bulan Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 0,43%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,38 pada November 2024 menjadi 106,84 pada Desember 2024. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2024 sebesar 1,94% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 1,94%. Pada periode 2023-2024, terlihat angka inflasi yang lebih terkendali seiring dengan komitmen dan dukungan kebijakan pengendalian inflasi pusat dan daerah yang antisipatif dan responsif (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Gambar 3.1
Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

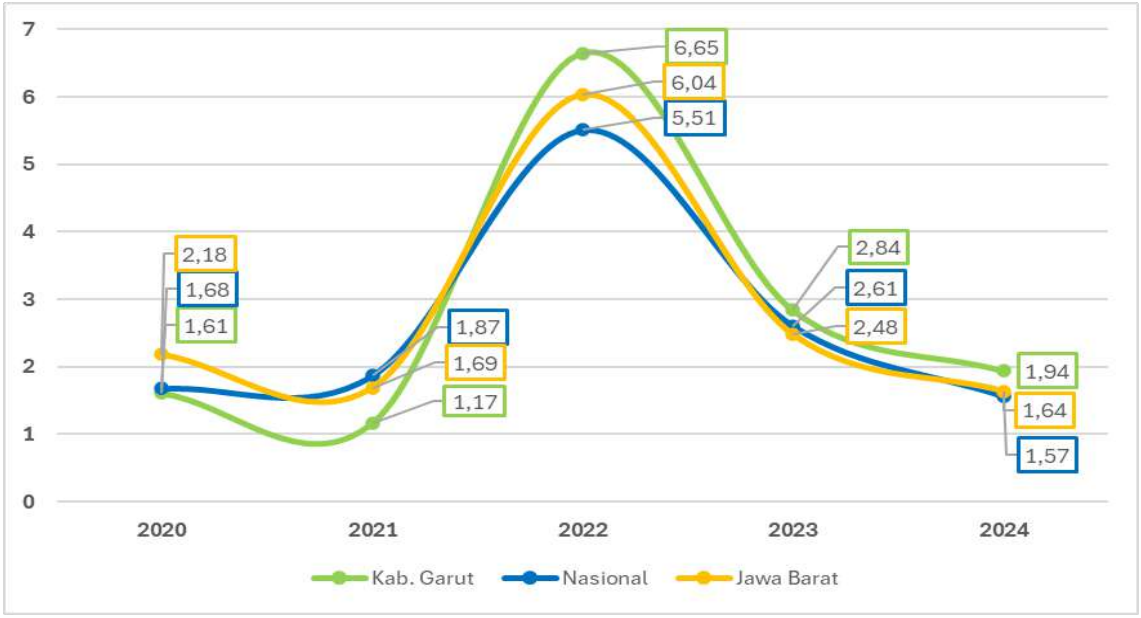

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Di sepanjang Agustus 2023 hingga Desember 2024 (17 periode), Kabupaten Garut mengalami delapan periode peningkatan IPH dan sembilan periode penurunan IPH. Peningkatan IPH tertinggi berada di periode Februari 2024 yaitu sebesar 5,29%, sedangkan penurunan IPH terdalam berada di periode Juli 2024 yaitu sebesar 2,83%. Peningkatan IPH tertinggi diakibatkan adanya peningkatan harga beras pengaruh dari penurunan produksi sebagai imbas dari pergeseran masa panen dampak dari kekeringan berkepanjangan di akhir tahun sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, penurunan IPH terdalam terjadi akibat dari penurunan harga beras (setelah sebelumnya naik) hasil dari intervensi pemerintah dengan penyaluran beras dan masuknya masa panen padi.

Gambar 3.2
Perkembangan IPH Kabupaten Garut Agustus 2023-Desember 2024
Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Tahun 2025

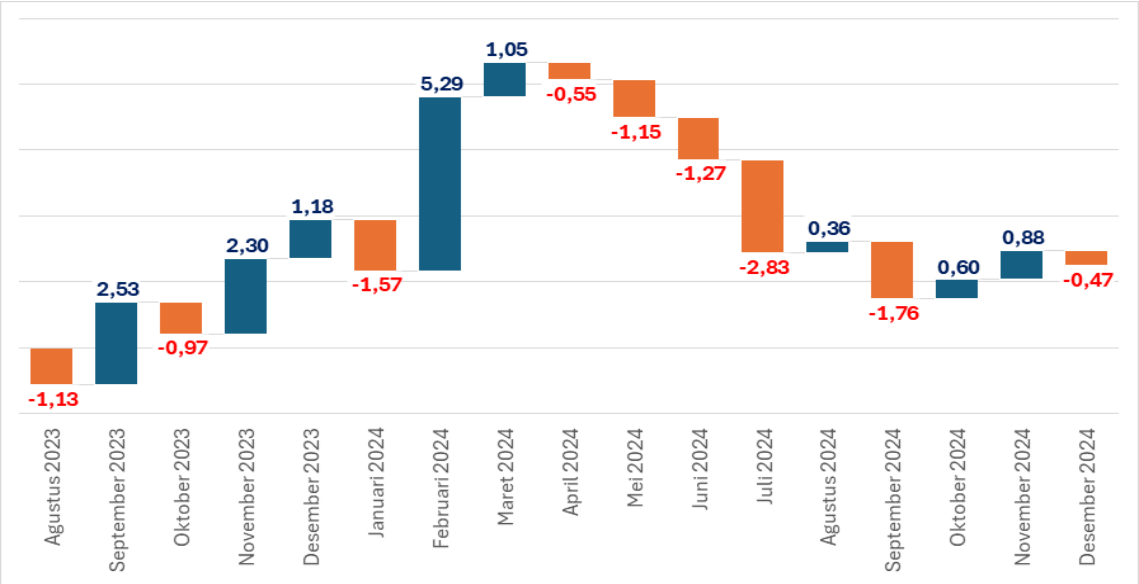

Selain Beras yang menjadi komoditas andil peningkatan IPH tertinggi, IPH Kabupaten Garut selama periode Agustus 2023 hingga Desember 2024 dipengaruhi oleh beberapa komoditas lain. Dari 20 komoditas yang dilakukan perhitungan IPH, hanya 10 komoditas yang memberikan andil perubahan IPH secara signifikan, yaitu: Cabai Merah, Beras, Telur Ayam Ras, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir, Jeruk, dan Minyak Goreng. Komoditas yang sering menjadi andil perubahan IPH adalah cabai merah dengan total 9 kali menjadi top 3 andil perubahan IPH, kemudian beras dan telur ayam ras dengan masing-masing total 8 kali, dilanjutkan dengan cabai rawit dan daging ayam ras dengan total masing-masing 7 kali.

Selain itu, ditinjau dari segi ketenagakerjaan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki trend menurun yang menunjukan adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat, namun berbeda jika dibandingkan dengan jumlah pengganggguran secara riilnya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya dinamika pasar kerja yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan tenaga kerja.

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Uraian Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,96	8,68	7,6	7,33	6,96
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	103.607	104.212	101.135	102.010	100.224
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	91,04	91,32	92,40	92,67	93,04
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,11	62,76	68,84	70,10	71,34
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.892.059	1.912.716	1.785.309	1.985.377	2.016.514
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.156.180	1.200.346	1.330.355	1.391.755	1.438.490
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.052.573	1.096.134	1.229.218	1.289.745	1.338.382
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	735.879	712.370	602.126	593.622	578.024

Sumber: BPS Kab. Garut, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kemudian salah satu pendekatan untuk melihat produktifitas tenaga kerja yang ada pada masing-masing sektor, dapat didekati dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan total Tenaga Kerja pada masing-masing sektor sehingga akan didapat produktifitas nilai rupiah per tenaga kerja. Jika dibandingkan pada awal dan akhir periode, seluruh sektor mengalami penurunan PDRB/Tenaga Kerja. Hal ini disebabkan karena penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor belum disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Jika dibandingkan antar sektor, sektor pertanian merupakan sektor yang paling produktif diantara sektor lainnya.

Gambar 3.3 PDRB per Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Utama Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

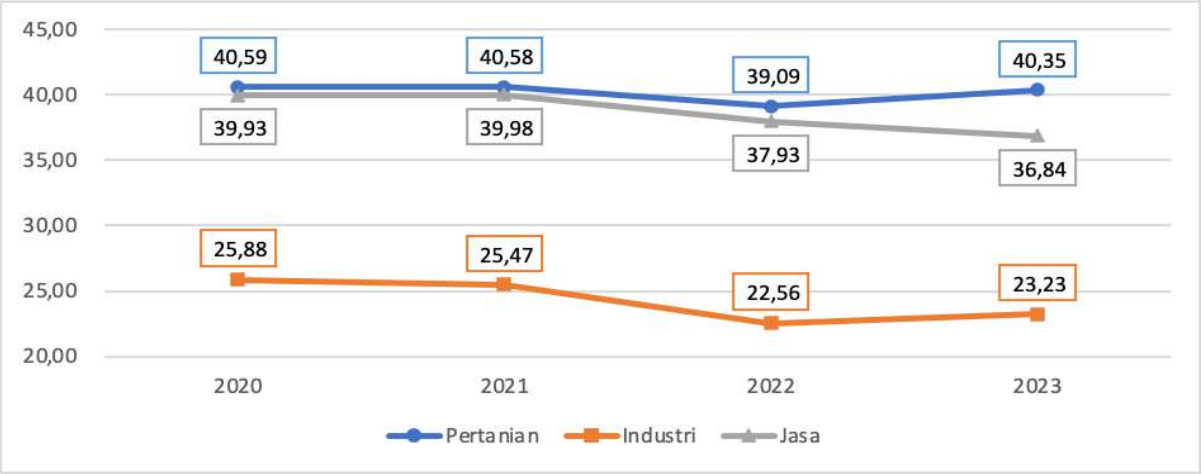

Sumber: BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2025

Penduduk bekerja di Kabupaten Garut didominasi oleh pekerja yang bekerja pada sektor informal dari pada sektor formal. Selama 5 tahun terakhir terjadi dinamika penduduk bekerja pada kedua sektor, namun terjadi peningkatan kontribusi sektor formal pada akhir periode hingga mencapai 27,87% sedangkan sektor informal mencapai 72,13%. Besarnya kontribusi pekerjaan sektor informal dapat menjadi indikasi bahwa lapangan pekerjaan yang ada memiliki upah yang rendah serta belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Secara lengkap kontribusi masing-masing sektor pekerjaan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.4 Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

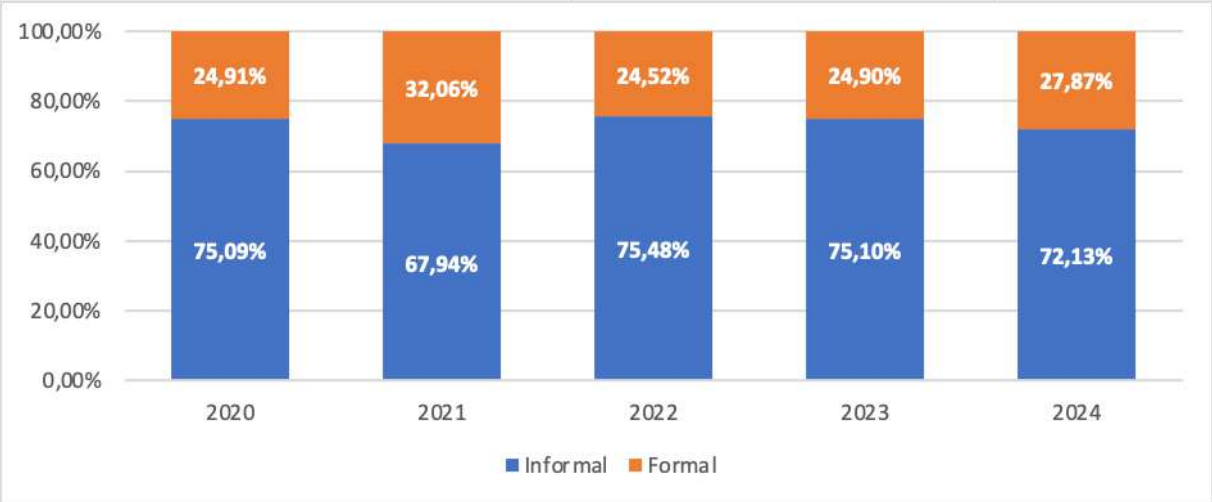

Sumber: BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2025

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja perlu dilaksanakan secara komprehensif dari mulai tahap *pre-employment, during employment dan post employment*. Pada tahap *pre-employment* dimana para pencari kerja dapat disiapkan melalui peningkatan kompetensi atau *upskilling* dan

reskilling serta sertifikasi kompetensi, disertai dengan dukungan pendaataan pencari maupun pemberi kerja serta platform digital yang memungkinkan bertemunya pencari kerja dengan pemberi kerja hingga akhirnya ditempatkan. Kemudian pada tahap *during employment* perlu adanya penjaminan bagi upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pengawasan kerja. Terakhir pada tahap *post employment* yang menyangkut jaminan pesangon, pensiun, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan dan tunjangan kematian yang juga perlu dijamin bagi pekerja.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat.

3.1.2.1. Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian global relatif masih stabil, namun pertumbuhan ekonomi tidak merata dan dihadapkan pada tantangan global yaitu risiko inflasi dan gejolak geopolitik. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 2,8% dan 3%. Kondisi perekonomian global utamanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian kondisi geopolitik karena adanya konflik, perselisihan perdagangan atau perubahan dalam dinamika politik internasional, fluktuasi nilai mata uang yang memiliki dampak terhadap daya saing ekspor dan impor, dan perubahan harga komoditas global terutama pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5% di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Adapun tantangan yang masih dihadapi, di antaranya:

(1) Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir

(2) Kualitas SDM Indonesia masih relatif rendah, terlihat dari data Indeks Modal Manusia sebesar 0,54 sedangkan Singapura pada level 0,88 dan skor PISA untuk sains, matematika dan membaca atau literasi per tahun 2022 juga masih relatif rendah (peringkat 485, 472 dan 476). Dari segi Kesehatan, angka prevalensi stunting masih tinggi (21,5%), Angka Kematian Ibu juga masih tinggi (189 per 100.000 kelahiran) dan angka kematian akibat TBC sebanyak 125.000 per tahun.

(3) Capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota masih relatif rendah dibandingkan Kementerian/Lembaga (Kabupaten /Kota 3,27, Provinsi 3,88 sedangkan Kementrian/Lembaga 4,00)

(4) Ketimpangan masih relatif tinggi baik pembangunan antar wilayah (Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia) maupun ketimpangan pendapatan (Rasio gini 0,379 per tahun 2024)

Dengan demikian, Pemerintah perlu menitikberatkan pada upaya menjawab tantangan sekaligus menentukan langkah perbaikan pada pencapaian pembangunan yang masih memerlukan perhatian atau belum dapat memenuhi target yang diharapkan.

3.1.2.2. Tantangan Perekonomian Regional Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat yaitu belum meratanya investasi karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategorikan memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota. Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat. Perubahan iklim juga membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis *high tech*;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM, serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara sektoral, tantangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
   a. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada seluruh sektor perizinan;

b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;

c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan

d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tantangan pada sektor industri:

a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;

b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;

c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;

d. Substitusi bahan baku impor;

e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan

f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.

3. Tantangan pada sektor UMKM:

a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan

b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

4. Tantangan pada sektor pariwisata:

a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;

b. Pengembangan desa wisata;

c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan

d. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE); dan

e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

5. Tantangan pada sektor perdagangan:

a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;

b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;

c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;

d. *Market intelligence* untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;

e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya terjaga.

6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan
   a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
   b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
   c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan;
   d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan
   e. Peningkatan produksi pertanian potensi ekspor
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
   a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
   b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
   c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
   e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi 2024	Target 2025
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	n/a	0,55
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,95	4,96 – 5,37
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,75	6,42 – 6,99
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,08	5,85 – 6,46
5	Indeks Gini (Poin)	0,428	0,383 – 0,390
6	Penurunan Emisi GRK	n/a	6,61

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kesepakatan Rakortekbang 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa untuk mendukung kemandirian masyarakat Jawa Barat, diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas

dan memperluas cakupan, khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal mendapatkan pelayanan dan memiliki nilai strategis tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat.

3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Garut

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global yang berubah cepat dan ketidakpastian yang meningkat perlu tepat dicermati, kondisi perekonomian nasional dan regional diperkirakan membaik. Inflasi Provinsi Jawa Barat *y-to-y* Mei 2025 sebesar 1,47%, adapun pergerakan inflasi secara *month-to-month* (*m-o-m*) menunjukan adanya deflasi sebesar 0,32% per Mei 2025. Penyebab deflasi ini dari harga pangan yang turun, seperti: cabai rawit (-0,12%), bawang merah (0,10%), dan daging ayam ras (-0,04%). Sedangkan dari kelompok pengeluaran, makanan & minuman mengalami deflasi cukup dalam (-1,14%) begitu pula dengan transportasi (-0,25%).

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian nasional dan regional Jawa Barat, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2025 diproyeksikan dapat tumbuh 5,06% yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang menguat. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi, dan industri pengolahan.

Disisi lain, perekonomian Kabupaten Garut masih dihadapkan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut masih berada pada posisi 2 (dua) terbawah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, meskipun demikian laju pertumbuhan IPM Kabupaten Garut menunjukan tren yang sangat baik, pada tahun 2024 IPM Kabupaten Garut berada pada nilai 69,91 Poin. Selain itu, pengangguran masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Garut, berada pada nilai 6,96% atau 100.224 Jiwa, disisi lain Garut memiliki potensi UMKM yang menjadi salah satu unggulan dalam perekonomian daerah, meski demikian kualitas UMKM perlu ditingkatkan diantaranya melalui pelatihan, akses permodalan serta digitalisasi.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berdampak pada peningkatan IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Peningkatan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh membaiknya konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya pendapatan dan daya beli. Dari sisi kesehatan, peningkatan kapasitas maupun kualitas pada sektor kesehatan publik terutama yang berfokus pada penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga turut menunjang pencapaian target IPM. Pada dimensi pengetahuan, dukungan anggaran terhadap bidang pendidikan untuk peningkatan akses

pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta berbagai bantuan sosial untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat untuk pendidikan, diharapkan juga dapat mendukung tercapainya target IPM pada tahun 2025 sebesar 70,57 poin.

Adanya pemulihan pada sektor ekonomi diperkirakan berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2025. Dengan berbagai intervensi program perlindungan sosial yang digulirkan baik pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang pensasarannya dimutakhirkan dengan adanya *update* Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penambahan berbagai subsidi, diharapkan persentase penduduk miskin dapat ditekan pada kisaran 8,20 - 9,06% pada tahun 2025.

Adanya prospek membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan akan mendorong masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menurunkan pengangguran. Menurunnya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,48 - 7,19%.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target 2024 berdasarkan Perubahan RPJMD	Keterangan	Target 2025 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,91	69,7 - 70,68	Tidak Tercapai	70,57
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,87 - 5,57	Tidak Tercapai	5,06
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,68	6,92 - 7,03	Tidak Tercapai	8,20 - 9,06
4	Pendapatan Per Kapita (ADHB) (Juta Rp)	29,01	25,43 - 25,61	Tercapai	28,63 - 28,99
5	Persentase Pengangguran Terbuka (%)	6,96	6,41 - 6,61	Tidak Tercapai	6,48 - 7,19
6	Indeks Gini (poin)	0,324	0,35 - 0,36	Tercapai	0,355 - 0,362

No	Indikator Makro	Realisasi 2024	Target 2024 berdasarkan Perubahan RPJMD	Keterangan	Target 2025 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	n/a	n/a	-	4,76
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah (poin)	62,37	63,21	Tidak Tercapai	68,12

Sumber: Target Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, realisasi data BPS Kab. Garut

Adapun evaluasi kinerja perekonomian Kabupaten Garut sampai bulan Juni Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga di triwulan ke-1 tahun 2025 terlihat bahwa terdapat dua bulan periode peningkatan IPH dan satu bulan periode penurunan IPH, yang secara jumlah maka dapat terlihat di triwulan ke-1 tahun 2025, harga komoditas IPH meningkat sebesar 3,18% dibandingkan akhir tahun 2024. Peningkatan dan penurunan IPH didominasi oleh komoditas Cabai Rawit, dimana di dua bulan periode peningkatan IPH, Cabai Rawit menjadi komoditas andil peningkatan IPH tertinggi. Sedangkan ketika terjadi penurunan IPH di bulan Februari, penurunan harga Cabai Rawit menjadi andil utama penurunan IPH.

Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Triwulan I Tahun 2025

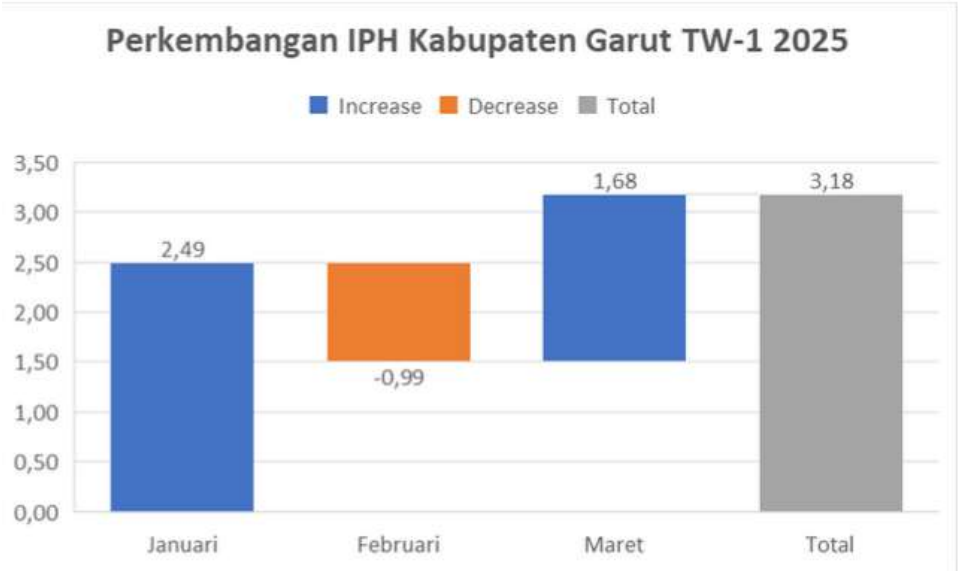

Sumber: diolah Bappeda Tahun 2025

Komoditas andil peningkatan IPH lainnya adalah Cabai Merah dan Telur Ayam Ras di periode bulan Januari, sedangkan Bawang Merah dan Minyak goreng di periode bulan Maret. Komoditas andil penurunan IPH lainnya di bulan Februari adalah Cabai merah dan Daging Ayam Ras. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian atas anjloknya harga daging ayam ras, pertama pemberian layanan administratif dalam bentuk kuota impor ayam GPS (*Grand Parent Stock*) dimana hal tersebut turut menambah pasokan ayam di dalam negeri selain itu yang kedua yaitu lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian produksi oleh pemerintah.

Adapun untuk nilai inflasi, Kabupaten Garut mengacu pada inflasi Kota Tasikmalaya dimana pada Juni 2025 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,99 pada Mei 2025 menjadi 108,12 pada Juni 2025. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2025 sebesar 1,20 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2025 terhadap Juni 2024) sebesar 1,75 persen.

b. Realisasi investasi Kabupaten Garut Triwulan I Tahun 2025

Total seluruh investasi yang tercatat adalah sebesar Rp716.140.783.400,00. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sektor tersier menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp533.332.128.410,00, atau lebih dari 74% dari total investasi. Dominasi sektor ini menunjukkan fokus pembangunan pada layanan jasa, infrastruktur, serta perdagangan dan perumahan. Sementara itu, sektor primer mencatatkan investasi sebesar Rp80.688.558.764,00. Meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan sektor lainnya, sektor ini tetap menunjukkan potensi besar, terutama di bidang peternakan dan tanaman pangan & perkebunan, yang menjadi tulang punggung agribisnis dan ketahanan pangan. Sektor sekunder memperoleh investasi sebesar Rp102.120.096.226,00, menunjukkan adanya pengembangan di bidang industri pengolahan. Namun, beberapa sub-sektor penting seperti industri karet, logam, dan elektronika belum menerima alokasi investasi, yang dapat menjadi peluang strategis bagi pengembangan ekonomi ke depan.

c. Perkembangan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Garut Hingga Triwulan I Tahun 2025

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kemiskinan yang melibatkan berbagai perangkat daerah dalam pelaksanaannya serta mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adapun rekapitulasi realisasi penanganan kemiskinan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem

No	Strategi Penanganan Kemiskinan	Anggaran RKPD Perubahan (Rp)	Anggaran APBD (Rp)	Anggaran APBD Parsial 2
1	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	191.792.549.900	175.157.873.772	191.792.549.900
		3,84 %	3,51 %	3,84 %
2	Mengurangi Beban Pengeluaran	706.925.050.551	675.789.513.786	706.925.050.551
		14,16 %	13,54 %	14,16 %
3	Meningkatkan Pendapatan	11.694.508.502	10.922.033.848	11.694.508.502
		0,23 %	0,22 %	0,23 %
Jumlah Alokasi Anggaran untuk penanganan Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim		910.412.108.953	861.869.421.406	910.412.108.953
		18,23 %	17,26 %	18,23 %

Sumber: Hasil pengolahan data RKPD 2025 dan APBD 2025 pada SIPD RI

d. Perkembangan Penanganan Pengangguran di Kabupaten Garut Hingga Triwulan I Tahun 2025

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi pengangguran meliputi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, mediasi perselisihan hubungan industrial, pendataan pencari kerja, pembinaan sarana hubungan industrial ke perusahaan, dan lembaga kerja sama tripartit kabupaten, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja. Dari perspektif sektor informal kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penanganan pengangguran yakni program Jawara (Juara Wirausaha Desa), WiraHebat, pelatihan vokasional produk usaha mikro sektor makanan & minuman, pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, fasilitasi bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki risiko sosial, fasilitasi kemitraan usaha mikro, hilirisasi koperasi dan pendidikan perkoperasian. berikut merupakan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penanganan pengangguran. Adapun rekapitulasi realisasi penanganan pengangguran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Kegiatan Penanganan Pengangguran Hingga Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
1.	Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri	1.071 Orang	3.197 Orang	82.760.570	4.249.860

No	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
2.	Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	63 Orang	160 Orang	33.403.150	10.125.000
3.	Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	12 Kasus	7 Kasus	63.436290	6.548.000
4.	Pendataan Pencari Kerja	2.500 Orang	3.220 Orang	74.473.829	26.632.230
5.	Pembinaan Sarana Hubungan Industrial ke Perusahaan	12 Perusahaan	9 Perusahaan	138.883.550	42.354.000
6.	Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten	1 Lembaga	1 Lembaga	46.431.800	14.853.000
7.	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	304 Orang	0	1.125.716.696	0
8.	Pembinaan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	20 Perusahaan	0	50.000.000	1.400.000
9.	Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	32 Orang	0	30.816.400	0
10	Pembinaan Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	60 LPK	15 LPK	50.000.000	6.000.000
Dinas Koperasi dan UKM					
1.	Jawara (Juara Wirausaha Desa)	300 Usaha Mikro	90 Usaha Mikro	249.335.480	74.237.400
2.	Wirahebat	98 Usaha Mikro	0 Usaha Mikro	600.000.000	0
3.	Pelatihan Vokasional Produk Usaha Mikro Sektor Makanan & Minuman	60 Usaha Mikro	60 Usaha Mikro	35.864.500	35.864.500

No	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
4.	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Pemula	200 Usaha Mikro	0 Usaha Mikro	228.084.800	0
5.	Fasilitasi Bantuan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang memiliki Risiko Sosial	1000 Usaha Mikro	0 Usaha Mikro	3.872.700.000	0
6.	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10 Usaha Mikro	0 Usaha Mikro	50.000.000	0
7.	Hilirisasi Koperasi	60 anggota koperasi	0	22.859.700	0
8.	Pendidikan Perkoperasian	90 Siswa	0	25.958.700	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikelola dalam SIPD 2025.

e. Perkembangan Penanganan Infrastruktur Jalan yang Didanai oleh Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor: 02/KU.03.02.01/BAPENDA tentang Penggunaan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, maka pemerintah Kabupaten Garut sudah mengalokasikan pendapatan Opsen PKB untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Kegiatan Penanganan Infrastruktur Jalan yang Didanai oleh Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

No	Penanganan Infrastruktur Jalan (Lokasi)	Dimensi		Anggaran
		Panjang (km)	Lebar (m)	
1	Rekonstruksi Jalan Pendekat Jembatan Cibera Kec. Cibalong	0.4	4	397,120,000.00
2	Rehabilitasi Ruas Jalan Cibangban – Tanjungpura - Bojonglarang	4.45	3	2,738,975,000.00
3	Rehabilitasi Ruas Jalan Cisompet - Cisanggiri	2.4	3.5	1,816,800,000.00

No	Penanganan Infrastruktur Jalan (Lokasi)	Dimensi		Anggaran
		Panjang (km)	Lebar (m)	
4	Rehabilitasi Jalan Terusan Pahlawan Kec. Tarogong Kidul	1.8	4	1,469,340,000.00
5	Rehabilitasi Ruas Jalan Simpangsari - Cisurupan Kec. Cisurupan	2.38	3	1,551,300,499.00
	Jumlah	11.43		7,576,415,499.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dikelola dalam SIPD 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
b. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
c. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; pendanaan melalui APBD Provinsi, kolaborasi APBD kabupaten/kota; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Kebijakan nasional yang signifikan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025 yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna

menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
    a. Pajak Daerah
    b. Retribusi Daerah
    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    d. Lain-lain PAD yang Sah
2) Pendapatan Transfer yang meliputi :
    a. Transfer Pemerintah Pusat
    b. Transfer antar Daerah
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
    a. Hibah
    b. Dana Darurat dan/ atau
    c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan daerah Kabupaten Garut mengalami perubahan yang bersumber dari Dana Transfer sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui ketentuan yang diatur sebagai berikut:

1. Penambahan Pendapatan Daerah bersumber dari DAK Nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Pengurangan Pendapatan Daerah dari Dana Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Perubahan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;

Adapun Belanja Daerah mengalami perubahan yang signifikan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat, alokasi belanja karena penambahan pendapatan dari DAK dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat serta menyesuaikan belanja berdasarkan kejadian Bencana Alam melalui ketentuan yang diatur sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Bupati Garut Nomor 900.1.3.3/1092/BPKAD Tahun 2025 tentang Langkah-langkah Efisiensi Belanja SKPD;
2. Penyesuaian pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.1/814/Keuda tanggal 25 Februari 2025;
3. Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Surat Kepala Dinas PUPR Nomor 900.1.3/508/PUPR tanggal 4 Maret 2025 hal Permohonan Anggaran Penanganan Infrastruktur Terdampak Bencana Hidrometeorologi serta Surat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Nomor 900/134/Disperkim tanggal 18 Maret 2025 hal Permohonan Anggaran Melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

4. Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Perubahan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Jika ditinjau dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perubahan RKPD 2025, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 4,07% atau sebesar Rp 190.456.654.792,- dibandingkan dengan pagu RKPD Tahun2025. Adapun untuk komponen belanja mengalami kenaikan sebesar 5,88% atau sebesar Rp 277.339.078.546,- dibandingkan dengan pagu RKPD Tahun 2025. Meskipun demikian komponen belanja telah disesuaikan dengan mengurangi biaya operasional pemerintahan diantaranya untuk membiayai perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan lain-lain salah satunya berupa penyesuaian alokasi bantuan keuangan provinsi. Adapun uraian pendapatan hingga pembiayaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, RKPD 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	4.678.540.534.348	4.908.754.980.437,00	4.868.997.189.140,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	903.127.173.922	700.671.796.147,00	700.671.796.147,00
4.1.01	Pajak Daerah	542.600.000.000	314.495.819.085,00	314.495.819.085,00
4.1.02	Retribusi Daerah	230.946.140.560	371.046.512.196,00	371.046.512.196,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.515.950.023	7.336.469.580,00	7.336.469.580,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.065.083.339	7.792.995.286,00	7.792.995.286,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.775.413.360.426	4.200.891.781.694,00	4.161.133.990.397,00

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.579.962.319.255	3.974.857.960.000,00	3.896.866.261.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.451.041.171	226.033.821.694,00	264.267.729.397,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	7.191.402.596,00	7.191.402.596,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	7.191.402.596,00	7.191.402.596,00
5	BELANJA DAERAH	4.718.540.534.348	5.032.571.562.691,00	4.995.879.612.894,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.545.045.027.684	3.850.661.202.359,98	3.875.430.311.739,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.092.741.599.009	2.322.042.403.008,00	2.314.511.203.799,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.402.687.542	1.101.661.288.008,98	1.114.274.226.723,00
5.1.04	Belanja Subsidi	-	66.000.000,00	114.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	473.841.664.569	411.828.511.343,00	424.199.881.217,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.059.076.564	15.063.000.000,00	22.331.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	366.563.672.077	349.055.256.005,02	307.264.081.529,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	9.319.617.600,00	9.341.220.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	111.678.311.713,00	103.893.562.367,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	122.369.446.643,02	121.356.457.739,00

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	84.741.075.083,00	56.637.747.014,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	18.886.717.566,00	13.943.089.909,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	2.060.087.400,00	2.092.003.900,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	58.808.954.335,00	39.139.069.635,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	58.808.954.335,00	39.139.069.635,00
5.4	BELANJA TRANSFER	781.931.834.588	774.046.149.991,00	770.980.308.491,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	85.090.075.462	33.358.426.093,00	33.358.426.093,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	696.841.759.126	740.687.723.898,00	737.621.882.398,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	40.000.000.000	123.816.582.254,00	123.816.582.254,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	130.816.582.254,00	130.816.582.254,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	130.816.582.254,00	130.816.582.254,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Garut, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Adanya perubahan regulasi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerbitan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan di tingkat daerah tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2023 maupun 2024. Beberapa penyesuaian yang dilakukan selama tahun 2022 atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diantaranya:

1. Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2022 - Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
2. Penetapan Perbup Nomor 13 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Masa Transisi;
3. Penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan;
4. Penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
5. Penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.63-Hukham/2017, ditetapkan pula Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Arah kebijakan dari stretegi meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi
b. Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
c. Menyusun *roadmap* peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
d. Menguatkan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

Adapun strategi yang akan dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi:
   a) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak
   b) Perluasan basis pajak
2. Optimalisasi pemanfaatan potensi PAD daerah:
   a) Analisis potensi pajak per sektor ekonomi dan wilayah

b) Penerapan nilai jual objek pajak (NJOP) berbasis zonasi/ZNT

3. Inovasi layanan dan kemudahan pembayaran pajak:
   a) Kanal pembayaran digital (QRIS, *marketplace*, *mobile banking*)
   b) Insentif pajak untuk peningkatan kepatuhan
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak:
   a) Kemitraan dengan desa, kecamatan, dan pihak ketiga (ritel, perhotelan, perbankan)
   b) Integrasi data lintas perangkat daerah dan instansi vertikal
5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pendapatan:
   a) *Monitoring* dan evaluasi realisasi pendapatan berbasis kinerja
   b) Audit internal terhadap piutang dan pelaporan penerimaan

Strategi-strategi tersebut bersesuaian dengan program pada Agenda Transformasi Garut Hebat terkait peningkatan pendapatan daerah yaitu Hebat Pemerintahannya meliputi "Memberlakukan insentif pajak dan retribusi" dan "Optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi".

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025-2029, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD pada perubahan RKPD tahun 2025 untuk mendanai program prioritas tahun 2025 yang disesuaikan juga dengan prioritas berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut. Penggunaan belanja daerah juga disesuaikan untuk menindaklanjuti perubahan Pendapatan Tahun 2025. Efisiensi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dilakukan utamanya terhadap belanja:

a. *studi banding*, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*, dengan melakukan efisiensi sebesar 5% (lima persen);
b. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
c. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah Tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional, dengan melakukan efisiensi sebesar 10% (sepuluh persen);

d. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, dengan melakukan efisiensi sebesar 5% (lima persen);
e. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar unit kerja atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya; dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dialihkan untuk digunakan:

a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;
c. infrastruktur dan sanitasi;
d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
b. stabilitas harga makanan dan minuman;
c. Penyediaan cadangan pangan dan;
d. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun untuk kebijakan terkait upaya mengendalikan Belanja Pegawai, pemerintah daerah mengacu pada arahan pemerintah pusat sesuai dengan Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 bahwa pemerintah diwajibkan menyelesaikan proses penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Mulai 1 Januari 2025, instansi pemerintah tidak diizinkan lagi untuk mengangkat tenaga non-ASN atau honorer baru. Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal daerah serta mendorong efisiensi dan produktivitas belanja rutin, belanja pegawai harus diupayakan untuk tetap stabil dengan mengimplementasikan skema *zero growth*.

Pada tanggal 15 April 2025, pemerintah daerah menyelenggarakan pelantikan CASN sebanyak 1.727 orang dengan rincian 156 orang CPNS (143 tenaga teknis dan 13 tenaga kesehatan) dan 1.571 orang PPPK (896 tenaga teknis, 599 guru, 76 tenaga kesehatan). Untuk selanjutnya, penataan tenaga honorer akan dilakukan sesuai dengan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu disesuaikan dengan kapasitas fiskal Kabupaten Garut.

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2025 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga

nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 meliputi:

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD.
2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk membiayai:

a. Rencana Alokasi Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b. Rencana Alokasi Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
c. Rencana Alokasi Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024, Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah. Sehingga untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 dan evaluasi hasil kinerja RKPD hingga Triwulan I, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, maka substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 mengacu dan memperhatikan:

1. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029;
2. Arah kebijakan Pemerintah dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2025;
3. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
4. Arah kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025;
5. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
7. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
8. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat *urgent* pada tahun 2025 dengan fokus penanganan terhadap kemiskinan.

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJMN telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Sebagai tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan landasan transformasi yang menjadi pemicu pertumbuhan baru meliputi pertumbuhan industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Visi tersebut didukung oleh Asta Cita sebagai 8 (Delapan) Misi Jangka Menengah yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

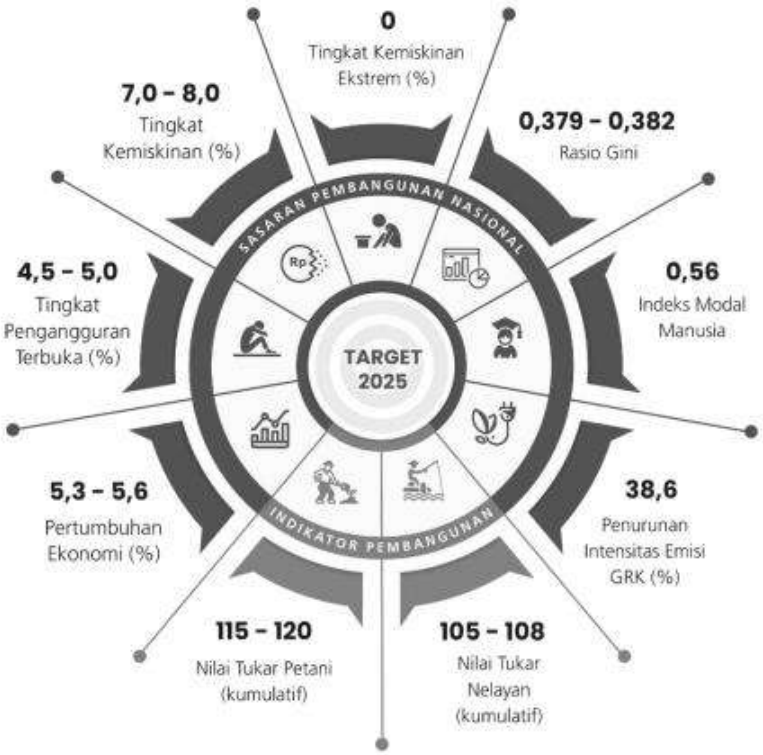

Sumber : Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan periode 2025-2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 di Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu ”Jawa Barat Istimewa, *Lembur Diurus Kota Ditata*” yang mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan lembur/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Visi Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapainya yang disusun sesuai dengan filosofi Sunda sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan, sebagaimana berikut:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4) Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Adapun Target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Poin	n/a	0,57	0,58
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,95	4,96 - 5,37	5,15 - 6,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02
5	Indeks Gini	Poin	0,428	0,383 – 0,390	0,381 – 0,420
6	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah/Kapita	56,08	57,41 - 59,60	63,65 - 66,0
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	6,61	6,97
8	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	12,82	12,7	12,6
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,02	64,06	64,31

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Adapun Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Perwujudan Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter

2. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif

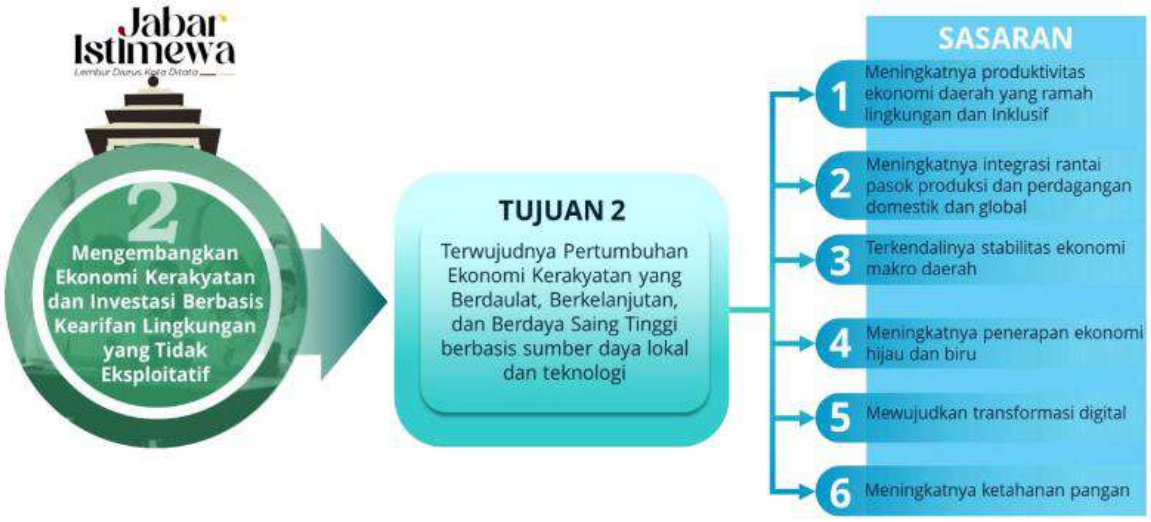

3. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya

4. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 4: Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance.*

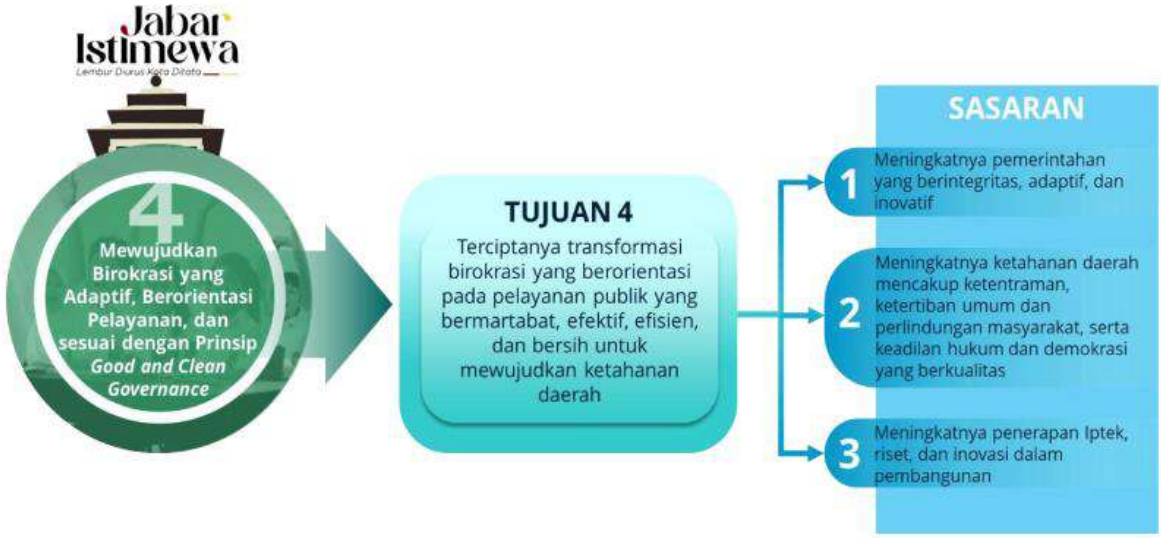

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, yaitu *"Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan"*.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Hebat** : Kabupaten Garut harus memiliki elemen keunggulan, baik dalam hal dampak, skala, atau inovasi. Serta dengan persatuan, kesatuan dan kebersamaan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045
- **Berkelanjutan** : mengajak Putra-Putri terbaik Garut dari berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja bersama mewujudkan visi Garut Hebat secara berkelanjutan yaitu berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif; Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang bermartabat.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4. Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif; Mengembangkan pertanian, perikanan dan kelautan modern yang berkelanjutan dan berdaya saing;
6. Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;
7. Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana;
8. Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

Dari kedelapan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 tersebut, dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Visi: Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan			
Tujuan		Sasaran	
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			
1.1	Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya , berdaya saing dan adaptif	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		1.1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			
2.1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2.1.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
		2.1.3	Meningkatnya pembangunan keolahragaan
Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan			
3.1	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan	3.1.1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan
		3.1.2	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri
		3.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan
		3.1.4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata
		3.1.5	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja
		3.1.6	Meningkatnya kemandirian pangan
Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan			

Visi: Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan			
Tujuan		Sasaran	
4.1	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan	4.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif			
5.1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal	5.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
		5.1.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan			
6.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan	6.1.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas
		6.1.2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana			
7.1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana	7.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		7.1.2	Menurunnya risiko bencana
Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
8.1	Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman	8.1.1	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Kabupaten Garut 2025

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2025 berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
							2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8
Visi:	Terwujudnya Garut HEBAT dan Berkelanjutan								
Misi 1:	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif								
1.1	Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			1	Indeks Pendidikan	Angka	59,97	62,17	62,34
				2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	n/a	54,70-54,73	55,29-55,33
		1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	8,41	8,41
				2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	12,29	12,35
		1.1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	n/a	54,70-54,73	55,29-55,33
Misi 2:	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif								
2.1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			1	Indeks Kesehatan	Poin	84,42	84,68	84,98
				2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5	83,6	83,7
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,87	75,04	75,24
				2	Prevalensi Stunting	%	14,2	13,35	12,8

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
							2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8
		2.1.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5	83,6	83,7
		2.1.3	Meningkatnya pembangunan keolahragaan	1	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,409	0,413	0,418
Misi 3:	Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan								
3.1	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,50 - 5,10	5,04 - 5,54
				2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,99	78,17	78,53
		3.1.1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan	%	3.87	3.85	4.54
		3.1.2	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,44	9,42	9,49

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
							2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8
		3.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	1	Rasio PDRB Perdagangan	%	18,42	20,2	20,16
		3.1.4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,3	4,78	4,98
		3.1.5	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	25,27	25,46	25,5
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,96	6,48 - 7,19	6,34 - 6,93
		3.1.6	Meningkatnya kemandirian pangan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,99	78,17	78,53
Misi 4:	Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan								
4.1	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan			1	Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20 - 9,06	8,01 - 8,72
		4.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20 - 9,06	8,01 - 8,72
Misi 5:	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif								

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
							2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8
5.1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal			1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88	89
				2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	%	10,83	11,25	11,37
		5.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88	89
		5.1.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	%	10,83	11,25	11,37
Misi 6:	Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan								
6.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan			1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	n/a	60,2	61,32
				1	Indeks Desa	Angka	n/a	n/a	n/a
		6.1.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas	1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	n/a	60,2	61,32
		6.1.2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	1	Persentase Desa Mandiri	%	36,1	38,48	40,86

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	CAPAIAN	TARGET	
							2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8
Misi 7:	Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana								
7.1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana			1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2Eq/Miliar	n/a	4,76	5,07
				2	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132
		7.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,37	68,12	68,37
		7.1.2	Menurunnya risiko bencana	1	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132
Misi 8:	Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat								
8.1	Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman			1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Angka	n/a	85,04	85.59
		8.1.1	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Angka	n/a	85,04	85.59

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Dari ke-19 (sembilan belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut tahun 2025 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

RKP tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Adapun penekanan intervensi wilayah Jawa diuraikan sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Pulau Jawa : Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan;
2. Jawa Barat: Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional, tema ini memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 meliputi :
    a. Peningkatan Produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
    b. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;

c. Penurunan logistic cost guna meningkatkan comparative advantage investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);

d. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;

e. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green, gray,* dan *social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah dan banjir).

3. Hingga tahun 2045, Jawa diproyeksikan (masih) menjadi national economic heartland (dengan proyeksi penduduk sebanyak 195 juta orang) sehingga tetap diperlukan investasi dan intervensi yang memadai;
4. *Key Policies* Pengembangan Kewilayahan Jawa Barat 2025-2029 : Khusus wilayah Selatan Jawa Barat direncanakan sebagai Kawasan Afirmasi 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan) prioritas;
5. Pengembangan wilayah afirmasi diarahkan kepada *multi infrastructure Corridor & Key Logistics Infrastructure*. Di wilayah Garut akan dibangun Jalan tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap dan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Jawa Barat Selatan

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.;

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4) Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

Untuk mendukung program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat disusunlangkah strategis pembangunan dalam bentuk Sembilan Langkah Membangun Jabar (9 *Lengkah Ngawangun Jabar*).

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan seiring kondisi Kabupaten Garut dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025, yaitu *"Pemerataan pembangungan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat",* yang diarahkan untuk melanjutkan pemerataan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan lebih meningkatkan perluasan dan pemerataan pembangunan dan cakupan pelayanan ke seluruh wilayah di Kabupaten Garut utamanya daerah-daerah yang masih memiliki akses dan konektivitas terbatas akibat kondisi topografi termasuk memperbaiki aksesibilitas desa untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan ekonomi Kabupaten Garut diarahkan kepada sektor-sektor unggulan pertanian, perikanan, dan kelautan, industri perdagangan hingga industri pengolahan dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pemerataan pembangunan ini diharapkan dapat mendukung penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran Kabupaten Garut yang masih tinggi sehingga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 yang diterjemahkan sama dengan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, yaitu :

1. PPD 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif
2. PPD 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif
3. PPD 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sector unggulan lokal yang berkelanjutan
4. PPD 4 : Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan
5. PPD 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif
6. PPD 6 : Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan
7. PPD 7 : Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.4

Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi TW I RKPD 2025	Isu Strategis Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025
• Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran • Prevalensi stunting masih tinggi • Indeks Pembangunan Manusia masih tertinggal dan Rata-rata lama sekolah yang masih rendah	Kualitas sumberdaya manusia	PPD4:Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan
		PPD2:Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif
		PPD3:Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik dan demokrasi
Rendahnya daya beli masyarakat, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya	Pembangunan ekonomi yang inklusif	PPD 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan
• Rendahnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tingginya resiko bencana • Pembangunan antar wilayah belum merata	Pemerataan Pembangunan infrastruktur antar wilayah didukung dengan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	PPD 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana
		PPD 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan
Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas dan Akses Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan.	PPD 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif
Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal		PPD 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Sumber : Hasil Pengolahan BAPPEDA

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 2025 disusun pula dengan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025. Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
01.00	PD1. Penanganan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Industri
		Bantuan modal Wirausaha Muda Pemula (WMP)
		Pelatihan Vocational bagi Masyarakat (Keterampilan : Kulit, Kopi, Sablon/Menjahit, Kuliner)
		Bantuan bagi warga miskin produktif (KUBE)
		Bantuan Perkuatan Modal Pelaku Usaha Mikro
		Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya
02.00	PD6. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penguatan sistem perlindungan sosial	Pengadaan Roda Pengangkut Sampah
		Pengadaan Bibit Tanaman Buah
		Pembangunan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah : Reduce, Reuse, Recycle)
		Budidaya Maggot
		Pembangunan Bank Sampah
		Pembangunan Ruang Terbuka hijau (RTH)
		Pengadaan Tempat Pewadahan Sampah
		Penyediaan Mesin Pengolah Sampah
		Penghijauan Lahan Kritis
		Pengadaan Komposter
		Pembangunan Tembok Penahan Tanah
		Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
		Pengadaan Roda Pengangkut Sampah
03.00	PD2. Reformasi kualitas sistem pendidikan,transformasi sistem kesehatan,keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan peran aktif pemuda	Fasilitasi pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin: Penanggulangan binatang pembawa penyakit (fogging)
		Peralatan kesehatan Posyandu (alkes)
		Hibah barang untuk alat alat kelengkapan pos yandu prima
		Hibah Uang untuk pembangunan pos yandu prima

No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
		Pembangunan lapang voli
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (untuk sekolah swasta/ yang dikelola oleh masyarakat)
		Pembangunan Zona Selamat Sekolah
		Pembangunan toilet/ tempat cuci tangan (jenjang PAUD dan SD)
		Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
04.00	PD3. Penguatan budaya gotong royong, kehidupan beragama dan berbudaya serta ketentraman dan ketertiban politik, demokrasi	Bantuan keuangan untuk yayasan sosial kemanusiaan/ kemasyarakatan, Advokasi pelayanan publik, pendampingan pelayanan masyarakat
		Bantuan Guru Ngaji
		Bantuan hibah uang sarana keagamaan
05.00	PD5. Peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah diikuti dengan pembangunan desa dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pembangunan Jalan Lingkungan
		Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Pembangunan Drainase Permukiman
		Perbaikan Sistem Penyediaan Air Miunum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Rekonstruksi Jalan
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		Rehabilitasi Jalan
		Pembangunan Tanggul Sungai Sub. DAS
		Pembangunan Septictank Komunal (Minimal Layanan 25 KK)
		Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
		Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Jalan Usaha Tani
		Pembangunan MCK dan Septictank (Minimal Layanan 5-10 KK)
		Rehabilitasi Jembatan Jalan
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Pembangunan Pintu Perlintasan Kereta Api

No.	Prioritas Daerah	Pokok-pokok Pikiran DPRD
06.00	PD4. Pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, peningkatan realisasi investasi, diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kualitas konsumsi pangan	Alat Mesin Pertanian
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian
		Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin)
		Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat
		Hibah Uang Teknologi Tepat Guna
		Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW
		Bantuan Bibit/Ikan/Unggas dalam Kelembagaan Pangan
		Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)
		Bantuan Sarana Perikanan Budidaya
		Penyusunan Masterplan desa wisata
		Desa Wisata (Akses Jalan Menuju Desa Wisata, Fasilitas Umum, Dll)
		Optimalisasi pengelolaan desa wisata
07.00	PD7. Tata Kelola pelayanan publik yang inovatif	Pembangunan Sarana Keagamaan
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Bantuan keuangan untuk yayasan sosial kemanusiaan/ kemasyarakatan, Advokasi pelayanan publik, pendampingan pelayanan masyarakat
		Bantuan Prasarana Pendukung Usaha Peternakan (Kandang Ternak)

Sumber: SIPD diolah Bappeda, Tahun 2025

Adapun Tabel T-57 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Garut tersaji pada Buku II.

Dalam hal strategi dan arah kebijakan Kabupaten Garut Tahun 2025 untuk mengakomodir visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka dilakukan perubahan yang disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 4. 6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			
Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Akselerasi Indeks Rata-rata Lama Sekolah dengan meningkatkan pemerataan akses dan kualitas Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan*	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah
			Meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan kompetensi siswa
			Meningkatkan pengembangan dan pengendalian kurikulum di satuan pendidikan
			Meningkatkan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan*
			Meningkatkan pemerataan distribusi institusi pendidikan
			Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan
			Mendukung Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Meningkatkan kompetensi keahlian SDM pengelola perpustakaan
			Meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan
			Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatkan penguatan identitas budaya lokal	Menguatkan identitas budaya lokal dengan meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Memantapkan Garut sebagai Kota Kreatif di bidang seni dan kreativitas karya budaya lokal*
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			
Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menciptakan pelayanan Kesehatan prima dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pembudayaan perilaku hidup sehat*	Memperluas cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer
			Meningkatkan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mendukung pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Kab/Kota terutama di RSUD Pameungpeuk**
			Meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman
			Menyusun rencana kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
			Meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan kesehatan dengan KTP*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan transformasi teknologi kesehatan dalam hal integrasi sistem informasi kesehatan, sistem informasi rujukan terintegrasi, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk hotline pengaduan dan pelaporan
			Melakukan intervensi spesifik dan sensitif penanganan stunting*
	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan pengetahuan Ibu dan keluarga terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender
			Meningkatkan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana
			Melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pemanfaatan Pendataan Keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
		Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak untuk menjadikan kota ramah perempuan dan anak*	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan*
			Meningkatkan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, meningkatkan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak
			Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi*
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk remaja/pemuda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda
			Melakukan renovasi sarana olahraga*
			Meningkatkan kualitas pembinaan atlet yang didukung oleh pelatih yang berkualitas serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai*
Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan			
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan produksi komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kualitas SDM Pertanian*
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pertanian (meliputi sarana dan prasarana produksi dan pascapanen)*
			Melakukan pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi*
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian
			Meningkatkan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian*
			Meningkatkan akses pemasaran produk pertanian dan menjaga stabilitas harga jual komoditas pertanian*
			Meningkatkan upaya pengolahan pasca panen termasuk penggunaan inovasi dan teknologi
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan	Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan serta pelaku usaha peternakan
			Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dan peternakan
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi perikanan dan peternakan*
			Mengendalikan kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani
			Meningkatkan kualitas dan hilirisasi produk perikanan dan peternakan*
			Meningkatkan pengawasan peredaran produk asal hewan
			Meningkatkan akses pemasaran hasil peternakan dan perikanan
			Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan dan pelaku usaha peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya daya saing UMKM dan industri	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan UMKM (peningkatan kemampuan internal UMKM seperti manajemen keuangan, pemasaran, kualitas produk dan penggunaan teknologi)*
			Meningkatkan pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis mencakup peningkatan produksi, penguatan akses permodalan dan perluasan akses pasar)*
			Melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren*
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi*
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM koperasi
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan daya saing industri	Mengembangan kawasan industry
			Mengelola sistem informasi industrial
			Meningkatkan promosi produk industri lokal
			Meningkatkan kapasitas sumber daya industri
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan
			Melindungi dan menggunakan produk lokal Garutan
			Meningkatkan sarana distribusi perdagangan pasar rakyat*
			Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Perlindungan terhadap hak konsumen
			Meningkatkan dan mengembangkan ekspor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Meningkatkan kualitas pariwisata daerah	Meningkatkan daya tarik wisata dengan amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan
			Mendukung peningkatan 6A pariwisata di Santolo dan Leuweung Sancang**
			Mengembangkan wisata alam berbasis konservasi, wisata ekologi hutan, wisata petualangan dan ekstrim, wisata budaya sejarah dan wisata kuliner lokal*
			Membangun infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisara berkelanjutan*
			Meningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata termasuk melalui promosi wisata digital*
			Meningkatan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata*
	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatkan serapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas*
			Meningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi kerja*
			Menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas*
			Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatkan perlindungan hubungan industrial
		Meningkatkan promosi dan iklim investasi daerah	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, dan peluang investasi*
			Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas
			Meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan
			Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas konsumsi pangan
			Meningkatkan pengawasan mutu keamanan pangan
Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial	Melakukan pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nama dan alamat (by name by address) untuk meningkatkan akurasi dan konvergensi program bantuan sosial*
			Memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Mengintegrasikan program bantuan sosial daerah guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program*
			Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
			Mengembangkan program perlindungan sosial berbasis risiko dan program bantuan sosial berbasis komunitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mendorong perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin
			Memperkuat sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan dan mengoptimalkan peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan
			Mengembangkan mekanisme graduasi untuk penerima manfaat yang sudah tidak layak dan mengintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi
			Menyediakan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan dan meningkatkan literasi digital SDM pengelola

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas	Membina dan mengerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa
			Melakukan revitalisasi koperasi desa dalam rangka optimalisasi penurunan kemiskinan
			Memberikan fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan, askes pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro
			Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi
			Memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi penempatan kerja
			Melakukan revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah
		Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar dan menengah secara tepat sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan Mendorong kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
			Menyiapkan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan
			Memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi pemukiman bagi keluarga miskin
			Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik
			Mengembangkan akses listrik dan energi serta mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah pelosok untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital
			Melaksanakan program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin
			Meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan mengembangkan pasar hasil pertanian melalui kemitraan dengan koperasi, BUMDES dan pelaku usaha lokal
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Melakukan penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi*	Melakukan penguatan dan penataan organisasi
			Melakukan optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten
			Melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel
			Mengoptimalkan penerapan Reformasi birokrasi dengan didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi diantaranya peningkatan infrastruktur jaringan dan penyediaan media komunikasi
		Meningkatkan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	Melakukan transformasi layanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan inklusif*
			Meningkatkan integritas dan kualitas SDM pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai*
			Optimalisasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar pelayanan publik
			Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
			Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi*
			Meningkatkan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah	Melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Menyusun roadmap peningkatan penerimaan pajak
			Menguatkan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan			
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	Mendukung program pembangunan jalan tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya**
			Mendukung peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat**
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan serta konektivitas antar wilayah melalui revitalisasi, monitoring dan pemeliharaan jalan*
			Mengoptimalkan penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*
			Meningkatkan kinerja sistem irigasi*
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Meningkatkan pemenuhan akses terhadap sanitasi (layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik)*
			Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungannya
			Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan
			Meingkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
			Membangun sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menyediakan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Melakukan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan
			Melakukan penataan kawasan perkotaan*
			Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman
			Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman
			Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni*
			Menyediakan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)
			Mendukung pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pameungpeuk**
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pembangunan desa	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan sarana prasarana serta infastruktur perdesaan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik*
			Menguatkan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa
			Menguatkan kerjasama antar desa melalui pembangunan kawasan perdesaan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa*
			Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata sesuai kebutuhan dan potensi desa*
			Mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana			
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
			Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup*
			Melakukan optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mencemari lingkungan
			Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang lingkungan hidup
			Meningkatkan cakupan layanan persampahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengurangi timbulan sampah*
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
	Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Melakukan perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana
			Meningkatkan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana
			Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten; pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan logistik dan peralatan
			Meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
			Meningkatkan pelayanan penanganan pemulihan pasca bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat	Membangun iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, dan toleran	Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan Masyarakat*
			Memberikan bantuan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa*
			Melakukan optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren
			Melaksanakan fasilitasi aktivitas keagamaan
			Melakukan perbaikan dan penyaluran hibah sarana prasarana keagamaan dan lembaga keagamaan
			Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Forkopimda
			Melakukan pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik
			Meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perkada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Melaksanakan penguatan peran partai politik
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Kabupaten Garut 2025, *Bersesuaian dengan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati,

**Mengacu pada arah pembangunan kewilayahan Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yang diselaraskan, visi dan misi serta program kepala daerah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat pada Tabel berikut.

4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,41	Akselerasi Indeks Rata-rata Lama Sekolah dengan meningkatkan pemerataan akses dan kualitas Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan*	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	563,340,491,308	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,29					
					Meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan kompetensi siswa	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	412,855,200	Dinas Pendidikan
						Program Pemerintahan	39,530,436,280	

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan pemerataan distribusi institusi pendidikan	dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah
					Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan			
					Meningkatkan pengembangan dan pengendalian kurikulum di satuan pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	1,085,590,900	Dinas Pendidikan
						Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	109,136,000	Dinas Pendidikan
					Meningkatkan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan*	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	12,207,727,346	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Mendukung Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Meningkatkan kompetensi keahlian SDM pengelola perpustakaan Meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan	Program Pembinaan Perpustakaan	6,737,091,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					minat baca dan literasi masyarakat			
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70-54,73	Meningkatkan penguatan identitas budaya lokal	Menguatkan identitas budaya lokal dengan meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	1,829,275,600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Memantapkan Garut sebagai Kota Kreatif di bidang seni dan kreativitas karya budaya lokal*	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	438,062,100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Program Pengelolaan Permuseuman	25,351,400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						Total	625,716,017,834	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,04	Menciptakan pelayanan Kesehatan prima dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pembudayaan perilaku hidup sehat*	Memperluas cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	371,743,333,389	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (%)	13,35		Meningkatkan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,125,467,825	Dinas Kesehatan
					Mendukung pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Kab/Kota terutama di RSUD Pameungpeuk**			
					Meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman			
					Menyusun rencana kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,898,271,930	Dinas Kesehatan
					Meningkatkan Universal Health Coverage (UHC)			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan kesehatan dengan KTP*			
					Melakukan transformasi teknologi kesehatan dalam hal integrasi sistem informasi kesehatan, sistem informasi rujukan terintegrasi, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk hotline pengaduan dan pelaporan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1,020,831,370	Dinas Kesehatan
					Melakukan intervensi spesifik dan sensitif penanganan stunting*			
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender(Poin)	83,6	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan pengetahuan Ibu dan keluarga terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7,491,820,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
					Melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Keluarga Sejahtera (UPPKS)			
					Meningkatkan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	16,919,354,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
					Melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pemanfaatan Pendataan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	8,280,876,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak untuk menjadikan kota ramah perempuan dan anak*	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan*	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	202,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	669,825,000	
						Program Perlindungan Perempuan	360,063,500	

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	34,800,000	
					Meningkatkan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, meningkatkan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak	Program Pemenuhan Hak Anak	326,200,000	
					Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi*	Program Perlindungan Khusus Anak	718,596,500	
	Meningkatnya pembangunan keolahragaan	Indeks Pembangunan Olahraga	413	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Melakukan renovasi sarana olahraga*	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	41,283,735,576	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Total	456,075,175,090	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan(%)	3,85	Meningkatkan produksi komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kualitas SDM Pertanian*	Program Penyuluhan Pertanian	8,898,881,463	Dinas Pertanian
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pertanian (meliputi sarana dan prasarana produksi dan pascapanen)*	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5,698,241,200	Dinas Pertanian
					Melakukan pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar			
					Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi*	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32,956,425,300	Dinas Pertanian
					Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	317,290,000	Dinas Pertanian
				Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	154,641,900	Dinas Pertanian
					Meningkatkan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian*			
					Meningkatkan akses pemasaran produk pertanian dan menjaga			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					stabilitas harga jual komoditas pertanian*			
					Meningkatkan upaya pengolahan pasca panen termasuk penggunaan inovasi dan teknologi			
				Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan	Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,525,165,508	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan serta pelaku usaha peternakan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,398,924,330	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dan peternakan			
					Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi perikanan dan peternakan*	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	190,578,600	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Mengendalikan kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,555,891,752	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Meningkatkan kualitas dan hilirisasi produk perikanan dan peternakan*			
					Meningkatkan pengawasan peredaran produk asal hewan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	978,686,763	Dinas Perikanan dan Peternakan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan akses pemasaran hasil peternakan dan perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,296,642,288	Dinas Perikanan dan Peternakan
					Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan dan pelaku usaha peternakan			
	Meningkatnya daya saing UMKM dan industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,42	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan UMKM (peningkatan kemampuan internal UMKM seperti manajemen keuangan, pemasaran, kualitas produk dan penggunaan teknologi)*	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4,909,799,156	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatkan pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis mencakup peningkatan produksi, penguatan akses permodalan dan perluasan akses pasar)*	Program Pengembangan UMKM	2,191,819,085.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	34,930,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren*	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	90,943,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi*	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	108,940,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	274,679,703	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2,400,069,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Mengembangan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8,739,523,882	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	24,700,000	
					Meningkatkan promosi produk industri lokal			
					Meningkatkan kapasitas sumber daya industri			
					Mengelola sistem informasi industrial	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	28,491,900	
					Meningkatkan promosi produk industri lokal			
					Meningkatkan kapasitas sumber daya industri			
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk remaja/pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,220,366,300	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda			
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Rasio PDRB Perdagangan(%)	20,2	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	27,688,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
								Sumber Daya Mineral
					Melindungi dan menggunakan produk lokal Garutan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	478,700,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
					Meningkatkan sarana distribusi perdagangan pasar rakyat*	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,958,551,585	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
					Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66,985,300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
					Perlindungan terhadap hak konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	169,865,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
					Meningkatkan dan mengembangkan ekspor	Program Pengembangan Ekspor	211,423,200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,78	Meningkatkan kualitas pariwisata daerah	Meningkatkan daya tarik wisata dengan amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,592,147,566	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Mendukung peningkatan 6A pariwisata di Santolo dan Leuweung Sancang**	Program Pemasaran Pariwisata	386,995,728	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Mengembangkan wisata alam berbasis konservasi, wisata ekologi hutan, wisata petualangan dan ekstrim, wisata budaya sejarah dan wisata kuliner lokal*	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	358,712,275	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Membangun infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisata berkelanjutan*			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Meningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata termasuk melalui promosi wisata digital*	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,814,793,850	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Meningkatan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Meningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata*			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	25,46	Meningkatkan serapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas*	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,262,723,496	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,48 - 7,19		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	159,511,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi kerja*	Program Hubungan Industrial	1,604,849,590	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatkan perlindungan hubungan industrial			
					Menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas*	Program Penempatan Tenaga Kerja	357,365,369	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatkan promosi dan iklim investasi daerah	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, dan peluang investasi*	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	395,196,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	Program Promosi Penanaman Modal	151,646,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	108,397,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	78,17	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1,085,706,972	Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8,500,713,992	Dinas Ketahanan Pangan
					Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan			
					Meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	196,540,920	Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	273,352,000	Dinas Ketahanan Pangan
					Meningkatkan pengawasan mutu keamanan pangan			
						Total	106,157,497,873	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan(%)	8,20 - 9,06	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial	Melakukan pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nama dan alamat (by name by address) untuk meningkatkan akurasi dan konvergensi program bantuan sosial*	Program Pemberdayaan Sosial	1,881,218,200	Dinas Sosial
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	95,962,200	Dinas Sosial
					Memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	13,167,001,325	Dinas Sosial
					Mengintegrasikan program bantuan sosial daerah guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program*			Dinas Sosial
					Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14,701,559,800	Dinas Sosial
					Mengembangkan program perlindungan sosial berbasis risiko dan program bantuan sosial berbasis komunitas			Dinas Sosial
					Mendorong perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial			Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin			
					Memperkuat sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan dan mengoptimalkan peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan			
					Mengembangkan mekanisme graduasi untuk penerima manfaat yang sudah tidak layak dan mengintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi	Program Penanganan Bencana	2,560,773,700	Dinas Sosial
					Menyediakan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan dan meningkatkan literasi digital SDM pengelola			
				Meningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas	Membina dan mengerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2,400,069,700	Dinas Sosial
					Melakukan revitalisasi koperasi desa dalam rangka optimalisasi penurunan kemiskinan			
					Memberikan fasilitasi perizinan dan legalitas usaha,			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					akses pembiayaan, askes pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro			
					Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,592,147,566	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin	Program Pemasaran Pariwisata	386,995,728	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi penempatan kerja	Program Hubungan Industrial	1,604,849,590	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Program Penempatan Tenaga Kerja	357,365,369	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,262,723,496	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Melakukan revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	395,196,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Promosi Penanaman Modal	151,646,000	Dinas Penanaman

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
								Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8,739,523,882	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	4,909,799,156	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Pengembangan UMKM	2,191,819,085	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	27,688,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,958,551,585	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Stabilisasi Harga Barang	66,985,300	Dinas Perindustrian,

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2,958,551,585	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
				Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar dan menengah secara tepat sasaran	Program Pengelolaan Pendidikan	563,340,491,308	Dinas Pendidikan
					Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	412,855,200	Dinas Pendidikan
					Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan Mendorong kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	371,743,333,389	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Melaksanakan program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,898,271,930	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,125,467,825	Dinas Kesehatan
					Menyiapkan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	30,899,040,344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi pemukiman bagi keluarga miskin	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22,343,293,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.563.359.478	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Mengembangkan akses listrik dan energi serta mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah pelosok untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5,899,728,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan mengembangkan pasar hasil pertanian melalui kemitraan dengan koperasi, BUMDES dan pelaku usaha lokal	Program Penyelenggaraan Jalan	130,473,404,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengembangan Perumahan	13,024,119,179	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Program Kawasan Permukiman	7,683,560,423	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Total	1,218,253,993,631	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	88	Melakukan penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi*	Melakukan penguatan dan penataan organisasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,297,146,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Melakukan optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,777,799,150	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	250,527,500	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					pembangunan secara transparan dan akuntabel			
					Mengoptimalkan penerapan Reformasi birokrasi dengan didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	187,878,315	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi diantaranya peningkatan infrastruktur jaringan dan penyediaan media komunikasi	Program Pengelolaan Arsip	752,715,762	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	552,551,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Pelayanan Penanaman Modal	192,411,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	175,165,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Meningkatkan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	Melakukan transformasi layanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan inklusif*	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	6,411,172,433	Dinas Pemadam Kebakaran

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan integritas dan kualitas SDM pelayanan			Dinas Pemadam Kebakaran
					Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai*	Program Pendaftaran Penduduk	1,599,293,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Optimalisasi penerapan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar pelayanan publik			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik	Program Pencatatan Sipil	308,921,230	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi*			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatkan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	889,958,925	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	40,881,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	813,094,013,427	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,575,004,068	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Program Kepegawaian Daerah	4,484,277,400	Badan Kepegawaian dan Diklat
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,202,758,888	Badan Kepegawaian dan Diklat
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,093,264,710	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,830,805,114	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1,895,998,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Pembangunan Daerah		
						Program Perekonomian dan Pembangunan	1,156,218,313	Sekretariat Daerah
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,475,018,070	Sekretariat DPRD
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	4,600,407,662	Inspektorat Daerah
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,904,466,100	Inspektorat Daerah
						Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	345,012,300	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	575,158,300	Dinas Perumahan dan Permukiman
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7,071,330,596	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5,909,227,736	Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,708,772,954	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28,934,470,174	Kecamatan
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,318,634,578	Kecamatan
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	11,25	Meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah	Melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi*	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,716,830,349	Badan Pendapatan Daerah
					Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah			
					Menyusun roadmap peningkatan penerimaan pajak			
					Menguatkan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah			
						Total	929,328,091,254	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 6 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	60,2	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	Mendukung program pembangunan jalan tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya**	Program Penyelenggaraan Jalan	130,473,404,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Mendukung peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat**			
					Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan serta konektivitas antar wilayah melalui revitalisasi, monitoring dan pemeliharaan jalan*			
					Mengoptimalkan penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	30,899,040,344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meningkatkan kinerja sistem irigasi*			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22,343,293,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5,899,728,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meningkatkan pemenuhan akses terhadap sanitasi (layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik)*	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,563,359,478	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan Gedung	2,784,449,940	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1,050,880,536	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	608,346,228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meingkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,245,793,720	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Dinas Pekerjaan Umum dan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
								Penataan Ruang
					Membangun sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	35,018,506,362	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Pelayaran	77,960,700	Dinas Perhubungan
				Menyediakan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Melakukan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,941,125,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Melakukan penataan kawasan perkotaan*	Program Kawasan Permukiman	7,683,560,423	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	58,983,804,428	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman			Dinas Perumahan dan Permukiman
					Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni*			Dinas Perumahan dan Permukiman

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Menyediakan perumahan untuk memangkas backlog (komersil dan bersubsidi)	Program Pengembangan Perumahan	13,024,119,179	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Mendukung pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pameungpeuk**			Dinas Perumahan dan Permukiman
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri(%)	38,48	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pembangunan desa	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa	Program Penataan Desa	8,013,595,215	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Meningkatkan sarana prasarana serta infastruktur perdesaan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik*	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	164,699,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Menguatkan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5,378,198,985	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Menguatkan kerjasama antar desa melalui pembangunan kawasan perdesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	16,462,679,045	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa*			
					Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					sesuai kebutuhan dan potensi desa*			
					Mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi**			
						Total	347,616,546,349	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 7 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD 7: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,12	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama dengan stakeholder terkait	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	695,250,450	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	18,206,000	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup*	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	186,711,260	Dinas Lingkungan Hidup
					Melakukan optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,369,919,892	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mencemari lingkungan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1,538,463,952	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	821,998,265	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatkan cakupan layanan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	21,778,138,230	Dinas Lingkungan Hidup
					Mengurangi timbulan sampah*			Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	178,243,200	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	220,080,578	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
						Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	133	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Melakukan perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	3,712,430,282	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatkan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana			
					Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten; pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan logistik dan peralatan			
					Meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana			
					Meningkatkan pelayanan penanganan pemulihan pasca bencana			
							Total	31,519,442,109	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 8 dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
PPD8: Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (Poin)	85,04	Membangun iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, dan toleran	Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan Masyarakat*	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	39,530,436,280	Sekretariat Daerah
					Memberikan bantuan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa*			
					Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Forkopimda			
					Melakukan optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,746,667,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Melaksanakan fasilitasi aktivitas keagamaan			
					Melakukan perbaikan dan penyaluran hibah sarana prasarana keagamaan dan lembaga keagamaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	292,137,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Forkopimda			

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
					Melakukan pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4,485,369,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perkada	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	582,352,700	
					Melaksanakan penguatan peran partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	4,704,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8,864,793,740	Satuan Polisi Pamong Praja
					Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat			
						Total	61,206,006,720	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

4.2.4. *Cross Cutting* Perencanaan Tahun 2025

4.2.4.1. *Cross Cutting* Penanganan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2025

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut dilaksanakan melalui tiga intervensi kemiskinan yakni meliputi1) pengurangan beban pengeluaran; 2)peningkatan pendapatan masyarakat, 3) penurunan jumlah kantong kemiskinan. Uraian crosscutting penanganan kemiskinan diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan peningkatan pendapatan melalui stimulasi sektor unggulan difokuskan kepada pengembangan DTW Situ Bagendit dan Penanganan Kerawanan pangan, yang digambarkan pada crosscutting sebagai berikut:

Gambar 4.2 Peningkatan Pendapatan melalui Stimulasi Sektor Unggulan

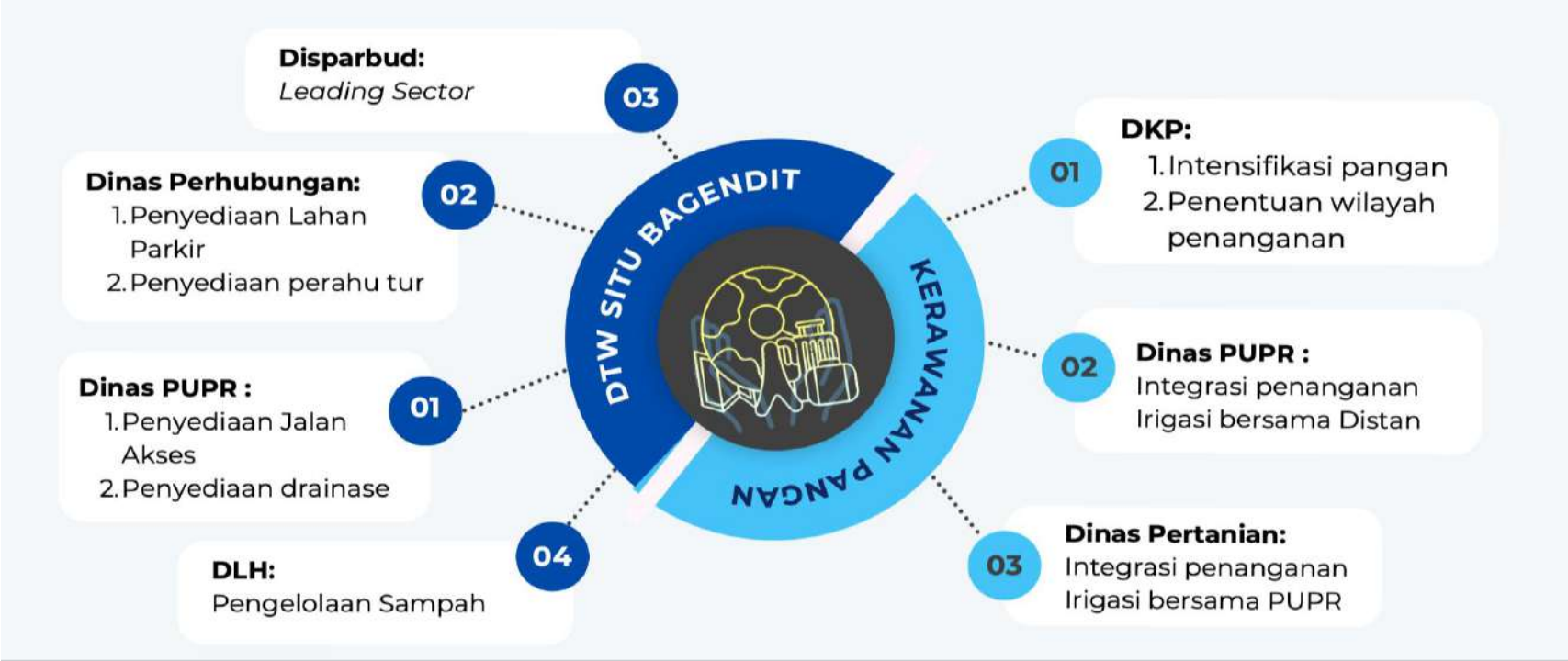

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Kebijakan penanganan kemiskinan dari segi infrastruktur diantaranya diwujudkan melalui kebijakan penataan perkotaan dan pengembangan wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4.3 Kebijakan Penataan Perkotaan dan Pengembangan Wilayah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

Kebijakan terkait pengurangan beban pengeluaran masyarrakat dilaksanakan pula melalui peningkatan ketahanan pangan , peningkatan realisasi investasi, pengembangan situ bagendit serta penataan pasar ciawi, yang diuraikan sebagai berikut.

Gambar 4.4. Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2025

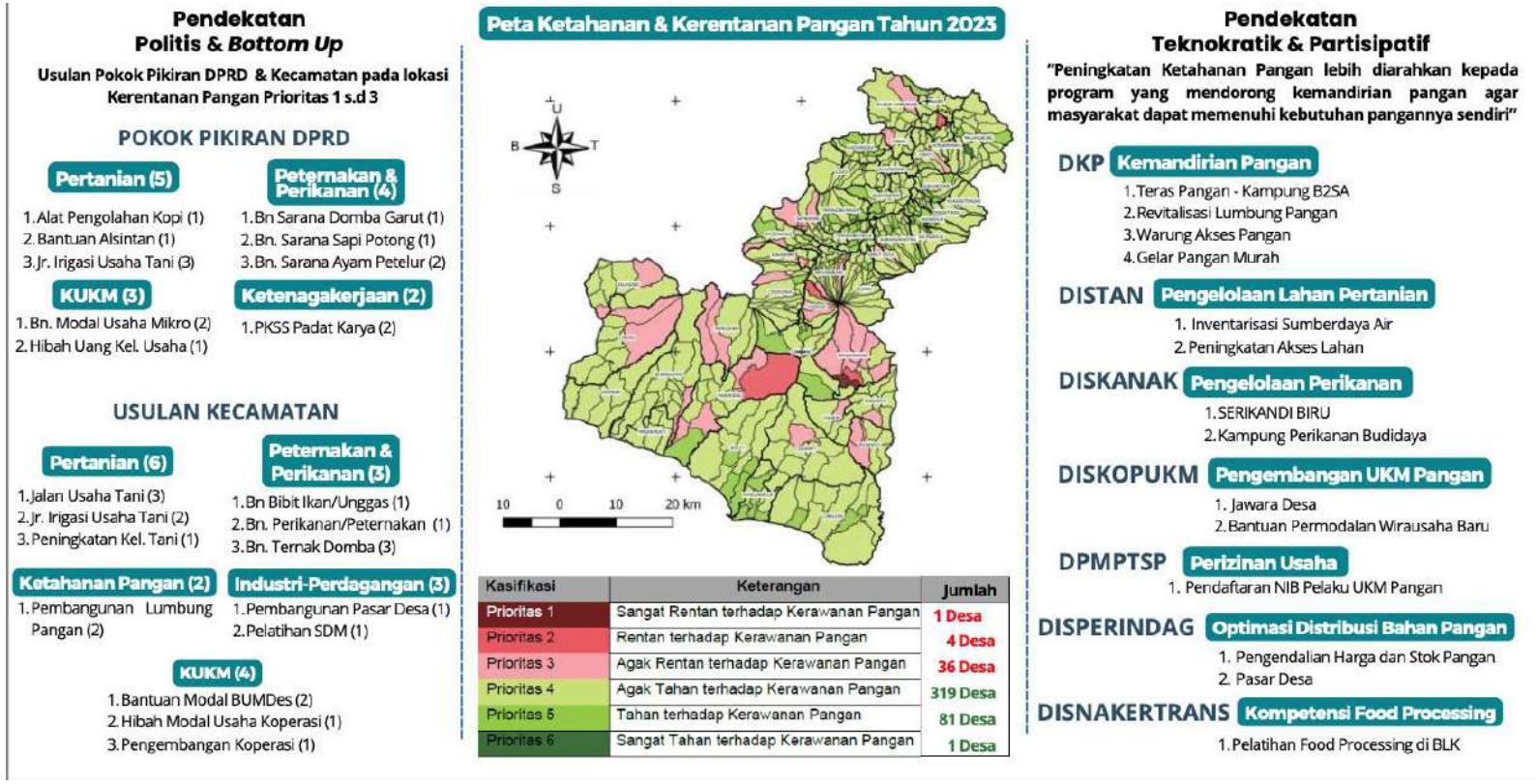

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2024

4.2.4.2 *Cross Cutting* Stunting Tahun 2025

Pada tahun 2024 angka prevalensi stunting berdasarkan SKI mencapai 24,1 % mengalami kenaikan 0,5% dibandingkan capaian pada tahun 2023. Sebagai langkah penanganan dan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Garut, berikut merupakan crosscutting strategi percepatan penurunan *stunting* yang berkaitan dan beririsan dengan strategi penurunan kemiskinan.

Gambar 4.5 Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

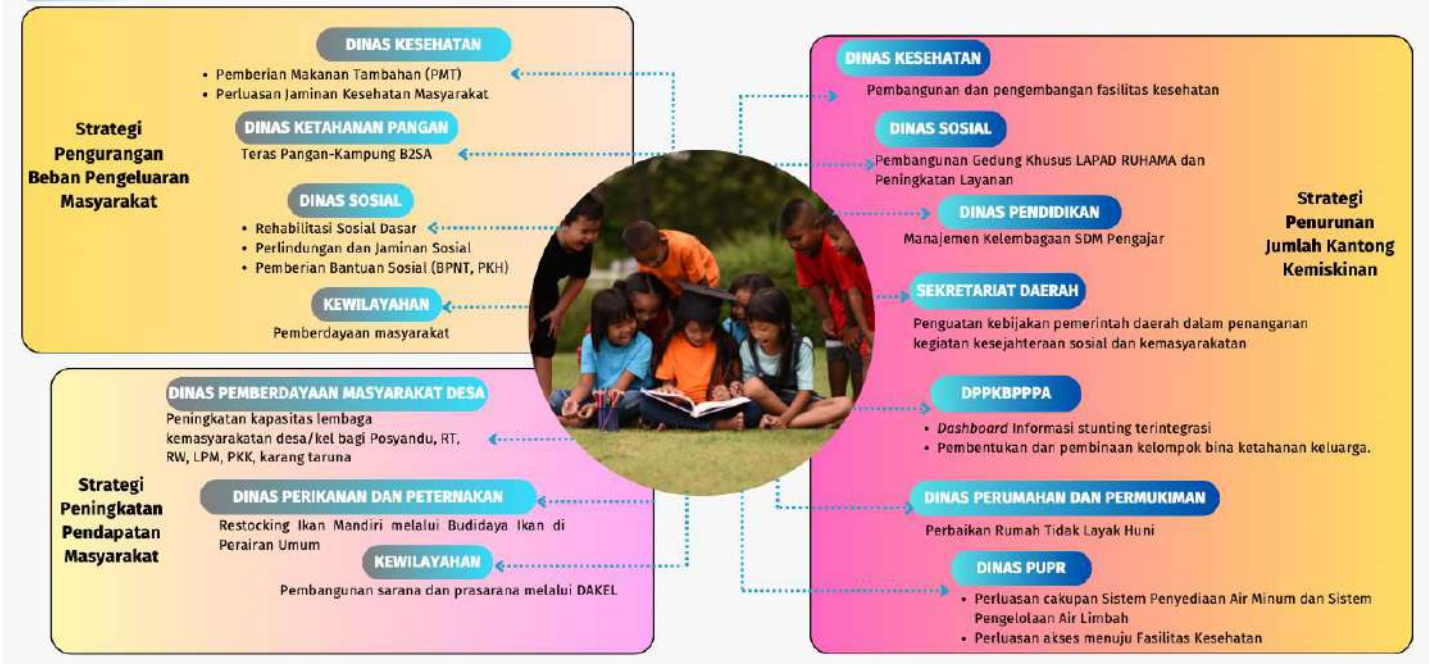

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

4.2.4.3 *Cross Cutting* Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2025

Gambar 4. 6 Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

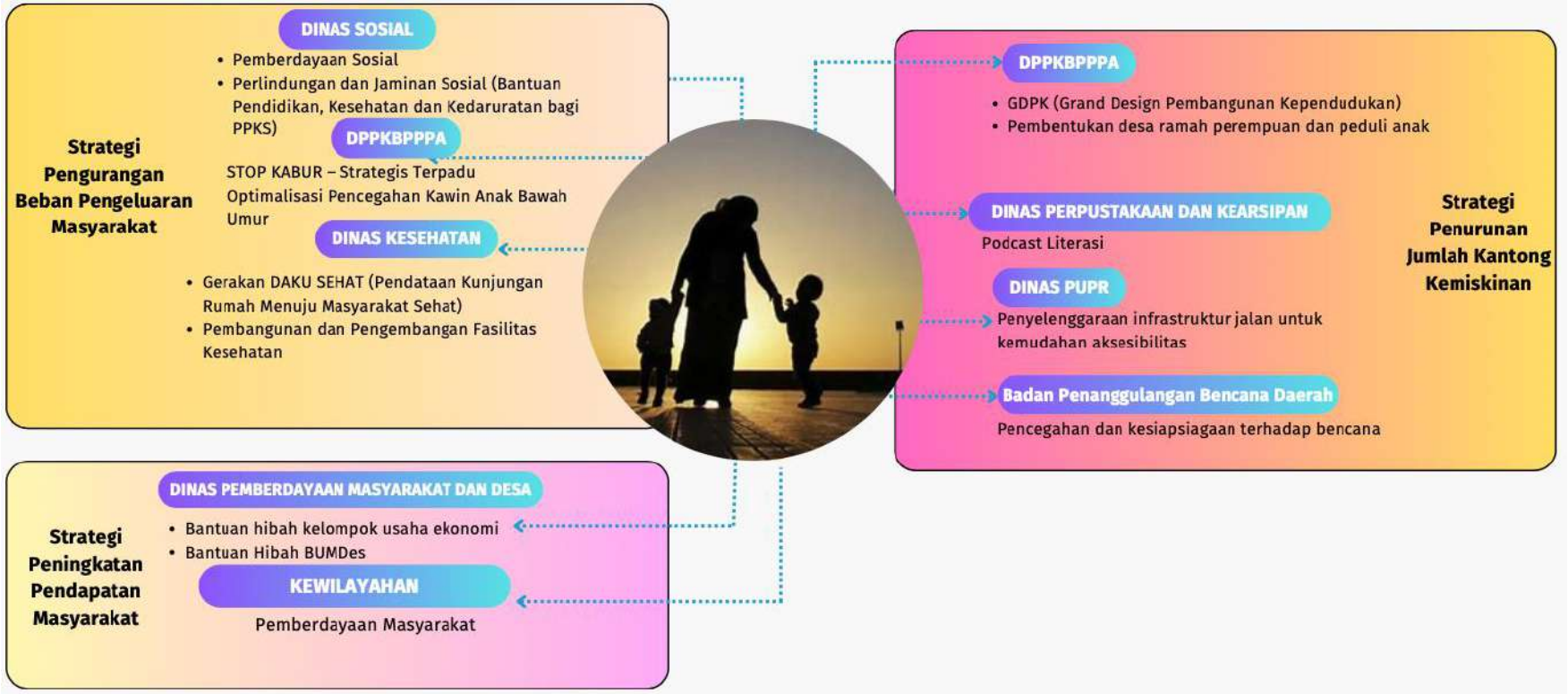

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Kabupaten Garut menjadi salah satu dari 5 Kabupaten yang terpilih menjadi sampel dalam Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus 10 (2021-2025) advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-KESPRO). Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA diamanatkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang sejalan dengan pelaksanaan RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 untuk segera menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

4.2.4.4 *Cross Cutting* Pengendalian Inflasi

Dalam melaksanakan kebijakan penanganan kebijakan inflasi di Kabupaten Garut dilaksanakan pengendalian inflasi melalui pengendalian bahan makanan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan olahraga, transportasi dan komunikasi serta rekreasi dan budaya, yang dimaksudkan untuk dapat mendorong ketahanan pangan serta percepatan penggunaan produk dalam negeri. Pengendalian harga barang pokok penting di Kabupaten Garut saat ini dilakukan dengan mempedomani Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah yang telah disusun melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 580/KEP.24-PEREKO/2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten Garut mengadopsi strategi pengendalian inflasi yang digunakan oleh Bank Indonesia yaitu strategi 4K: Keterjangkauan Harga; Ketersediaan Pasokan; Kelancaran Distribusi; dan Komunikasi Efektif. Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur pemerintah seperti DisperindagESDM, DKP, Bagian Kerjasama, Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pendistribusian LPG, Disdik, DiskopUKM, Dinsos, Diskanak, Distan, Bagian Perekonomian yang pencapaian kinerjanya dilaporkan kepada Bupati Garut melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di tahun 2025 dan seterusnya, perlu dilakukan penyusunan Peta Jalan baru yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih dari hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 yang tetap mengintervensi di strategi 4K pengendalian inflasi. Adapun *Cross Cutting* Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7 *Cross Cutting* Pengendalian Inflasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan prioritas pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut

Prioritas Nasional RKP 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025	Prioritas Provinsi dan Daerah yang Terkait Prioritas Nasional
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PPP1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	PPD 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	Prioritas Provinsi : PPP1 dan PPP4 Priotas Daerah: PPD 8
PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PPP2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	PPD 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3 dan PPP4 Priotas Daerah: PPD 3
PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif	PPP3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	PPD 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3 Priotas Daerah: PPD 3 dan PPD 6

Prioritas Nasional RKP 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025	Prioritas Provinsi dan Daerah yang Terkait Prioritas Nasional
serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PPP4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	PPD 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	Prioritas Provinsi : PPP1 Priotas Daerah: PPD 1 dan PPD 2
PN5:Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PPD 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif	Prioritas Provinsi : PPP2 Priotas Daerah: PPD 3
PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PPD 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan	Prioritas Provinsi : PPP2 Priotas Daerah: PPD4, PPD 6
PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PPD 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang,	Prioritas Provinsi : PPP3 dan PPP4 Priotas Daerah: PPD 5

Prioritas Nasional RKP 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025	Prioritas Provinsi dan Daerah yang Terkait Prioritas Nasional
		dan penanggulangan bencana	
PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PPD 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Prioritas Provinsi : PPP1 dan PPP3 Priotas Daerah: PPD 7, PPD 8

Sumber : RKP 2025, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Keterkaitan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut RKPD Tahun 2025 dengan sasaran pembangunan pembangunan nasional RKP Tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16 Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dalam Perubahan RKPD 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Prioritas Pembanguna Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
PPD1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	PPP1	PN4, PN8	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
PPD2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	PPP1	PN4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Pengendalian Penduduk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
PPD3	Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	PPP2	PN2, PN3, PN5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perikanan dan Peternakan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
PPD4	Penurunan angka kemiskinan	PPP3	PN6	Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	
				Program Hubungan Industrial Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman	
PPD5	Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik didukung inovasi dan digitalisasi.	PPP4	PN7	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
				Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
PPD6	Penyediaan Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	PPP3, PPP4	PN3, PN6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Perkeretaapian Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
PPD7	Penerapan pelaksanaan konservasi, pengendalian	PPP3	PN2	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerja Sama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	terhadap pencemaran lingkungan, dan ketangguhan bencana			Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan	
				Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana
PPD8	Penguatan stabilitas sosial dan kerukunan dalam kehidupan beragama	PPP1	PN7	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Penguatan Ideologi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Daerah		Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi	Keterkaitan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
				Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber : Bappeda Kabupaten Garut, diolah 2025

Sinergi pembangunan daerah dan Provinsi Jawa Barat digambarkan melalui Keterkaitan antara 8 Misi Pembangunan, 8 Agenda Transformasi Garut Hebat dengan *9 Lengkah Ngawangun* Jabar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.17. Keterkaitan Misi, 8 Agenda Transformasi Garut Hebat dan 9 *Lengkah Ngawangun Jabar*

Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	
Hebat Pendidikannya 1) Bantuan biaya pendidikan untuk mewujudkan biaya pendidikan dasar terjangkau 2) Beasiswa Pendidikan SDM Hebat: Program Satu Desa Satu Sarjana, 5.000 bantuan pendidikan mahasiswa (Program Unggulan)	Lengkah Katilu

Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya 1) Penyelenggaraan ruang pertunjukan Seni Budaya	
Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	
Hebat Kesehatannya 1) Pelayanan Kesehatan Prima 2) Jaminan persalinan "Ibu Hebat"; Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama untuk masyarakat kurang mampu (miskin) 3) Penanganan Stunting dan Makan Bergizi Gratis	Lengkah Kalima Lengkah Kagenep
Hebat Desa dan Warganya 1) Kadeudeuh untuk Para Atlit Peraih Medali 2) Penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	
Hebat Ekonominya 1) 100.000 lapangan pekerjaan baru (Program Unggulan) 2) Pemberdayaan UMKM: Layanan Rumah Produksi dan Kemasan 3) Pengembangan UMKM: Kredit Garut Hebat untuk Startup dan UMKM (Program Unggulan); Bantuan modal 1-50 juta; Support UMKM dengan aktivitas pameran atau bazar, UMKM Awards 4) WIRA HEBAT: Satu Desa, Satu Wirausaha Baru HEBAT (Program Unggulan) 5) Inkubasi Koperasi: Transformasi Koperasi Modern di Garut 6) Revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur pasar (perbaikan drainase, perbaikan akses jalan, perbaikan jongko dan permasalahan penumpukan sampah) dan pembatasan pasar modern 7) Garut Digital Valley: Pusat Kegiatan Kreatif Milenial dan Gen Z, Start-up, Up-skill, Digitalisasi, E-sport dan Komunitas 8) Peta Potensi Investasi Daerah Hebat Pendidikannya: 1) Pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas	Lengkah Kadua Lengkah Kaopat
Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya 1) Pengembangan 30 Desa Wisata HEBAT (Program Unggulan)	

2) Pengembangan pariwisata Garut Selatan dengan peningkatan sarana dan prasarana wisata pesisir selatan 3) Penyusunan narasi wisata Garut	

Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya 1) Petani Jawara Hebat 2) Kemudahan akses pupuk (penyediaan dan pemerataan subsidi pupuk) 3) Kemitraan Pertanian dengan Industri 4) Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu 5) Pengembangan Perikanan Darat Hebat	
Misi 4 Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	
Hebat Desa dan Warganya 1) Bantuan operasional pensasaran Bantuan Sosial 2) Bantuan Santunan Hebat 2jt/KK bagi yang belum memiliki PKH BPNT	Lengkah Kahiji Lengkah Kasalapan
Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;	
Hebat Pemerintahannya 1) Kemudahan layanan e-KTP (Program Unggulan) 2) BUMD Dekat dengan Rakyat 3) 112 Call Center: Service Exellence Melalui Layanan Cepat Tanggap 4) Smart Kampung: Digitalisasi dari Kampung 5) E-village Budgeting & Monitoring System: Transparan dan Tepat Sasaran 6) Memberlakukan insentif pajak dan retribusi 7) Optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi 8) One-stop Service (OSS) Center : mempercepat proses perizinan investasi dan memberikan layanan konsultasi kepada calon investor	Lengkah Kasalapan
Misi 6 Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;	

Hebat Infrastrukturnya 1) Infrastruktur Jalan Mulus: Satgasus Jalan Berlubang untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan (Program Unggulan) 2) Gapura Garut: Penataan Gapura Kampung/Desa, Pedestrian, Taman dan Ruang Publik dengan Corak Arsitek Khas Garut) 3) Festival Bedah Rumah 4) Optimalisasi jaringan irigasi pertanian	Lengkah Kahiji Lengkah Kadua

Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
Hebat Desa dan Warganya 1) Desa Mandiri Pangan HEBAT; Desa Pintar HEBAT 2) Satu Desa Satu Lapang Olahraga 3) Ambulance Gratis 4) 40 BUMDES Hebat (Program Unggulan)	
Misi 7 Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang dan penanggulangan bencana;	
Hebat Infrastrukturnya 1) Pengembangan Kawasan Industri Ramah Lingkungan 2) Aktivasi bank sampah desa	Lengkah Katujuh Lengkah Kadalapan
Misi 8 Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	
Hebat Desa dan Warganya 1) Insentif guru ngaji, pesantren, RW dan RT, aparatur desa, dan kepala desa (Program Unggulan)	Lengkah Kasalapan

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Selain itu, sebagai bagian dari Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, beberapa proyek strategis yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diantaranya:

Gambar 4.8 Program Strategis Skala Kewilayahan Jawa Barat 2022-2042

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2025 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Garut Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)		
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	`Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
4.3 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Program Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Tujuan 7: Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energy terbarukan dalam bauran energi global.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Program Penilaian Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan dan Permukiman
9.2Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
9.3 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
10.2 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga
	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pengendalian, Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
11.2 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
11.3 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
11.4 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pelestarian Sumberdaya Pesisir Dan Perairan Umum	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pengembangan Sentra Perikanan Dan Penguatan Kelembagaan Usaha	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Peternakan
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Konsservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian, Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas	Program Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
Aspek III : Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kabupaten Garut 2025

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis,

pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Garut, yaitu sebagai berikut:

A. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Ekonomi yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, antara lain :

1. Kawasan Perkotaan Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan yang harus dilakukan berupa sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar dan penyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan difokuskan pada :
   1) Penataan Wilayah Perkotaan Garut;
   2) Pelapisan hotmix ruas jalan perkotaan;
   3) Pembangunan Jalan By Pass Tahap II;
   4) Perencanaan pembangunan terminal tipe A perkotaan kota Garut;
   5) Penanganan pengolahan limbah industri kulit;
   6) Peningkatan penanganan pengelolaan PJU;
   7) Rehabilitasi drainase perkotaan;
   8) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Lingkar Cipanas dan Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
   9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Olahraga (SOR);
   10) Pembangunan dan Pengembangan Art Centre;
   11) Pengembangan Islamic Centre;
   12) Peningkatan Rumah Sakit dr. Slamet menjadi Tipe B Pendidikan;
   13) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
   14) Pengembangan industri kreatif;

15) Perencanaan pembangunan kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan sarana fasilitas terpadu Pemerintah Kabupaten Garut;

16) Pembangunan jalan alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit;

17) Pengembangan destinasi wisata Situ Bagendit;

2. Kawasan Koridor Kadungora - Leles – Garut, dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa kawasan transisi antara kegiatan perekonomian di Kota Bandung dan perkotaan Garut, berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional, dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :

   1) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;

   2) Pembangunan Jalan Alternatif Kadungora-Leles;

   3) Pembangunan akses wisata Jalan alternatif Situ Cangkuang-Leles;

   4) Pengembangan kawasan agrowisata desa Haruman Kecamatan Kadungora

   5) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;

   6) Pengembangan industri kreatif;

3. Kawasan Perbatasan Bagian Utara (Balubur Limbangan - Malangbong), dengan kriteria sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi cepat tumbuh. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Tasikmalaya yang akan mendapatkan pengaruh dari pembangunan jalan tol Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar dan berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu dan Malangbong. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian utara difokuskan pada :

   1) Perencanaan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Industri terpadu;

   2) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;

   3) Pembangunan jaringan irigasi Leuwigoong;

   4) Pembangunan jalan alternatif Garut – Cibatu;

   5) Revitalisasi dan optimalisasi gedung trade centre di Bl. Limbangan;

6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
8) Pengembangan industri kreatif;
9) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
10) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Utara;
11) Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata Barudua Kecamatan Malangbong;
12) Pengembangan kawasan perdesaan industri bambu Kecamatan Selaawi;
13) Pembangunan Rumah Sakit Garut Utara;
14) Pembangunan jalan alternatif Limbangan – Malangbong;
15) Pembangunan jalan alternatif kota Balubur Limbangan.

4. Kawasan Perbatasan Bagian Timur (Singajaya dan sekitarnya), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dipacu perkembangannya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga kawasan ini kurang terintegrasi dengan sistem wilayah. Mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy dan Cihurip. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian timur difokuskan pada:
   1) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
   2) Elektrifikasi rumah tangga;
   3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
   4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
   6) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
   7) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
   8) Pengembangan desa mandiri pangan;
   9) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
   10) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
   11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
   12) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
   13) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Banjarwangi.

5. Kawasan Perbatasan Bagian Barat (Caringin - Cisewu - Talegong), dengan kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Isu penanganan berupa sebagian besar memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di sekitarnya dan mengantisipasi terhadap potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berbatasan dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung dengan ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Caringin, Cisewu dan Talegong. Kawasan ini memiliki banyak limitasi untuk pengembangan wilayahnya. Topografi yang curam dengan kemiringan lereng rata-rata 25% hingga 40% menyebabkan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Kondisi ini perlu strategi khusus dalam memacu pertumbuhan wilayahnya. Pengembangan, pembangunan kawasan perbatasan bagian barat difokuskan pada :
   1) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
   2) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   3) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
   4) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
   5) Elektrifikasi rumah tangga;
   6) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
   7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
   8) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
   9) Pengembangan desa mandiri pangan;
   10) Pengembangan destinasi wisata pantai Rancabuaya;
   11) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Caringin.
6. Kawasan Agropolitan Cisurupan dan sekitarnya, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Ruang lingkup wilayah meliputi Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi dan Bayongbong. Pengembangan, pembangunan kawasan Cisurupan dan sekitarnya difokuskan pada :
   1) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   2) Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta konservasi sumberdaya air;
   3) Elektrifikasi rumah tangga;

4) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
5) Pengembangan industri kreatif;
6) Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
7) Pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Cisurupan dan sekitarnya;
8) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
9) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
10) Pengembangan desa mandiri pangan;
11) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan
12) Pengembangan Kampung Domba Indonesia (KDI) di Kecamatan Cikajang;
13) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut, penangkaran benih kentang dan padi ketan;
14) Pengembangan komoditas unggulan jeruk Garut;
15) Peningkatan akses Jalan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Darajat;

7. Kawasan Minapolitan, dengan kriteria sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Isu penanganan berupa sektor unggulan minapolitan air tawar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Tarogong Kaler, Sukaweining, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada:
    1) Pembangunan akses Jalan Alternatif Garut Kota-Karangpawitan-Sucinaraja-Wanaraja-Pangatikan;
    2) Pembangunan Jalan Penghubung Kecamatan Karangpawitan-Banyuresmi;
    3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung;
    4) Pembangunan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;
    5) Pengembangan desa mandiri pangan;
    6) Pengembangan minapolitan di Kecamatan Tarogong Kaler dan daerah sekitarnya;
    7) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
    8) Pengembangan industri kreatif;

8. Kawasan Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan, dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian Selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Isu penanganan berupa dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan perlu sinergitas infrastruktur. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Pakenjeng, Mekarmukti, Bungbulang, dan Caringin. Berpengaruh terhadap perkembangan wilayah koridornya termasuk Kawasan Garut bagian selatan dengan dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Pengembangan, pembangunan kawasan ini difokuskan pada :
   1) Perencanaan Pembangunan TPA Wilayah Pameungpeuk;
   2) Peningkatan akses Jalan Bungbulang – Cijayana dan Bungbulang – Sukarame;
   3) Peningkatan akses jalan penghubung antar kecamatan;
   4) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Perdesaan;
   5) Penataan Akses Pintu Gerbang Kabupaten Garut;
   6) Peningkatan produksi hasil laut melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan areal tangkap;
   7) Pembangunan pasar desa perbatasan Kabupaten Garut;
   8) Pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah;
   9) Pengembangan komoditas unggulan perkebunan;
   10) Pembangunan sentra industri dan kawasan Peternakan;
   11) Pengembangan *village breeding centre* di Garut Selatan;
   12) Pengembangan kawasan destinasi wisata pantai Garut Selatan.

B. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

   Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Garut, adalah :

   1) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Dukuh. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.
   2) Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Pulo Cangkuang. Kriteria sebagai Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya dan yang memberikan perlindungan terhadap

keanekaragaman budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya.

C. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut, adalah Kawasan Wisata Cipanas, dengan kriteria sebagai kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian dan kawasan rawan bencana alam. Isu penanganan yaitu meningkatkan potensi objek wisata alam yaitu pemandian air panas dan Taman Wisata Alam sehingga menjadi potensi kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata, dan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan Wisata Cipanas di Kecamatan Tarogong Kaler, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten. Kawasan ini memiliki potensi untuk cepat berkembang dikarenakan memiliki potensi alam sebagai objek wisata alam yaitu pemandian air panas, potensi kawasan wisata khas Cipanas, potensi kawasan wisata agro dan potensi kawasan wisata alam lainnya.

Gambar 4.9 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Garut

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara umum arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Garut berdasarkan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
I.	Aspek Sosial	
	1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Seluruh Kabupaten/Kota
	2) Transformasi layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital;	Seluruh Kabupaten/Kota
	3) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah;	Seluruh Kabupaten/Kota
	4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar;	Seluruh Kabupaten/Kota
	5) Peningkatan minat baca masyarakat;	Seluruh Kabupaten/Kota
	6) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah;	Seluruh Kabupaten/Kota
	7) Transformasi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital	Seluruh Kabupaten/Kota
	8) Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan	Seluruh Kabupaten/Kota
	9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja	Seluruh Kabupaten/Kota
	10) Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif	Seluruh Kabupaten/Kota
	11) Percepatan Penurunan Stunting Dalam Mencapai Jabar Zero New Stunting	Seluruh Kabupaten/Kota
	12) Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK	Seluruh Kabupaten/Kota
	13) Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif	Seluruh Kabupaten/Kota
	14) Penguatan Pembiayaan Kesehatan	Seluruh Kabupaten/Kota
	5) Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	16) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Seluruh Kabupaten/Kota
	17) Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Seluruh Kabupaten/Kota
	18) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Seluruh Kabupaten/Kota

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
	19) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Seluruh Kabupaten/Kota
	20) Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat	Seluruh Kabupaten/Kota
	21) Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi	Seluruh Kabupaten/Kota
	22) Perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu	Seluruh Kabupaten/Kota
	23)Pembangunan pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat	Seluruh Kabupaten/Kota
	24) Percepatan penurunan stunting	Seluruh Kabupaten/Kota
	25) Optimasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup	Seluruh Kabupaten/Kota
	26) Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda	Seluruh Kabupaten/Kota
	27) Pengendalian pertumbuhan penduduk	Seluruh Kabupaten/Kota
	28) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	Seluruh Kabupaten/Kota
	29) Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru	Seluruh Kabupaten/Kota
	30) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seluruh Kabupaten/Kota
	31) Reformasi Perlindungan Jaminan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kabupaten/Kota
	32) Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	33) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Seluruh Kabupaten/Kota
	34) Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	Seluruh Kabupaten/Kota
	35) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa	Seluruh Kabupaten/Kota

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
II.	Aspek Ekonomi	
	1) Pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra/klaster produksi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Kabupaten Purwakarta
		Kabupaten Subang
		Kabupaten Karawang
		Kabupaten Bogor
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Majalengka
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kabupaten Ciamis
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kota Sukabumi
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
		Kabupaten Sumedang
	2) Pengelolaan konservasi kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan secara terpadu	Kabupaten Subang
		Kabupaten Cianjur
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
	3) Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Kabupaten Purwakarta
		Kabupaten Subang
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Majalengka
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Tasikmalaya

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Kabupaten Ciamis
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
		Kabupaten Bandung Barat
		Kabupaten Sumedang
	4) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM pertanian	Kabupaten Subang
		Kabupaten Cianjur
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Majalengka
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Tasikmalaya
		Kabupaten Ciamis
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
		Kabupaten Sumedang
	5) Meningkatkan cakupan dan pelayanan infrastruktur irigasi, khususnya pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Kabupaten Purwakarta
		Kabupaten Cianjur
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Majalengka
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Tasikmalaya
		Kabupaten Ciamis
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kabupaten Bandung Barat

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Kabupaten Sumedang
	6) Memperbaiki Tata Kelola Pangan dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan	Kabupaten Subang
		Kabupaten Karawang
		Kabupaten Cianjur
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Tasikmalaya
		Kabupaten Ciamis
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kabupaten Sumedang
	7) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting	Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
	8) Peningkatan kompetensi kewirausahaan pada KUMKM di Jawa Barat	Kabupaten Subang Kota Bogor
		Kota Bekasi
		Kabupaten Garut
		Kabupaten Tasikmalaya
		Kota Tasikmalaya
		Kabupaten Pangandaran
		Kota Sukabumi
		Kabupaten Sukabumi
		Kota Bandung
		Kabupaten Bandung
		Kota Cimahi
	9) Pengembangan dan pengelolaan daya Tarik wisata, atraksi wisata dan amenitas wisata terintegrasi berskala Nasional dan Internasional	Kabupaten Purwakarta
		Kabupaten Subang
		Kabupaten Bogor
		Kota Cirebon

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Kabupaten Majalengka
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Garut
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kabupaten Sukabumi
		Kabupaten Bandung
		Kabupaten Bandung Barat
		Kabupaten Sumedang
	10) Pengembangan kemitraan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Kabupaten Subang
		Kabupaten Bekasi
		Kabupaten Cianjur
		Kota Cirebon
		Kabupaten Garut
		Kota Tasikmalaya
		Kota Banjar
		Kabupaten Bandung Barat
	11) Penciptaan daya saing produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Bogor
		Kota Depok
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Garut
		Kota Tasikmalaya
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kota Sukabumi
		Kota Bandung
		Kabupaten Bandung
		Kota Cimahi
	12) Peningkatan kapasitas harmonisasi hubungan industrial	Kabupaten Bogor
		Kota Depok
		Kabupaten Cirebon
		Kabupaten Garut
		Kota Tasikmalaya

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		Kota Banjar
		Kabupaten Pangandaran
		Kota Sukabumi
		Kota Bandung
		Kabupaten Bandung
		Kota Cimahi
	13) Pengembangan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Industri dan UMKM dalam rangka penempatan tenaga kerja	Kabupaten Subang
		Kabupaten Karawang
		Kota Bogor
		Kabupaten Bekasi
		Kabupaten Cianjur
		Kabupaten Indramayu
		Kabupaten Garut
		Kota Sukabumi
III.	Aspek Infrastruktur	
	1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan terutama di kawasan utara dan selatan Jawa Barat yang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan yang memadai	Seluruh Kabupaten Kota
	2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan yang berorientasi penanganan di hulu melalui pengembangan TPS3R dan TPST;	Seluruh Kabupaten Kota
	3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah di kawasan permukiman dan kawasan industri	Seluruh Kabupaten Kota
	4) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM pertanian	6 Wilayah Sungai
	5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan	Seluruh Kabupaten Kota
	6) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian melalui pembangunan embung/situ dan pengelolaan DAS	Seluruh Kabupaten Kota / 6 Wilayah Sungai
	7) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Citarum, Cilamaya dan Kali Bekasi	1. Kota Bandung
		2. Kota Cimahi

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		3. Kab Bandung
		4. Kab Bandung Barat
		5. Kab Sumedang
		6. Kabupaten Garut
		7. Kabupaten Subang
		8. Kabupaten Cianjur
		9. Kabupaten Purwakarta
		10. Kabupaten Karawang
		11. Kabupaten Bekasi
		12. Kab Bogor
		13. Kabupaten Sukabumi
		14. Kota Bekasi
		15. Kota Bogor
		16. Kota Depok
	8) Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah	Seluruh Kabupaten Kota
	9) Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup	kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup
		1. Kota Bandung, Kota Cimahi
		2. Kab Bandung
		3. Kab Bandung Barat
		4. Kab Sumedang
		5. Kabupaten Garut
		6. Kabupaten Subang
		7. Kabupaten Cianjur
		8. Kabupaten Purwakarta
		9. Kabupaten Karawang
		10. Kabupaten Bekasi 11. Kab Bogor
		12. Kab Sukabumi 13. Kota Bekasi
		14. Kota Bogor
		15. Kota Depok
	10) Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Kota Bandung

No.	Arah Kebijakan	Kabupaten/Kota
		2. Kota Cimahi
		3. Kab Bandung
		4. Kab Bandung Barat
		5. Kab Sumedang
		6. Kabupaten Garut
		7. Kabupaten Subang
		8. Kabupaten Cianjur
		9. Kabupaten Purwakarta
		10. Kabupaten Karawang
		11. Kabupaten Bekasi
		12. Kab Bogor
		13. Kab Sukabumi
		14. Kota Bekasi
		15. Kota Bogor
		16. Kota Depok
	11) Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis	1. Kabupaten Bogor
		2. Kabupaten Bekasi
		3. Kabupaten Cianjur
		4. Kabupaten Bandung
		5. Kabupaten Bandung Barat
		6. Kabupaten Sumedang
		7. Kabupaten Karawang
		8. Kabupaten Sukabumi
		9. Kabupaten Cirebon
		10. Kabupaten Majalengka
		11. Kabupaten Indramayu
		12. Kabupaten Subang
		13. Kabupaten Purwakarta
		14. Kabupaten Kuningan
		15. Kabupaten Garut
		16. Kabupaten Tasikmalaya
		17. Kabupaten Ciamis
		18. Kabupaten Pangandaran

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 , diolah bappeda 2025

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pendidikan :
   1) Manajemen Pendidikan;
   2) Kurikulum;
   3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
   4) Perizinan Pendidikan ;
   5) Bahasa dan Sastra.

   Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:

   a) pendidikan anak usia dini;
   b) pendidikan dasar; dan
   c) pendidikan kesetaraan.
2. Urusan Bidang Kesehatan
   1) Upaya Kesehatan;
   2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
   3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
   4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten terdiri atas:

   a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d) pelayanan kesehatan balita;

e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sumber Daya Air (SDA);

2) Air Minum;

3) Persampahan;

4) Air Limbah;

5) Drainase;

6) Permukiman;

7) Bangunan Gedung;

8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

9) Jalan;

10) Jasa Konstruksi;

11) Penataan Ruang.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten terdiri atas:

a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1) Perumahan;

2) Kawasan Permukiman;

3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);

5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan

b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

5. Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

1) Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2) Bencana;

3) Kebakaran;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

b. pelayanan informasi rawan bencana;

c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;

e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Bidang Sosial

1) Pemberdayaan Sosial;

2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

3) Rehabilitasi Sosial;

4) Perlindungan dan Jaminan Sosial;

5) Penanganan Bencana;

6) Taman Makam Pahlawan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.5 Inovasi Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Garut menerapkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial untuk mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik ditengah terbatasnya kapasitas rill keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan holistik dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-*stakeholder* dan multi-SKPD berdasarkan tematik fokus daerah. Berikut merupakan ringkasan uraian implementasi kegiatan inovasi SKPD yang telah berjalan pada tahun 2024.

Tabel 4.20 Implementasi Kegiatan Inovasi Tahun 2024

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
1	*Make Your Own Packaging Design Through AI* (MY OPIA) Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro di Kabupaten Garut	2024
2	Akselerasi dan Optimalisasi Capaian Target Kinerja Perekaman KTP-EL Pemula Melalui Jemput Rekam Pemula Anak di Sekolah (JERAPAH) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut	2024
3	Sistem Usaha Perikanan Mandiri Melalui Budidaya Ikan di Perairan Umum (SERIKANDI-BIRU)	2024
4	Sentra IKM Olahan Bambu (SILABU), Strategi Kolaborasi Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	2024
5	Strategi Pemasaran Pariwisata Melalui Portal Promosi Event Pariwisata lestgogarut.com di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut)	2024
6	Strategi Pemasaran Produk Lokal melalui Program Wisata Industri "SULASTRI" di Kabupaten Garut	2024
7	Optimalisasi Pelayanan Publik Ketenagakerjaan melalu Sistem Informasi Jasa On Line Tenaga Kerja Mandiri dan Terampil (Si Jon Mantap)	2024
8	Transformasi Sistem Informasi Pencatatan Retribusi Sampah Daerah (SIPERDA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut	2024
9	"Smart Girls" Strategi Kolaborasi Pencegahan New Born Stunting di Kabupaten Garut	2024
10	RAKSA PADUKA BERGRADASI (Gerakan Desa Sadar Adminstrasi Kependudukan melalui Gerai Administrasi Kependudukan Desa Terintegrasi dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
11	GERBANG RAJA (Strategi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera)	2023
12	GERBANG CAHAYAKU (Gerakan Bangun Cegah Kawasan Kumuh) Merupakan salah satu program unggulan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut berupa penataan kawasan permukiman di perkotaan dengan tujuan memelihara, menjaga dan mencegah suatu kawasan permukiman terindikasi kumuh agar tidak masuk kedalam kategori kumuh	2023
13	PANDUMAS (Pelayanan dan Pengaduan Permasalahan Sosial) Inovasi percepatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui layanan media sosial dan aplikasi chat.	2023
14	SILAT Peningkatan Kualitas Pengelolaan Alat Kesehatan Melalui (Sistem Informasi Pengelolaan Alat Kesehatan ada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut)	2023
15	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Melalui Media Website di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut	2023
16	PUBLISH BABY Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	2023
17	SIMETRIS (Optimalisasi Monitoring Evaluasi Terpadu Program Strategis) Sebagai Upaya Pengendalian Dan Evaluasi Pada Bidang PPEPD BAPPEDA Kabupaten Garut	2023
18	Peningkatan Akurasi Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Melalui Penyusunan Pedoman Jaminan Kesehatan di Kabupaten Garut	2023
19	DIGJAYA Optimalisasi Pengolahan Dan Penyajian Data Administrasi Kependudukan	2023
20	Optimalisasi Penyebarluasan Promosi Wisata Melalui Pengembangan Website di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut	2023
21	Upaya Peningkatan Efektifitas Pelaporan Melalui Pedoman Standarisasi Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Garut	2023
22	TERAS PANGAN Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Melalui Gerakan Tertata Asri Pangan Di Pekarangan (TERAS PANGAN) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut	2023
23	KATAPEL JUPEL Pemajuan Kebudayaan Lokal Melalui Peningkatan Juru Pelihara (KATAPEL JUPEL) di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut	2023
24	Peningkatan Tata Kelola Keuangan BLUD Melalui Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Yang Terintegrasi Pada RSUD dr. Slamet Garut	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
25	Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dengan Pola Kemitraan Kelembagaan Di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut	2023
26	SI LADU KETAN Peningkatan Paten Melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SI LADU KETAN) Di Kantor Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut	2023
27	Peningkatan Tata Kelola Perencanaan Dan Pelaporan Pembangunan Desa Melalui Forum Koordinasi Terpadu Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
28	SIAMPEL Peningkatan Layanan Sanitasi Melalui Sistem Informasi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SIAMPEL) Di Kabupaten Garut	2023
29	OPPABOLING Optimalisasi Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Kolaborasi Pelayanan Keliling (OPPABOLING) Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut	2023
30	Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Melalui Pola Kemitraan BUMDES Dan Komunitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Desa Di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut	2023
31	SIMADU MPP Sistem Informasi Manajemen Terpadu Mal Pelayanan Publik Digital (SIMADU-MPP)	2023
32	SIKOPI GARUT Optimalisasi Penilaian Kinerja Organisasi Melalui Sistem Informasi Kinerja Organisasi Dan Penilaian Instansi Garut (SIKOPI-GARUT)	2023
33	SERASI Pengembangan Sinergitas Ekonomi Kreatif Berbasis Kolaborasi (SERASI) Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut	2023
34	Strategi Penurunan Potensi Konflik Sosial Melalui Peta Kerawanan Potensi Konflik Sosial Di Kabupaten Garut	2023
35	KONTRAK HYBRID Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Melalui KONTRAK HYBRID Pada Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Garut	2023
36	SIUJI PAMAN Peningkatan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Pengelolaan Pelayanan SIUJI PAMAN (Sosialisasi, Edukasi Dan Pengujian Pangan Aman) Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut	2023
37	Pengelolaan Informasi Kinerja Pelayanan Publik Melalui Jajak Pendapat Online Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut	2023
38	RUMAH EKSPOR Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah Melalui Coaching Clinic "RUMAH EKSPOR" Di Kabupaten Garut	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
39	SATRIA Peningkatan Mutu Tata Kelola Sarana Dan Prasarana Sekolah Melalui Sistem Aplikasi Data Sarana Dan Prasarana Pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SATRIA) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	2023
40	PEPELING Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Melalui Mobil Penyuluhan Pertanian Keliling (PEPELING) Di Kabupaten Garut	2023
41	GASPOLS Transformasi Digital Melalui Garut Single Portal Online Service (GASPOLS)	2023
42	PORDA KARPAW Efektivitas Penyusunan Pelaporan Data Melalui Portal Data Karangpawitan (PORDA KARPAW) Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut	2023
43	PODCAST RUANG BINCANG ONLINE LITERASI RUBICON LITE Pengembangan Layanan Perpustakaan Melalui "PODCAST RUANG BINCANG ONLINE LITERASI RUBICON LITE" Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Garut	2023
44	Pelestarian Sumber Daya Genetik Ternak Domba Garut Melalui Inkubasi Peternakan Berbasis Kawasan Di Kabupaten Garut	2023
45	TANGKAS Optimalisasi Pemberdayaan Kelembagaan Anak Dengan Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Anak Di Sekolah (TANGKAS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut	2023
46	Manajemen Data Perencanaan Melalui Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Rumah Sakit (RKRS) Pada RSUD dr. Slamet Garut	2023
47	SI PRIMA Peningkatan Informasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Pelayanan Prima (SI PRIMA) Pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut	2023
48	SINTA Peningkatan Tata Kelola Administrasi Rapat Kerja DPRD Melalui Sistem Informasi Rapat Kerja (SINTA)	2023
49	Optimalisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan Berbasis Partisipatif Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut	2023
50	Akselerasi Pengurangan Risiko Bencana Melalui Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut	2023
51	E-KLIWAS Strategi Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Melalui E-KLIWAS (Elektronik Klinik Pengawasan) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
52	JAWARA DESA Inovasi Peningkatan daya saing usaha mikro melalui inkubasi bisnis di tingkat desa	2023
53	GARUDA (Garut Satu Data) Portal data terbuka yang menyediakan data akurat dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Garut	2023
54	SIDATING Optimalisasi Pelaporan Melalui Sistem Informasi Data Stunting (Sidating) Di Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut	2023
55	Optimalisasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Bersumber Dari Laporan Pengaduan Masyarakat Di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
56	TESIS WEB Optimalisasi Barang Milik Daerah Melalui Teknologi Berbasis Situs Web (Tesis Web) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Garut	2023
57	SAWARGA Peningkatan Penanganan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Aplikasi Sapa Warga (Sawarga) Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
58	SIGITALISASI Updating Sistem Pelporan Data Balita Stunting (Sigitalisasi) Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
59	SISPEL Pengembangan Sistem Pelaporan (Bang Sispel) data Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
60	Pembuatan Bank Data Dalam Rangka Peningkatan Akurasi Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Melalui Google Drive Di Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut	2023
61	Optimalisasi Kinerja Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut	2023
62	SIPANDU JAYA Sistem Pelaporan Posyandu Terpadu (SIPANDU JAYA) di Wilayah Kerja Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut	2023
63	Optimalisasi Pelayanan UPT Diskannak Wilayah VIII Melalui Sosialisasi Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Kepada Kelompok – Kelompok Ternak Di Wilayah Kecamatan Cikelet	2023
64	Penyediaan Media Informasi Harga Ternak Domba di Pasar Hewan Bayongbong	2023
65	TIMER PEPENDE Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Tim Terpadu (Timer Pependе) di Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut	2023
66	ANDONG KERATON Optimalisasi Pelayanan Pengajuan Berkala Kendaraan Bermotor Melalui Andong Keraton (Angket Pendorong Kepuasan Masyarakat Secara Online) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
67	SIKEREN (SIKEREN) Sistem Informasi Keluarga Berencana	2023
68	OPEN GOPE Optimalisasi Pelaporan Kegiatan Pertanian melalui Model Google Workspace Drive (Open Gope) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Wilayah XIII Kabupaten Garut	2023
69	Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan SOP TPKD Sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan Daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2023
70	PENDAK Penandatanganan Dokumen Administrasi Kepegawaian Secara Elektronik (PENDAK)	2023
71	Penyediaan Data Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	2023
72	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Standart Operational Procedure (SOP) Perencanaan, Penganggaran Hibah dan Bansos Serta Modul Perencanaan dan Penganggaran Hibah dan Bansos pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	2023
73	Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota	2023
74	SAROJA Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Lingkungan Melalui Bank Sampah Regol Sejahtera (SAROJA) di Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota	2023
75	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berbasis Sistem Aplikasi pada Kecamatan Bl. Limbangan Kab. Garut	2023
76	Digitalisasi Pengelolaan Data Kerusakan Jalan, Ruas Jalan Kiarakohok-Linggamanik di UPT PUPR Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut	2023
77	SIPEDOC II Optimalisasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Irigasi di Daerah Irigasi Citameng II (SIPEDOC II)	2023
78	SIPIDAH Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sistem Pendaftaran Pajak Daerah (SIPDAH) pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Garut	2023
79	Mengeksplorasi Potensi Informasi Berbasis Digital dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tarogong kaler	2023
80	Optimalisasi Administrasi Tata Kelola Pasar Wisata Samarang Kepala UPT Disperindag Esdm Wil. XIII	2023
81	Peningkatan Pembinaan Terhadap Pelaku Ikm di UPT Wilayah I Cilawu Kabupaten Garut	2023

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
82	SISIL Penggunaan sistem informasi laboratorium (SISIL) sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di laboratorium kesehatan dan kalibrasi Kabupaten Garut	2023
83	Pelajar Sadar Keselamatan Berlalu Lintas (Pesak Lalin) di UPTD Wilayah III Dinas Perhubungan Kabupaten Garut	2023
84	ZI BERTEMAN Pencegahan Kecelakaan Diperlintasan Perkeretaapian Melalui Sosialisasi Zero Accident Berhenti Tengok Kanan Kiri Aman (ZI BERTEMAN) Dinas Perhubunan Kabupaten Garut	2023
85	SIDATUK Sistem Informasi Data Kependudukan Kersamanah "Sidatuk" di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut	2023
86	SI TANDUK GAGAH Sistem Informasi Pendataan Penduduk Gagal Sekolah (Si Tanduk Gagah) di Kabupaten Garut	2023
87	AJUDAN Digitalisasi Arsip Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut - "AJUDAN" (Aplikasi Anjungan Data Kepegawaian)	2023
88	DIGI PENA Digitalisasi pelayanan kelurahan Karangmulya (DIGI PENA)	2023
89	Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian berbasis Website di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.	2023
90	Peningkatan Layanan Informasi Publik pada UPT Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut	2023
91	DID Digitalisasi Display Informasi Diskominfo (DID) Agenda Kegiatan dan Data Kepegawaian Berbasis Web di Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut	2023
92	SIRDUK Peningkatan Efektifitas Pelaporan Data Penduduk Melalui Sistem Online "Sirduk" (Sistem Rekapitulasi Penduduk Online) di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut	2023
93	SI PERMANA METAL Peningkatan Sistem Pelaporan Masalah Bencana Melalui Media Digital (Si Permana Metal) di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut	2023
94	Strategi kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Pentahelix Dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah Sebuah Strategi kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Pendekatan Pentahelix Dalam Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah	2022

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
95	SIBINWAS PAKDE Sebuah Program Peningkatan Pengawasan Keuangan Desa Melalui Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SIBINWAS PAKDE) di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut	2022
96	ASN SIGAP Sebuah upaya membangun Akuntabilitas Kinerja Melalui Aplikasi "ASN SIGAP" Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garui	022
97	SESENTIL Sebuah upaya Akselerasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Asistensi Sosial yang Berkualitas dan Terintegrasi (SESENTIL) di Social Centre	2022
98	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri dan Berkelanjutan Upaya peningkatan Pengelolaan Irigasi Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri dan Berkelanjutan	2022
99	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Melalui Formula 3 in 1 (Sirib, Rabwal, dan PKBK) Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Melalui Formula 3 in 1 (Sirib, Rabwal, dan PKBK)	2022
100	Sikawat Merupakan upaya peningkayan Optimalisasi Pelayanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Sikawat di Kabupaten Garut	2022
101	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Melalui Kolaborasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Perdesaan Merupakan upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui kolaborasi pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Perdesaan	2022
102	SIDAKEP Sebuah upaya dalam Optimalisasi Proses Pengendalian Program Kegiatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) Melalui Sistem Pengendalian Keproyekan «SIDAKEP* di Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman	2022
103	STOP KABUR Merupakan sebuah Strategi Terpadu dalam Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur (STOP KABUR) Melalui Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Digital	2022
104	SPBE Merupakan Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Pengembangan Command Centre	2022
105	Pembuatan Mesin Pengaduk Dodol Dengan Menggunakan Sistem Double Jacket Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Dodol Pembuatan Mesin Pengaduk Dodol Dengan Menggunakan Sistem Double Jacket Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Dodol	2022
106	GENTRA KARYA Merupakan sebuah Strategi Kolaborasi Penurunan Angka Pengangguran melalui Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (GENTRA KARYA) di Kabupaten Garut (Kolaborasi Pentahelix)	2022
107	Manajemen Pengelolaan Obat Bagi Peserta BPJS Berbasis Teknologi Informasi untuk Menunjang Pelayanan One Stop Shopping di RSUD dr. Slamet Garut	2022

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
108	Program Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Berbasis Teknologi Informasi Merupakan Program Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Berbasis Teknologi Informasi	2022
109	Akselerasi Farmasi Berbasis Antar Obat dan Kolaborasi Stakeholder	2022
110	TOSS Stunting Merupakan Upaya pembuktian prevalensi Stunting dari hasil SSGI Th 2021 Kab. Garut tidak setinggi hasil tersebut. disusun langkah upaya strategis yg di ACC pimpinan mendapatkan dukungan berupa kebijakan dan anggaran untuk penanganan secara langsung maupun tidak langsung. Hingga mendapat apresiasi semua pihak terutma tk.Prov dan Tk. Pusat	2022
111	"MELANI" Merupakan penguatan program rutin yang telah dilaksanakan dikesehatan ibu dan anak (KIA) kab. Garut. Dengan harapan semua pihak terkait lintas program maupun lintas sektor lebih mengetahui program yang mendukung terjadinya kasus kematian ibu, bayi dan juga terjadinya prevalensi stunting. Sehingga dukungan kebijakan dan dukungan program stakeholder terkait akan lebih optimal. Sehingga kasus kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting tidak terjadi	2022
112	PAJERO Program Inovasi PAJERO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput Ka Rorompok) yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka setiap pemohon mendapatkan dokumen Kependudukan melalui pelayanan langsung mendatangi kerumah warga yang rentan seperti Disabilitas, orang sakit, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk mendapatkan penerbitan dokumen Kependudukan yang terdiri dari Penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik dan Perekaman / Iris mata.	2022
113	T-REKK Program Inovasi T-REKK (Tim Reaksi Cepat Kagawatdaruratan Administrasi Kependudukan) yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka setiap pemohon mendapatkan dokumen Kependudukan melalui pelayanan langsung mendatangi kerumah sakit yang merawat pasien dimana identitas kependudukannya belum valid atau belum terdaftar sebagai penduduk untuk mendapatkan pelayanan Perekaman / Iris mata dan penerbitan dokumen Kependudukan yang terdiri dari Penerbitan Kartu Keluarga, dan KTP elektronik.	2022
114	INFOLARAS Optimalisasi Kinerja Penangagulangan Bencana Melalui Sistem Informasi Terpadu Selaras (INFOLARAS)	2022
115	Optimalisasi Penanganan Sanitasi Melalui Pembentukan Kewirausahaan Sanitasi Secara Pentahelix di Kecamatan Pasirwangi	2021
116	SAPAKAT MALIRE NU MISKIN Merupakan sebuah Strategi Multi Stakeholder Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Melalui Penyediaan Lavanan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Masvarakat Miskin	2021

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
117	DEWA MEMBUMI (Pengembangan Desa Wisata melalui Pemetaan Potensi dan Kolaborasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Garut) Tujuan kegiatan inovasi yaitu mengembangkan Desa Wisata yang berkelanjutan dan tematik dalam mendukung Pemulihan Ekonomi dengan sasaran mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa wisata. Strategi yang digunakan yaitu: 1. Memetakan dan menilai potensi Desa Wisata berdasarkan 4A+P (Attraction, Accessibility, Amenity, Ancilliary, Promotion), Ketentuan Pola Ruang dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten 2. Membangun kolaborasi dan komitmen bersama perencanaan penganggaran pengembangan Desa Wisata Ruang lingkup inovasi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan desa wisata dengan mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan melalui pemetaan dan penilaian potensi desa wisata serta kolaborasi multisektor.	2021
118	DASI PAK RT' Merupakan sebuah Optimalisasi Pelaporan Pajak Daerah Melalui Dashboard Realisasi Pajak Daerah Real Time	2021
119	SIMBOL Optimalisasi Program Peningkatan Pendapatan ASI Daeran Melalui Sistem Online (SIMBOL) pada Badan Pendapatan Daerahkabupaten Garut	2021
120	PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) Merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui konsep Small/Micro Business Incubator (SBI) berbasis pemberdayaan (Enpowerment). Merupakan upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak pandemik Covid 19. Kelompok yang menjadi sasaran adalah kelompok wanita nelayan yang masuk kategori masyarakat miskin atau terdampak covid 19. Kegiatan dilaksanakan melalui konsep Small Business Incubator dari mulai tahap pembentukan kelompok, pendampingan, pelatihan serta pemberian bantuan modal usaha. Dari kegiatan ini diharapkan terbentuk kelompok usaha pesisir yang terintegrasi yang diharapkan akan berdampak pada pengentasan kemiskitan sekaligus mendorong peningkatan produksi, diversifikasi dan nilai tambah usaha hasil perikanan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dengan target 1000 RTM di 7 kecamatan pesisir.	2021
121	Point Breeding Center (PBC)/ SERIKANDI PBC merupakan unit penyedia benih ikan mandiri yang disebar di titik-titik tertentu di kawasan perairan danau atau sungai dalam rangka menjamin kontinuitas produksi ikan. Didalam unit PBC ini dikembangkan Sistem Restocking Ikan Mandiri (Serikandi) dimana induk ikan dipelihara dalam unit spawning ground untuk menghasilkan benih. Setelah dipelihara dalam unit nursery ground, benih yang sudah layak tebar kemudian dilepas ke perairan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan pada kawasan Perairan Umum Daratan (PUD) sehingga stock ikan akan terus terjaga keberadaannya tanpa perlu ada penebaran benih dari luar. Selain mendorong produksi, inovasi ini juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan PUD dan masyarakat di sekitar perairan.	2021

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
122	Rumpon Milenial (Rumpon Wisata Ramah Lingkungan) Rumpon Ramah Lingkungan merupakan inovasi yang digagas dalam rangka menata kawasan perairan Situ Bagendit. Tujuannya untuk mensinergikan usaha perikanan tangkap dengan pembangunan sektor pariwisata. Dilakukan dengan memperkenalkan masyarakat dengan rumpon yang lebih inovatif dan ramah lingkungan sebagai pengganti rumpon tradisional. Dengan begitu diharapkan nelayan masih bisa menikmati hasil tangkapan tanpa mengganggu keindahan kawasan wisata. Rumpon yang akan diperkenalkan pada masyarakat adalah rumpon yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak menganggu pemandangan dan tidak mengganggu aktivitas lalulintas perahu/rakit para wisatawan. Rumpon ini juga sekaligus bisa memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan dari sektor pariwisata. Kajian dilakukan bekerjasama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pangandaran.	2021
123	TPI Mobile -Aplikasi Pelelangan Ikan Online pertama di Indonesia Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan UPT TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melalui penerapan inovasi pelelangan ikan berbasis aplikasi. Bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan TPI dalam rangka meningkatkan harga dan nilai tambah ikan di tingkat nelayan. Kegiatan dilaksanakan melalui pengembangan Aplikasi pelelangan Ikan online dengan nama TPI Mobile yang akan menjadi aplikasi pelelangan ikan pertama di Indonesia. Melalui aplikasi ini, para pebisnis dan masyarakat di seluruh Indonesia bisa membeli ikan asal Garut dengan mengikuti lelang dan bertransaksi secara online.	2021
124	Pokmaswas GO Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan sehingga capaian produksi perikanan tangkap bisa terus dipertahankan/ meningkat. Kegiatan dilakukan melalui penguatan Kelompok Masyarakat Swaraksa Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Pokmaswas). Dilaksanakan melalui bantuan sarana prasarana patroli serta pengembangan aplikasi pengawasan dan pelaporan online yang diberinama Pokmaswas-GO (Pokmaswas-Garut Online). Pokmaswas GO akan menjadi salah satu aplikasi pertama di Indonesia dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelaporan Pokmaswas yang akan hubungkan dengan sistem pelaporan pemerintah provinsi dan pusat.	2021
125	Pengembangan *Closed Loop* Bisnis Pertanian Pada Tahun 2021 Pilot Project (3 Ha). Kegiatan Closed Loop merupakan Pengembangan Kawasan Hortikultura secara Korporasi Petani mulai Hulu sampai dengan Hilir dengan sinergitas antar stake holder (Petani, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Perbankan. Tahap Pengembangan Kawasan Closed Loop (30 Ha) di Kecamatan Cigedug dan Duplikasi Kegiatan Closed Loop (50 Ha) di Kecamatan Cikajang. Sedangkan komoditas yang dikembangakan Cabai Besar, Cabai Rawit, Sawi Putih, Kol/Kubis, Tomat, Kentang.	2021

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
126	Membangun Sistem "Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani" (Komoditas Jagung) Pada Tahun 2021 Lokus Garut Selatan (Kec. Pakenjeng, Bungbulang, Cikelet dan Mekarmukti) seluas 2.850 Ha. Korporasi petani adalah Lembaga ekonomi petani yang berbadan hukum berbentuk koperasi, badan usaha milik petani, CV, PT, usaha dagang dengan sebahagian besar kepemilikan modalnya dari petani yang akan mengarah pada skala industri, distribusi, pemasaran dan permodalan, sehingga petani punya posisi tawar (bargaining position) atas produk yang dihasilkan. Tujuan : Penataan kelembagaan petani (kelompok tani/ Gapoktan) untuk keterpaduan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang efisien dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengutuhan system dan usaha agribisnis yang terintergasi, efisiensi system budidaya, pengolahan, peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani serta penguatan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.	2021
127	Sistem Informasi Pembangunan Keluarga secara nge LINK (SI BANGGA-LINK) Sebuah sistem informasi yang mengemas program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak yang nantinya bisa diakses oleh tingkat kecamatan dan desa secara nge link, agar memudahkan pemberian informasi program kepada sasaran.	2021
128	Akselerasi freshope *Garut Freshmarket* Akselerasi freshope Garut Freshmarket merupakan kegiatan memfasilitasi para petani produksi dengan pelaku usaha/ pasar seperti Ekspor, Hotel, Restoran, Catering, Pasar Online, dll. Dengan kepastian harga jelas. Pada Tahun 2020 Pembangunan Fisik Bangunan Freshope.Tahun 2021 Penataan Ruangan dan Taman/Halaman Bangunan Freshope. a. Mengoptimalkan pemasaran produk hasil pertanian baik langsung/temu mitra maupun menggunakan aplikasi pemasaran. b. Mengadakan bazar rutin untuk beberapa komoditas pada saat panen raya atau harga turun. Memasarkan produk hasil pertanian ke perumahan/kampung dengan kendaraan roda tiga/mobil atau bermitra dengan toko dan warung yang ada.	2020
129	Garut Edufarm Centre (GEC) GEC merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat generasi muda terhadap bidang pertanian sebagai upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas dengan regenerasi petani era 4.0 yang adaftif terhadap teknologi information and technology (IT) dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Garut Edufarm Center (GEC) memiliki peran penting dan strategis dalam menumbuh-kembangkan minat generasi muda terhadap pertanian dan regenerasi petani. Pertanian adalah sektor yang sangat potensial tetapi perlu ditunjang dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.	2020

No	Judul Inovasi dan Detail	Tahun Awal pelaksanaan
130	Pengembangan Klinik Industri "Klinik industri sebagai pusat konsultasi industri, workshop, R&D, dan inkubasi bisnis Pengadaan Co working space inkubasi bisnis untuk industri"	2020
131	Gerakan Pembangunan Keluarga Tangguh Peranan Poktan dalam intervensi Penurunan Stunting melalui Garapan Khusus	2020
132	Pengembangan Kreatifitas Remaja melalui Komunitas Remaja Berencana (KIRANA GARUT) Peranan KIRANA dalam upaya Penurunan Stunting melalui Penundaan Usia Perkawinan (PUP) 21-25 Tahun.	2020
133	Pembentukan Kampung Ramah Anak Dalam mewujudkan Kabupaten Garut Layak Anak salah satu inovasi adalah pembentukan kampung ramah anak yang tujuannya untuk membangun inisiatif pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan visi misi, kebijakan, program, kegiatan dan kelembagaan pembangunan yang peduli dan memihak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Pembentukan kampung ramah anak (KRA) masih dalam tahap sosialisasi ke kampung KB dan Lokasi P2WKSS, dalam tahap rencana pembentukan dan sosialisasi KRA tahun 2022 selain di Kampung KB dan Lokasi P2WKSS semuanya disesuaikan dengan kemampuan dukungan kegiatan tersebut walaupun target keseluruhan 442 Desa/Kelurahan	2020

Sumber: Bappeda 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sejak Januari 2025, Kabupaten Garut telah melakukan pergeseran APBD sebanyak 2 (dua kali dengan rincian materi perubahan penjabaran APBD I – II adalah sebagai berikut:

- Perubahan Penjabaran I (Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran tanggal 11 April 2025) :
  1. Penambahan Pendapatan Daerah bersumber dari DAK Nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
  2. Pengurangan Pendapatan Daerah dari Dana Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
  3. Penyesuaian Belanja Nonfisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  4. Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, serta Instruksi Bupati Garut Nomor 900.1.3.3/1092/BPKAD Tahun 2025 tentang Langkah-langkah Efisiensi Belanja SKPD;
  5. Penyesuaian pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.1/814/Keuda tanggal 25 Februari 2025;
  6. Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Surat Kepala Dinas PUPR Nomor 900.1.3/508/PUPR tanggal 4 Maret 2025 hal Permohonan Anggaran Penanganan Infrastruktur Terdampak Bencana Hidrometeorologi serta Surat Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Nomor 900/134/Disperkim tanggal 18 Maret 2025 hal Permohonan Anggaran Melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Perubahan Penjabaran II Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tanggal 16 Mei 2025 :
  1. Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  2. Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Perubahan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
  3. Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Perubahan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pergeseran APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 berikut.

Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan APBD dan Pergeseran APBD Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD	APBD Parsial I-II
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.671.796.147,00	700.671.796.147,00
4.1.1	Pajak Daerah	314.495.819.085,00	314.495.819.085,00
4.1.2	Retribusi Daerah	371.046.512.196,00	371.046.512.196,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.336.469.580,00	7.336.469.580,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.792.995.286,00	7.792.995.286,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.200.891.781.694,00	4.122.900.082.694,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.974.857.960.000,00	3.896.866.261.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	226.033.821.694,00	226.033.821.694,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.191.402.596,00	7.191.402.596,00
4.3.1	Pendapatan Hibah		

NO	URAIAN	APBD	APBD Parsial I-II
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.191.402.596,00	7.191.402.596,00
	Jumlah Pendapatan	4.908.754.980.437,00	4.830.763.281.437,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2025

Tabel 5.2
Belanja APBD dan Pergeseran APBD menurut Perangkat Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	APBD MURNI	Perubahan RKPD 2025
1	Dinas Pendidikan	1.962.957.441.473	1.947.456.348.895
2	Dinas Kesehatan	987.707.969.051	1.062.547.947.026
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	154.989.946.712	236.261.998.239
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	65.185.654.800	93.964.615.972
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.905.348.768	19.917.919.781
6	Dinas Pemadam Kebakaran	18.266.921.517	14.805.060.928
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.266.394.646	8.948.102.499
8	Dinas Sosial	27.010.888.667	39.454.943.409
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.534.174.850	12.271.147.099
10	Dinas Ketahanan Pangan	17.853.150.216	17.895.052.574
11	Dinas Lingkungan Hidup	44.934.441.276	52.141.489.826
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.884.376.557	15.141.395.643
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34.199.206.049	37.173.307.306
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.976.561.315	43.986.835.480
15	Dinas Perhubungan	51.292.767.507	59.816.065.817
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.172.710.213	16.479.539.207
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	14.236.320.018	17.875.030.943
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.597.343.274	8.939.265.915
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	51.065.365.893	55.352.240.547
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.860.424.610	16.546.658.137

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	APBD MURNI	Perubahan RKPD 2025
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	24.235.953.871	24.873.140.864
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.702.424.849	18.472.472.794
23	Dinas Pertanian	93.547.546.659	83.381.342.825
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	31.595.371.268	32.473.621.823
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	88.732.306.507	89.466.780.923
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	75.866.111.265	67.560.969.608
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.199.183.101	16.177.554.063
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	850.111.954.403	827.534.055.672
29	Badan Pendapatan Daerah	19.957.572.714	22.126.374.567
30	Badan Kepegawaian dan Diklat	18.811.343.133	18.332.029.925
31	Inspektorat Daerah	35.696.867.108	29.621.118.598
32	Kecamatan Banjarwangi	2.417.062.744	2.527.649.128
33	Kecamatan Banyuresmi	3.331.011.014	3.450.988.338
34	Kecamatan Bayongbong	2.845.030.000	2.954.298.686
35	Kecamatan Balubur Limbangan	3.033.709.838	3.230.952.958
36	Kecamatan Bungbulang	2.848.913.799	3.025.393.743
37	Kecamatan Caringin	2.683.528.205	2.825.833.253
38	Kecamatan Cibalong	2.498.935.630	2.497.015.562
39	Kecamatan Cibatu	2.924.712.500	2.997.296.244
40	Kecamatan Cibiuk	4.504.963.175	2.632.403.537
41	Kecamatan Cigedug	2.468.674.870	2.672.416.890
42	Kecamatan Cihurip	2.248.060.252	2.341.554.512
43	Kecamatan Cikajang	3.104.514.390	3.233.881.634
44	Kecamatan Cikelet	2.554.613.225	2.745.665.339
45	Kecamatan Cilawu	3.214.835.040	3.268.740.040
46	Kecamatan Cisewu	2.519.417.111	2.661.615.339
47	Kecamatan Cisompet	2.559.503.586	2.669.671.570
48	Kecamatan Cisurupan	2.856.299.787	2.936.612.145
49	Kecamatan Garut Kota	28.263.494.504	28.932.169.753
50	Kecamatan Kadungora	3.579.084.792	3.874.005.922
51	Kecamatan Karangtengah	2.175.352.817	2.350.177.181

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	APBD MURNI	Perubahan RKPD 2025
52	Kecamatan Karangpawitan	12.114.763.495	12.614.022.139
53	Kecamatan Kersamanah	4.531.301.806	4.785.054.750
54	Kecamatan Leles	3.399.949.898	3.611.119.582
55	Kecamatan Leuwigoong	2.517.842.716	2.725.233.860
56	Kecamatan Malangbong	3.138.768.528	3.201.715.772
57	Kecamatan Mekarmukti	4.345.149.287	4.418.363.269
58	Kecamatan Pakenjeng	2.680.255.368	2.893.663.212
59	Kecamatan Pameungpeuk	2.812.488.269	3.008.047.213
60	Kecamatan Pamulihan	2.332.642.888	2.441.814.812
61	Kecamatan Pangatikan	2.590.114.751	2.898.834.381
62	Kecamatan Pasirwangi	3.249.401.069	3.473.406.413
63	Kecamatan Peundeuy	2.375.054.061	2.494.742.205
64	Kecamatan Samarang	3.370.714.242	3.523.248.136
65	Kecamatan Selaawi	2.375.788.460	2.373.228.754
66	Kecamatan Singajaya	2.935.638.000	2.984.133.052
67	Kecamatan Sucinaraja	2.532.911.325	2.576.792.100
68	Kecamatan Sukaresmi	3.115.979.056	3.074.617.613
69	Kecamatan Sukawening	3.302.595.996	3.465.587.640
70	Kecamatan Talegong	2.991.615.639	3.111.131.333
71	Kecamatan Tarogong Kaler	5.532.153.687	5.693.220.831
72	Kecamatan Tarogong Kidul	15.463.794.634	16.350.781.708
73	Kecamatan Wanaraja	2.975.974.734	3.158.428.478
74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.900.905.213	18.023.143.251
TOTAL		5.032.571.562.691	5.203.723.099.183

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

Substansi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/sub kegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau sub kegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau sub kegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dan menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Rekapitulasi rencana

program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 menurut Perangkat Daerah pelaksana disajikan pada table berikut.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
1	Dinas Pendidikan	6	18	103	1.947.456.348.895
2	Dinas Kesehatan	5	23	104	1.062.547.947.026
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	22	79	236.261.998.239
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	8	17	46	93.964.615.972
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	43	19.917.919.781
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2	11	31	14.805.060.928
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	64	8.948.102.499
8	Dinas Sosial	7	19	92	39.454.943.409
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	17	34	12.271.147.099
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13	32	17.895.052.574
11	Dinas Lingkungan Hidup	11	21	64	52.141.489.826
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	16	50	15.141.395.643
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	55	37.173.307.306
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	33	78	43.986.835.480
15	Dinas Perhubungan	3	20	46	59.816.065.817
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	73	16.479.539.207
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	15	49	17.875.030.943
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	43	8.939.265.915
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	17	113	55.352.240.547
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	20	49	16.546.658.137
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	7	21	39	24.873.140.864
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	23	93	18.472.472.794

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
23	Dinas Pertanian	6	15	57	83.381.342.825
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	11	19	50	32.473.621.823
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	3	20	85	89.466.780.923
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	2	18	119	67.560.969.608
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	18	86	16.177.554.063
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	54	827.534.055.672
29	Badan Pendapatan Daerah	2	9	52	22.126.374.567
30	Badan Kepegawaian dan Diklat	3	13	41	18.332.029.925
31	Inspektorat Daerah	3	12	56	29.621.118.598
32	Kecamatan Banjarwangi	6	14	35	2.527.649.128
33	Kecamatan Banyuresmi	6	13	37	3.450.988.338
34	Kecamatan Bayongbong	6	14	38	2.954.298.686
35	Kecamatan Balubur Limbangan	6	14	45	3.230.952.958
36	Kecamatan Bungbulang	6	13	42	3.025.393.743
37	Kecamatan Caringin	6	14	40	2.825.833.253
38	Kecamatan Cibalong	6	15	41	2.497.015.562
39	Kecamatan Cibatu	6	14	42	2.997.296.244
40	Kecamatan Cibiuk	6	14	38	2.632.403.537
41	Kecamatan Cigedug	6	14	40	2.672.416.890
42	Kecamatan Cihurip	6	13	42	2.341.554.512
43	Kecamatan Cikajang	6	16	33	3.233.881.634
44	Kecamatan Cikelet	6	15	38	2.745.665.339
45	Kecamatan Cilawu	6	14	45	3.268.740.040
46	Kecamatan Cisewu	6	15	37	2.661.615.339
47	Kecamatan Cisompet	6	13	31	2.669.671.570
48	Kecamatan Cisurupan	6	13	36	2.936.612.145
49	Kecamatan Garut Kota	6	15	40	28.932.169.753
50	Kecamatan Kadungora	6	14	43	3.874.005.922
51	Kecamatan Karangtengah	6	13	43	2.350.177.181
52	Kecamatan Karangpawitan	6	16	41	12.614.022.139
53	Kecamatan Kersamanah	6	13	35	4.785.054.750

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu
54	Kecamatan Leles	6	13	42	3.611.119.582
55	Kecamatan Leuwigoong	6	14	43	2.725.233.860
56	Kecamatan Malangbong	6	14	47	3.201.715.772
57	Kecamatan Mekarmukti	6	14	40	4.418.363.269
58	Kecamatan Pakenjeng	6	14	35	2.893.663.212
59	Kecamatan Pameungpeuk	6	13	44	3.008.047.213
60	Kecamatan Pamulihan	6	14	36	2.441.814.812
61	Kecamatan Pangatikan	6	15	36	2.898.834.381
62	Kecamatan Pasirwangi	6	13	33	3.473.406.413
63	Kecamatan Peundeuy	6	13	36	2.494.742.205
64	Kecamatan Samarang	6	14	31	3.523.248.136
65	Kecamatan Selaawi	6	14	40	2.373.228.754
66	Kecamatan Singajaya	6	14	45	2.984.133.052
67	Kecamatan Sucinaraja	6	13	34	2.576.792.100
68	Kecamatan Sukaresmi	6	13	34	3.074.617.613
69	Kecamatan Sukawening	6	13	36	3.465.587.640
70	Kecamatan Talegong	6	14	43	3.111.131.333
71	Kecamatan Tarogong Kaler	6	18	55	5.693.220.831
72	Kecamatan Tarogong Kidul	6	14	39	16.350.781.708
73	Kecamatan Wanaraja	6	15	42	3.158.428.478
74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	62	18.023.143.251

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2025 disajikan secara terperinci dalam Lampiran Buku II Perubahan RKPD Tahun 2025. Dalam memberikan gambaran terhadap konsistensi Program Daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan Perubahan 2025, tersaji gambaran konsistensi program sebagai berikut.

Tabel 5.4 Gambaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD 2025

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Program		
		Perubahan RKPD 2025	RKPD 2025	RPJMD 2025-2029
1	Dinas Pendidikan	6	6	6
2	Dinas Kesehatan	5	5	5

No	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Program		
		Perubahan RKPD 2025	RKPD 2025	RPJMD 2025-2029
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	10	10
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	8	8	8
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2
6	Dinas Pemadam Kebakaran	2	2	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2
8	Dinas Sosial	7	7	7
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	5	5
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5
11	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	11	10
15	Dinas Perhubungan	3	3	4
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	6
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	8	8
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4	4	4
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	7	7	5
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	8	10
23	Dinas Pertanian	6	6	7
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	11	11	11
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	3	3	3
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	2	2	2
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	5
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3
29	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2
30	Badan Kepegawaian dan Diklat	3	3	3

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.1 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
1	Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	396.699.460	396.699.460	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.676.379.982	2.676.379.982	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	188.726.890	188.726.890	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	-	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.799.977.000	1.799.977.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	55.305.400.000	55.305.400.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	51.402.000.000	51.402.000.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	246.138.900.000	246.138.900.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24.067.180.660	24.067.180.660	
		Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.449.265.924	1.449.265.924	
		Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	456.200.000	456.200.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	6.241.853.800	6.241.853.800	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	300.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	
		Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.026.842.800	2.026.842.800	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	752.251.100	752.251.100	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.180.884.546	10.180.884.546	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	76.728.000	76.728.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	456.200.000	456.200.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000	400.000.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	300.000.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	51.402.000.000	51.402.000.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	
		Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.097.231.925	1.097.231.925	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.785.494.350	2.785.494.350	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.449.265.924	1.449.265.924	
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.026.842.800	2.026.842.800	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.099.943.995	2.099.943.995	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	184.584.500	184.584.500	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	118.480.150.000	118.480.150.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	184.295.800	184.295.800	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Sekolah Menengah Pertama			
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.180.884.546	10.180.884.546	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	32.135.877.605	32.135.877.605	
		Pendidikan Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	133.010.285	133.010.285	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.150.000.000	1.150.000.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	55.305.400.000	55.305.400.000	
2	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	488.659.800	488.659.800	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	202.430.000	202.430.000	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	611.508.800	611.508.800	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.238.024.870	3.238.024.870	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	325.238.200	325.238.200	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	772.815.760	772.815.760	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	523.260.000	523.260.000	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	131.302.200	131.302.200	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.126.437.530	1.126.437.530	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	131.386.000	131.386.000	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	559.269.156	559.269.156	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	701.293.020	701.293.020	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.013.124.400	10.013.124.400	Puskesmas
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.385.320.000	2.385.320.000	
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.186.468.000	2.186.468.000	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.387.688.000	5.387.688.000	
3	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.563.359.478	4.563.359.478	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.729.842.650	12.729.842.650	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000	300.000.000	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.313.451.300	9.313.451.300	
		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.729.842.650	12.729.842.650	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000	300.000.000	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.313.451.300	9.313.451.300	
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	-	-	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.563.359.478	4.563.359.478	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	
4	Bidang Perumahan Rakyat dan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
	Kawasan Pemukiman	masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	26.048.238.358	26.048.238.358	
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	310.778.850	310.778.850	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	327.813.650	327.813.650	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	55.411.550	55.411.550	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	139.219.719	139.219.719	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.108.896.816	1.108.896.816	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	881.516.400	881.516.400	
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	90.818.225	90.818.225	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan	-	-	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Bencana Kabupaten/Kota			
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	29.436.100	29.436.100	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	254.555.000	254.555.000	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	432.880.600	432.880.600	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	-	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.351.499.400	5.351.499.400	Dinas Pemadam Kebakaran
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	367.380.000	367.380.000	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	91.619.266	91.619.266	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	167.550.000	167.550.000	
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	125.729.600	125.729.600	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.800.000	223.800.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.569.148.800	2.569.148.800	
		Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.488.206.440	1.488.206.440	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	501.000.000	501.000.000	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	172.942.400	172.942.400	
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	26.899.600	26.899.600	
		Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.488.206.440	1.488.206.440	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	501.000.000	501.000.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	172.942.400	172.942.400	
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	26.899.600	26.899.600	
6	Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	-	
			Penyediaan Makanan	1.199.382.800	1.199.382.800	
			Penyediaan Sandang	493.990.200	493.990.200	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	3.000.000	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.045.000	20.045.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.142.500	10.142.500	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.599.600	100.599.600	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	359.509.525	359.509.525	
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.680.000	3.680.000	
			Penyediaan Alat Bantu	251.890.000	251.890.000	
			Penyediaan Permakanan	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Sandang	110.000.000	110.000.000	
		Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	3.000.000	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.045.000	20.045.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.142.500	10.142.500	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.599.600	100.599.600	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	359.509.525	359.509.525	
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.680.000	3.680.000	
			Penyediaan Alat Bantu	251.890.000	251.890.000	
			Penyediaan Permakanan	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Sandang	110.000.000	110.000.000	
		Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	3.000.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.045.000	20.045.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.142.500	10.142.500	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.599.600	100.599.600	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	359.509.525	359.509.525	
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.680.000	3.680.000	
			Penyediaan Alat Bantu	251.890.000	251.890.000	
			Penyediaan Permakanan	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Sandang	110.000.000	110.000.000	
		Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	3.000.000	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.045.000	20.045.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.142.500	10.142.500	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.599.600	100.599.600	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	359.509.525	359.509.525	
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.680.000	3.680.000	
			Penyediaan Alat Bantu	251.890.000	251.890.000	
			Penyediaan Permakanan	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Sandang	110.000.000	110.000.000	
		Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	3.000.000	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.045.000	20.045.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	50.000.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.142.500	10.142.500	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100.599.600	100.599.600	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	359.509.525	359.509.525	
			Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.680.000	3.680.000	
			Penyediaan Alat Bantu	251.890.000	251.890.000	

NO	SPM	SPM/LAYANAN SPM	SUB KEGIATAN	RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan Permakanan	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Sandang	110.000.000	110.000.000	
Total				815.845.099.823	815.845.099.823	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2025

5.2.1 Rencana Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan pula untuk mendanai urusan terkait upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya penanganan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 (nol) persen pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Garut yang terkait dengan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025 disajikan sebagai berikut, adapun terdapat perubahan pagu pada subkegiatan dikarenakan adanya efisiensi dan kebijakan lainnya.

Tabel 5.6 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518.712.550	196.540.920
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182.784.900	233.948.772
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.963.520.000	5.050.800.000
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.812.800.000	191.623.400

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	69.207.556.000	12.729.842.650
		Pembangunan Tanggul Sungai	48.785.500.000	10.422.571.444
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.242.649.500	4.563.359.478
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	-
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400.000.000	-
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	127.394.800.000	15.107.486.700
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	500.000.000	79.923.000
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.500.000.000	1.542.065.600
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.000.000	45.160.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000	44.689.620
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5.000.000.000	12.248.985.810
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100.000.000	47.139.620
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	-
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	150.000.000	6.304.080.000
	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.580.000.000	3.935.494.350

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.120.000.000	5.632.268.780
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	49.470.000.000	36.665.137.605
	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000	101.950.000
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	-
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400.000.000	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400.000.000	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.500.000.000	563.814.000
	Dinas Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.925.000.000	-
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5.750.000.000	199.175.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5.400.000.000	398.645.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.750.000.000	4.481.615.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23.125.000.000	20.500.800.000
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	600.000.000	-
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	600.000.000	-
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.300.000.000	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.000.000.000	7.604.449.423

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	385.000.000	-
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.000.000	-
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	79.111.000
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100.000.000.000	58.924.760.928
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.500.000.000	2.941.125.500
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	300.000.000	-
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000	13.024.119.179
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.000.000	-
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	100.000.000	39.543.400
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	119.967.700
		Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000	-
	Kecamatan Balubur Limbangan	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	174.000.000	-
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	28.090.215	-
	Kecamatan Banjarwangi	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	10.000.000	10.000.000

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
	Kecamatan Cibatu	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.098.500	7.765.500
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	11.502.000	19.313.700
	Kecamatan Pangatikan	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	30.600.000	-
	Kecamatan Tarogong Kaler	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13.816.400	-
Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150.000.000	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	127.277.500
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	325.000.000	327.813.650
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	224.703.600	16.795.000
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	155.639.532	87.035.400
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	189.960.000	5.359.500
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	194.690.000	35.522.000
	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.100.421.000	5.127.507.397

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.150.000.000	165.485.223.237
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000	59.324.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	87.791.000	106.475.300
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000	244.329.900
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.618.000	101.215.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	200.000.000	128.763.310
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.547.468.500	34.270.281.700
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000	305.754.400
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000	6.625.574.635
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	87.890.000	7.590.400
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	176.000.000	1.355.279.100
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		695.393.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.115.400.000	386.407.880
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.904.890.000	1.354.864.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	275.000.000	3.257.062.765
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.024.000	65.693.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.259.062.000	279.634.578

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	137.500.000	350.646.510
	Dinas Ketahanan Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4.435.639.700	3.952.240.509
	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.300.000.000	2.499.943.995
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	150.000.000	80.119.600
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	54.679.790
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000	-
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	-
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	41.339.700.000	55.305.400.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	51.066.000.000	51.402.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	246.883.200.000	246.138.900.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	118.678.700.000	118.480.150.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	418.075.640	937.026.000
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	195.800.000	506.421.200
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6.570.300.000	6.570.300.000
	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200.000.000	45.613.300
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000	13.853.040.400

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	225.000.000	3.000.000
		Pelayanan Dukungan Psikososial	200.000.000	-
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	50.000.000	-
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	725.000.000	20.045.000
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.500.000.000	50.000.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	300.000.000	10.142.500
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	250.000.000	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	550.000.000	100.599.600
		Pemberian Layanan Kedaruratan	1.450.000.000	12.375.269.525
		Pemberian Layanan Rujukan	225.000.000	10.000.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	225.000.000	5.000.000
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	225.000.000	3.680.000
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	250.000.000	-
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	-
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	802.906.100
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.000.000	-

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000	353.955.800
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	92.660.500
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	50.000.000	-
		Penyediaan Alat Bantu	1.000.000.000	251.890.000
		Penyediaan Makanan	1.000.000.000	599.691.400
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	250.000.000	-
		Penyediaan Permakanan	1.250.000.000	150.000.000
		Penyediaan Sandang	1.300.000.000	356.995.100
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	250.000.000	-
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	50.000.000	
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50.000.000	1.316.656.620
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	350.000.000	130.283.550
	Kecamatan Kadungora	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11.660.200	10.000.100
Meningkatkan Pendapatan	Dinas Ketahanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.311.937.715	4.179.371.600
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000	50.000.000
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	350.000.000	292.207.165
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.300.000.000	173.023.620

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	34.800.000
	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	600.000.000	-
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000	-
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	-
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000	140.784.500
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300.000.000	-
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	400.000.000	212.506.480
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.000.000	188.590.744
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	190.578.600
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000.000	1.195.790.264
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.700.000.000	-
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4.500.000.000	-

STRATEGI	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
			MURNI	PERUBAHAN
	Dinas Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	960.000.000	217.843.863
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.100.000.000	1.614.595.000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.450.000.000	1.426.860.000
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360.000.000	156.730.000
	Dinas Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	150.000.000	46.588.600
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500.000.000	30.354.000
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	180.000.000	72.121.350
		Perluasan Kesempatan Kerja	3.200.000.000	98.232.020
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.875.000.000	1.005.206.696
Total			1.137.766.500.952	972.658.891.832

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.2.2 Rencana Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Dalam upaya pengendalian inflasi Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengendalian inflasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi inflasi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan
Pengendalian Inflasi Tahun 2025

STRATEGI INFLASI	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD		PERANGKAT DAERAH
		MURNI	PERUBAHAN	
K1. Ketersediaan Pasokan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.150.000.000	28.960.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200.000.000	45.613.300	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000	13.853.040.400	
K2. Keterjangkauan Harga	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000	89.596.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518.712.550	196.540.920	Dinas Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.311.937.715	4.179.371.600	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4.435.639.700	3.952.240.509	
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.361.326.450	851.758.200	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182.784.900	233.948.772	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.963.520.000	5.050.800.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.812.800.000	191.623.400	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	127.394.800.000	15.107.486.700	
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	300.000.000	24.256.000	Dinas Perikanan dan Peternakan

STRATEGI INFLASI	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD		PERANGKAT DAERAH
		MURNI	PERUBAHAN	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2.000.000.000	127.260.100	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.500.000.000	563.814.000	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	9.000.000.000	4.091.320.080	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.000.000	188.590.744	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	190.578.600	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000.000	1.195.790.264	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	340.000.000	4.650.000.000	Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23.125.000.000	20.500.800.000	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	240.000.000	160.560.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.100.000.000	1.614.595.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.100.000.000	44.067.150	

STRATEGI INFLASI	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD		PERANGKAT DAERAH
		MURNI	PERUBAHAN	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.100.000.000	2.641.863.900	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	403.500.000	25.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.750.000.000	1.426.860.000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360.000.000	156.730.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.950.000.000	6.346.766.900	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.200.000.000	74.478.700	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	200.000.000	832.932.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6.050.000.000	2.525.680.300	
K3. Kelancaran Distribusi	Pembangunan Jalan	77.291.437.600	1.673.108.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Pembangunan Jembatan	11.355.453.700	2.489.719.192	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.998.982.012	16.720.966.300	
	Rehabilitasi Jalan	36.882.644.400	58.715.301.400	
	Rehabilitasi Jembatan	4.640.381.930	1.620.833.996	
	Rekonstruksi Jalan	480.230.194.000	47.577.942.828	

STRATEGI INFLASI	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD		PERANGKAT DAERAH
		MURNI	PERUBAHAN	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		-	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	400.000.000	110.265.316	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5.800.000.000	398.645.000	Dinas Pertanian
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.150.000.000	4.481.615.000	
K4. Komunikasi Efektif	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	86.421.500	115.126.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pemantauan Stok Pangan	80.170.000	22.379.670	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	60.170.000	37.113.000	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	48.174.610	35.923.810	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90.000.000	38.025.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	300.000.000	175.510.000	Dinas Pertanian
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	351.611.080	57.318.885	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
Total		845.565.662.147	225.432.718.236	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.2.3 Rencana Kegiatan Optimalisasi Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dalam upaya menjaga Ketahanan Pangan Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Ketahanan pangan yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Optimalisasi Ketahanan Pangan Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	518,712,550	196.540.920,00
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	184,629,344	123.422.400,00
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	309,956,500	112.879.600,00
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	131,218,000	37.050.000,00
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,361,326,450	851.758.200,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	182,784,900	233.948.772,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,311,937,715	4.179.371.600,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4,435,639,700	3.952.240.509,00
	Pemantauan Stok Pangan	80,170,000	22.379.670,00
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	159,189,200	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	60,170,000	37.113.000,00
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	48,174,610	273.685.403,00
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	48,174,610	0
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	77,291,437,600	1.673.108.200,00
	Pembangunan Jembatan	11,355,453,700	2.489.719.192,00

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Pemeliharaan Rutin Jalan	11,998,982,012	16.720.966.300,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,493,918,000	675.532.500,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	593,862,800	1.000.000.000,00
	Rehabilitasi Jalan	36,882,644,400	58.715.301.400,00
	Rehabilitasi Jembatan	4,640,381,930	1.620.833.996,00
	Rekonstruksi Jalan	480,230,194,000	47.577.942.828,00
Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	950,000,000	511.180.770,00
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3,054,200,000	1.847.318.848,00
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	250,000,000	43.845.400,00
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,220,000,000	0
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,500,000,000	684.540.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9,000,000,000	30.207.093.304,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	500,000,000	0
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	200,000,000	0
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	200,000,000	0
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	400,000,000	0
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	500,000,000	0

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	300,000,000	140.784.500,00
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250,000,000	188.590.744,00
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300,000,000	0
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,700,000,000	1.195.790.264,00
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	0
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,700,000,000	0
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	400,000,000	0
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	400,000,000	212.506.480,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1,000,000,000	768.401.800,00
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	500,000,000	0
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100,000,000	0
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4,500,000,000	0
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,000,000,000	418.016.050,00
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	500,000,000	0
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	50,000,000	0

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	400,000,000	110.265.316,00
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	300,000,000	0
	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	300,000,000	24.256.000,00
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	250,000,000	0
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	232,121,600	0
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1,167,878,400	1.162.120.972,00
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	250,000,000	0
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	400,000,000	0
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	200,000,000	0
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,500,000,000	0
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000	190.578.600,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400,000,000	0
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400,000,000	0

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2,500,000,000	563.814.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2,000,000,000	287.612.663,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	300,000,000	0
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2,000,000,000	127.260.100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	150,000,000	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	600,000,000	0
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	600,000,000	594.792.500,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	500,000,000	162.000.000,00
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	150,000,000	0
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	150,000,000	0
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	150,000,000	0
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	300,000,000	0
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	9,000,000,000	4.091.320.080,00
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	200,000,000	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300,000,000	0
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	150,000,000	0

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,100,000,000	58.862.000,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100,000,000,000	2.899.689.585,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	750,000,000	0
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	200,000,000	0
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2,150,000,000	28.960.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90,000,000	38.025.300,00
Dinas Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	240,000,000	160.560.000,00
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	170,000,000	0
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	170,000,000	0
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	128,000,000	0
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	360,000,000	156.730.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1,925,000,000	0
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5,750,000,000	199.175.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	5,400,000,000	398.645.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5,750,000,000	4.481.615.000,00

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	23,125,000,000	20.500.800.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5,750,000,000	2.525.680.300,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	340,000,000	4.650.000.000,00
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ Kota	403,500,000	25.000.000,00
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	50,000,000	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	100,000,000	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	100,000,000	0
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	100,000,000	0
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	300,000,000	175.510.000,00
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	339,000,000	0
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3,100,000,000	1.614.595.000,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	1,100,000,000	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	1,100,000,000	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1,100,000,000	44.067.150,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3,100,000,000	2.641.863.900,00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1,549,014,000	594.792.500,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,521,904,000	387.050.750,00

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Murni	Perubahan
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2,341,158,000	415.871.900,00
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50,000,000	0
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	960,000,000	217.843.863,00
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	365,000,000	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,450,000,000	1.426.860.000,00
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	200,000,000	0
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,950,000,000	6.346.766.900,00
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1,200,000,000	74.478.700,00
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	200,000,000	632.932.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	74,994,000	154.641.900,00
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	199,739,900	0
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	65,266,100	0
Total Anggaran		875,810,734,021	234.876.899.62

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.2.4 Rencana Kegiatan Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Dalam upaya Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan kegiatan untuk Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Anggaran	Perubahan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	30,750,000	28.664.200,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100,000,000	41.797.065,00
	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	70,000,000	51.408.691,00
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	89,418,000	112.144.400,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50,000,000	50,000,000
	Pemulihan Usaha Mikro	7,103,880,709	4.397.700.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	191,588,000	228.084.800,00
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	50,000,000	0
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	250,000,000	1.540.151.250,00
	Pengembangan Usaha Mikro	500,000,000	110.125.190,00
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	350,000,000	249.335.480,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	350,000,000	292.207.165,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	96,200,000	0
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	336,000,000	52.371.200,00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	333,000,000	64.690.000,00

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Anggaran	Perubahan
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	316,800,000	75.350.000,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	312,000,000	175.165.000,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	99,370,000	192.009.000,00
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	347,930,000	154.689.000,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	74,820,000	48.498.000,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	249,480,000	0
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	437,738,000	0
	Pengawasan Penanaman Modal	262,793,000	39.875.000,00
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	126,704,900	68.522.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	572,905,000	151.646.000,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000	0
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	46.431.800,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	48.041.330,00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50,000,000	1.316.656.620,00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50,000,000	0

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Anggaran	Perubahan
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	63.436.290,00
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	50,000,000	0
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100,000,000	0
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	350,000,000	130.283.550,00
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	300,000,000	43.291.300,00
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	408,000,000	0
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	900,000,000	560.000.000,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	1,875,000,000	614.189.900,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,875,000,000	1.005.206.696,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500,000,000	30.354.000,00
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	150,000,000	9.681.600,00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	180,000,000	72.121.350,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	200,000,000	47.672.450,00
	Perluasan Kesempatan Kerja	3,200,000,000	98.232.020,00
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100,000,000	33.403.150,00
	Job Fair/Bursa Kerja	200,000,000	31.462.570,00

Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2025	
		Anggaran	Perubahan
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	200,000,000	74.473.829,00
Total		23,764,377,609	12.299.371.896

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.2.5 Rencana Kegiatan Penanganan Stunting Tahun 2025

Dalam upaya Penanganan Stunting Tahun 2025 Kabupaten Garut telah memetakan kegiatan untuk Penanganan Stunting yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Rencana Kegiatan dan Alokasi Pendanaan Penanganan Stunting Tahun 2025

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
Dinas Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	359.570.603	194.453.569
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.839.318.100	846.507.656
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	186.961.175
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.200.000.000	1.526.379.982
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	218.075.640	752.251.100
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	950.000.000	910.270.750
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	8.000.000.000	3.069.580.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	200.000.000	0
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	300.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.200.000.000	456.200.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	150.000.000	80.119.600
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	150.000.000	76.728.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000	133.010.285
Dinas Kesehatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.425.000	21.045.780
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.000.000	157.895.676
	Pembangunan Puskesmas	14.000.000.000	0
	Pengembangan Puskesmas	33.214.400.000	38.852.663.254
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.986.128.631	12.097.577.381
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15.733.136.213	27.575.830.045
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	200.000.000	128.763.310
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000	6.625.574.635
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	110.000.000	305.754.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	664.618.000	101.215.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	110.000.000	244.329.900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	275.000.000	3.257.062.765
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	110.024.000	65.693.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.547.468.500	34.270.281.700

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.305.490.000	1.213.217.800
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.217.762.900	6.252.517.900
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	309.546.600	1.571.933.300
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.100.421.000	5.127.507.397
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.150.000.000	165.485.223.237
	Operasional Pelayanan Puskesmas	62.464.602.000	11.374.004.800
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	267.771.000	221.487.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		902.598.200
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	428.009.000	1.951.447.000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.534.695.000	1.504.860.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	453.590.500	148.867.100
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	521.880.700	557.263.300
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	55.000.000	44.735.500

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	267.865.400	250.643.100
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	237.985.000	165.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	220.000.000	185.000.000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	110.200.000	775.467.825
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.405.600	3.827.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294.869.600	92.310.400
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000	300.000.000
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	69.207.556.000	12.729.842.650
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.000.000.000	9.313.451.300
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	35.000.000.000	0
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.242.649.500	4.563.359.478
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400.000.000	0
Dinas Perumahan dan Permukiman	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	29.850.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.880.000	83.440.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	200.000.000	59.043.500
Satuan Polisi Pamong Praja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.348.400	4.348.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	122.141.000
Dinas Pemadam Kebakaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.293.300	11.243.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		27.639.999
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.408.200	11.408.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.505.200	91.748.000
Dinas Sosial	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.663.900	26.342.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		67.950.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.000.000	0
	Penyediaan Permakanan	750.000.000	150.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	650.000.000	20.045.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	200.000.000	0
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	250.000.000	0
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	802.906.100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	400.000.000	13.853.040.400

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.850.000	29.574.742
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.931.990	48.853.465
Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.258.780	45.182.890
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.659.500	180.714.100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.311.937.715	4.179.371.600
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	131.218.000	37.050.000
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	309.956.500	112.879.600
Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	48.058.553
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	24.960.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30.900.000.000	383.666.032
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	8.600.000.000	5.623.823.262
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	6.900.000.000	5.805.449.205
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	26.600.000.000	6.048.958.531
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.034.800	38.399.300

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.136.000	184.338.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	18.215.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	21.425.200
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	100.000.000	47.474.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000	44.689.620
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.083.776.000	5.014.703.420
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	125.000.000	0
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.500.000.000	1.542.065.600
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.500.000.000	1.315.424.315
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5.000.000.000	12.248.985.810
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.300.000.000	173.023.620

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	47.485.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	27.820.000
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	6.200.000.000	5.973.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	614.000.000	893.178.800
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.800.000.000	6.105.830.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		2.691.050.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	114.300.000	156.400.000
	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	195.800.000	506.421.200
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	200.000.000	630.000.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	400.000.000	240.000.000
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberd	144.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6.570.300.000	6.570.300.000
Dinas Perhubungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	19.352.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	212.235.600
Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.476.200	35.968.800
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	560.275.000	148.029.800
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	34.950.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	55.712.000
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		1.783.572.700
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400.000.000	616.497.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100.000.000	41.797.065
	Pemulihan Usaha Mikro	7.103.880.709	4.397.700.000
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	89.418.000	112.144.400

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	191.588.000	228.084.800
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	350.000.000	292.207.165
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	296.000.000	24.883.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.260.000	124.425.000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	316.800.000	75.350.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	437.738.000	0
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	244.318.360	29.999.880
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.400.000	25.050.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	9.568.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	39.250.000
Dinas Perikanan dan Peternakan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	21.202.988
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	68.863.344
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	190.578.600
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	400.000.000	110.265.316
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	300.000.000	

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.183.600	23.414.429
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.957.000	63.722.000
Dinas Pertanian	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.002.798
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		196.430.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.450.000.000	1.426.860.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	19.567.960
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	55.015.811
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10.000.000.000	7.855.833.882
Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	144.701.500	115.811.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.189.717.750	769.426.742
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	255.262.000	209.390.400
Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.420.898	240.854.973
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.041.000	448.900.500
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.770.500	32.666.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.927.200	99.267.800
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	230.701.100	183.938.314
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.951.800	32.145.900

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	82.500.000	54.341.500
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	114.241.000	56.568.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	330.000.000	167.199.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.000.000	68.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.000.000	305.676.000
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	150.000.000	0
Badan Pendapatan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	199.556.280	151.850.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.595.700	97.496.000
Badan Kepegawaian dan Diklat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.488.500	7.538.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.397.600	166.534.900
Inspektorat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.239.800	30.405.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.130.600	299.191.000
Kecamatan Banjarwangi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	1.828.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	14.338.500
Kecamatan Banyuresmi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.320	3.300.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.200.000	18.480.000
Kecamatan Bayongbong	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.828.000	11.832.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.560.000	37.560.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.904.100	67.651.442
Kecamatan Balubur Limbangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.501.650
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.220.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.533.796	5.340.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50.613.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12.060.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.184.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	115.090.000	
Kecamatan Bungbulang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	2.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	33.840.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000	15.999.800
Kecamatan Caringin	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.574.700	2.290.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.200.000	11.450.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	51.579.600	73.139.000
Kecamatan Cibalong	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.385.930	1.995.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.576.000	17.120.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.500.000	69.510.000
Kecamatan Cibatu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.738.544	29.571.344
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	14.850.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	4.239.900
Kecamatan Cibiuk	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.630.600	3.630.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.856.585	15.650.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.694.000	37.094.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.587.169	58.240.900
Kecamatan Cigedug	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.646.600	30.400.680
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.680.000	7.940.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	50.545.852
Kecamatan Cihurip	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	1.600.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	10.000.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100.000.000	70.500.000
Kecamatan Cikajang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	12.300.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000	15.035.500
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	15.009.500
Kecamatan Cikelet	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	70.620.293
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.000.000	31.356.500
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	33.800.000	33.055.300
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	52.526.148
Kecamatan Cilawu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.173.600	2.273.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	20.014.800
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	74.917.100	75.076.000
Kecamatan Cisewu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	22.412.776
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	28.840.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	66.483.484
Kecamatan Cisompet	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	3.916.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	14.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	57.474.700
Kecamatan Cisurupan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.000	1.368.900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000	4.200.000
Kecamatan Garut Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.035.500	4.965.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.200.000	82.040.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.020.178.000	2.872.724.850
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.974.738.400	4.005.708.500
Kecamatan Kadungora	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.080.800	1.432.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	14.160.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.524.800	2.451.400
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.238.800	11.511.400
Kecamatan Karangtengah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	2.046.960
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	11.043.500
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0
Kecamatan Karangpawitan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	3.882.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.800.000	15.260.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	520.000.000	514.566.200
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	906.000.000	958.000.000
Kecamatan Kersamanah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.824.000	1.824.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	5.950.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80.000.000	41.890.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.000.000	14.999.700
Kecamatan Leles	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.800.000	4.200.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.025.400	71.248.960
Kecamatan Leuwigoong	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.245.600	1.194.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.680.000	9.540.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.800.000	73.246.700
Kecamatan Malangbong	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.826.400	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	8.960.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	21.290.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	68.000.000	47.317.012
Kecamatan Mekarmukti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	16.333.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	16.400.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000	11.981.200
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	54.416.500
Kecamatan Pakenjeng	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	20.915.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	12.270.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.000.000	12.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.000.000	18.625.000
Kecamatan Pameungpeuk	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000	10.309.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.000.000	18.600.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	76.066.900
Kecamatan Pamulihan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.891.400	2.778.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.480.000	4.200.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.500.000	74.982.940
Kecamatan Pangatikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.752.120	19.741.290
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.219.000	37.219.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.583.000	70.994.196
Kecamatan Pasirwangi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	1.828.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	8.940.000
Kecamatan Peundeuy	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	1.548.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	8.400.000
Kecamatan Samarang	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.806.400	11.513.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.592.000	40.700.000
Kecamatan Selaawi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	6.000.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	150.000.000	42.649.000
Kecamatan Singajaya	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	7.485.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	14.630.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	64.626.660
Kecamatan Sucinaraja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	2.412.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	2.850.000
Kecamatan Sukaresmi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	4.798.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.640.000	10.060.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	69.702.400
Kecamatan Sukawening	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.828.400	1.688.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.300.000	18.110.000
Kecamatan Talegong	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.425.000	1.671.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.000.000	16.800.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.203.400	47.208.900
Kecamatan Tarogong Kaler	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.322.000	2.587.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.480.000	19.950.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220.000.000	200.000.224
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	277.606.400	268.200.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	55.000.000	72.719.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.816.400	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.816.400	0
Kecamatan Tarogong Kidul	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.035.600	2.791.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.200.000	37.800.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.000.000.000	1.000.000.000

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2025	
		MURNI	PERUBAHAN
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.584.800.000	1.554.430.000
Kecamatan Wanaraja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.499.600	2.499.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	9.030.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.175.000	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.593.750	10.593.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.958.000	56.625.000
Total		558.694.119.283	475.467.690.142

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Garut Tahun 2025 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, adapun beberapa alternatif pendanaan tersaji pada gambar berikut.

Gambar 5.1 Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah

5.3. Dukungan Daerah Terhadap Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat proyek strategis provinsi yang akan dilaksanakan dan dalam menjamin sinergitas pembangunan daerah dan provinsi, telah dipetakan program daerah yang mendukung terhadap proyek strategis provinsi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Kabupaten Garut

No	Program/Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	27 Kabupaten/Kota	Pembangunnan Ruang Kelas Baru	1.526.379.982,00	Dinas Pendidikan
2	Pengamanan Mata Air	Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	126.558.800,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Pembangunan Tanggul Sungai	10.422.571.444,00	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	191.623.400,00	
3	Reboisasi hutan dan lahan		Pelaksanaan Rehabilitasi	380.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis;	Kabupaten/kota di WS Citarum,Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan Cilaki	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	15.107.486.700,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.050.800.000,00	
5	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	Rehabilitasi Jalan	58.715.301.400,00	
6	Pembangunan Kampung Adat Nelayan;	Kabupaten/kota di Utara dan Selatan jawa barat Pesisir	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	980.908.280,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	212.506.480,00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	768.401.800,00	
10	Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir);	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat	Rehabilitasi Jalan	58.715.301.400,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Pemeliharaan Rutin Jalan	16.720.966.300,00	
	Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat;	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	7.604.449.423,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	2.941.125.500,00	

No	Program/Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, diolah Bappeda 2025

5.4 Proyek Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.147-BAPPEDA/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 100.3.3.2/KEP.931-BAPPEDA/2024 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2025 ditetapkan 10 Proyek Strategis sebagai berikut.

Tabel 5.8 Proyek Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
1	Belanja Bangunan Gedung Tidak Sederhana - Pembangunan Gedung Cathlab	Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul	6.499.929.600	Dana Alokasi Umum	UOBK RSUD dr. Slamet
2	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Penambahan Ruang RSUD Limbangan	Kecamatan Balubur Limbangan	6.474.635.800	DBHCHT	Dinas Kesehatan
3	Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota	Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul	4.500.000.000	Dana Alokasi Khusus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Kiarakohok – Linggamanik	Kecamatan Cikelet	4.041.613.000	Opsen PKB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Garut – Cilandak	Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota	4.039.950.000	Opsen PKB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rekontruksi Ruas Jalan Cibogo – Cimari - Cigadog	Kecamatan Cikelet	1.070.844.000	DBH Sawit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Drainase Perkotaan Terusan Pembangunan	Kecamatan Tarogong Kidul	1.936.496.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
8	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan (Lanjutan)	Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul	3.713.198.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan
9	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Rehabilitasi Rumah Sakit, Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Penambahan Ruang RSUD Malangbong	Kecamatan Malangbong	2.574.390.000	DBHCHT dan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan Gedung Aquatik Tahap IV Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul	Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul	940.000.000	Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : Bappeda Tahun 2025

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2025, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan RKPD sebelumnya, mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal :
   a. pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   b. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan RKPD ini, maka seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004